



RENSTRA

(Rencana Strategis)

Tahun 2016 - 2021



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan MT. Haryono, Telp. (0541) 748537



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN.....	7
2.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan	7
2.2 Gambaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan.....	9
2.3 Sumber Daya Dinas Perhubungan	28
2.3.1 Sumber Daya Manusia.....	28
2.3.2 Sumber Daya Lainnya	31
2.3.3 Keadaan Umum Wilayah.....	34
2.4 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan	42
2.4.1 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan	49
2.4.2 Hambatan dan Permasalahan Dinas Perhubungan.....	85
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan.....	87
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ...	89
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan	89
3.1.1 Permasalahan Sekretariat	89
3.1.2 Permasalahan Bidang Lalu Lintas Jalan.....	89
3.1.3 Permasalahan Bidang Prasarana.....	90
3.1.4 Permasalahan Bidang Keselamatan	91
3.1.5 Permasalahan Bidang Angkutan	92



3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	93
3.3	Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Provinsi .	94
3.3.1	Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan	94
3.3.2	Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Prov. Kaltim	102
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	104
3.5	Penentuan Isu – Isu Strategis.....	132
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	134
4.1	Visi dan Misi Dinas Perhubungan	134
4.1.1	Visi Dinas Perhubungan.....	134
4.1.2	Misi Dinas Perhubungan	135
4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan	135
4.2.1	Tujuan Dinas Perhubungan	135
4.2.2	Sasaran Dinas Perhubungan	137
4.3	Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan	139
4.3.1	Strategi Dinas Perhubungan	139
4.3.2	Analisis Strategi	140
4.3.3	Kebijakan Dinas Perhubungan	142
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN LOKASI SERTA PENDANAAN INDIKATIF	147
BAB VI	INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	171
BAB VII	PENUTUP	175



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jabatan Struktural dan Fungsional.....	29
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan.....	29
Tabel 2.3	Pegawai Tidak Tetap Harian dan Pegawai Tidak Tetap Bulanan	29
Tabel 2.4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan	30
Tabel 2.5	Berdasarkan Penempatan.....	31
Tabel 2.6	Aset Dinas Perhubungan	32
Tabel 2.7	Data Sarana Operasional Dinas Perhubungan Kota Samarinda	34
Tabel 2.8	Panjang Jaringan Jalan Menurut Kondisi Jalan Kota Samarinda	34
Tabel 2.9	Panjang Jalan di Kota Samarinda berdasarkan Kewenangan Jalan...	35
Tabel 2.10	Data Pengelolaan Terminal	35
Tabel 2.11	Jumlah Angkutan yang Melayani Kota Samarinda	36
Tabel 2.12	Jumlah Penumpang yang Terlayani oleh Angkutan Umum	36
Tabel 2.13	Jumlah Kapal dan Jenis Operasi	37
Tabel 2.14	Data Bongkar atau Muat Dermaga	37
Tabel 2.15	Jembatan Penyebrangan Orang	38
Tabel 2.16	Titik Kemacetan Kota Samarinda.....	40
Tabel 2.17	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan	44
Tabel 2.18	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Serta Capaian Penganggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung	49
Tabel 2.19	Capaian Kinerja antara Renstra Dinas Perhubungan dengan RPJMD Periode Sebelumnya	51
Tabel 2.20	Pertumbuhan Jumlah Kendaraan	86
Tabel 2.21	Infrastruktur Jaringan Jalan	86
Tabel 3.1	Distribusi Penduduk Wilayah Kota Samarinda	105
Tabel 3.2	Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Samarinda.....	109
Tabel 3.3	Potensi Pengembangan Wilayah Per Kecamatan Berdasarkan RTRW	112
Tabel 3.4	Potensi Pengembangan Kota Samarinda	122
Tabel 3.5	Indikasi Program RTRW Kota Samarinda	126
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan	138
Tabel 4.2	Analisis SWOT.....	141



Tabel 4.3	Rencana Strategis dan Kebijakan	143
Tabel 5.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kota Samarinda	148
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Utama Kondisi Pada Akhir RPJMD	172

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Samarinda.....	8
Gambar 2.2	Peta Jaringan <i>Area Traffic Control System</i> (ATCS).....	41
Gambar 3.1	Peta Struktur Ruang Kota Samarinda.....	125



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Samarinda 2016-2021. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Samarinda 2016-2021 ini disusun melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan di pusat dan daerah, partisipasi seluruh pejabat Dinas Perhubungan Kota Samarinda, serta dengan memperhatikan arah reformasi perencanaan dan penganggaran yang telah ditentukan. Renstra ini juga disusun dengan semangat untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan sebagai landasan bagi Pemerintah Kota Samarinda dalam menentukan arah pembangunan bidang perhubungan ke depan.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Samarinda 2016-2021 ini berfungsi sebagai tolak ukur pengendalian dan evaluasi capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan strategi, kebijakan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Perhubungan Kota Samarinda 2016-2021, dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi dan program Kepala Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda.

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Samarinda ini masih diperlukan banyak masukan-masukan terkait kondisi dan situasi yang semakin berkembang, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan guna perbaikan dalam penyusunannya.

Samarinda, 03 Februari 2017
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SAMARINDA**

H. ISMANSYAH, SE., M.Si
NIP. 19600929 198902 1 001



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Dinas Perhubungan Kota Samarinda mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian unsur Pemerintahan yang menjadi unsur kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Perhubungan.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Samarinda mempunyai fungsi antara lain adalah Perumusan Kebijakan teknis dibidang Perhubungan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis, dibidang Lalu Lintas Jalan, dibidang Prasarana, dibidang Keselamatan, dibidang Angkutan, dan penyelenggara urusan Kesekretariatan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan demikian perencanaan pembangunan daerah kota harus mengacu dan berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan Pusat dan Provinsi. Salah satu dokumen yang harus disusun oleh Pemerintah kota pada saat pergantian Kepala Daerah adalah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan wajib dan/atau urusan Pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.



Berdasarkan ketentuan perundangan dan peraturan daerah tentang tugas pokok dan fungsi diatas perlu disusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan untuk 5 (lima) tahun kedepan dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2016-2021 ini berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang berkaitan dengan bidang Perhubungan. Rencana Strategis ini memuat suatu dokumen perencanaan yang berisi tentang Visi Dinas Perhubungan Kota Samarinda 5 (lima) tahun ke depan yang dijabarkan dalam beberapa Misi yang mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas disertai arah kebijakan dan strategi yang dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan untuk pencapaiannya.

Proses penyusunan Rencana Strategis ini telah melalui beberapa tahapan mulai pembentukan tim Penyusun Renstra SKPD, dilanjutkan dengan orientasi mengenai Renstra SKPD, kemudian penyusunan agenda kerja tim penyusunan Renstra SKPD dan terakhir penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Adapun susunan tim penyusun terdiri dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda sebagai ketua tim, Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Samarinda sebagai Sekretaris Tim, Kasubbag Program sebagai Ketua Kelompok Kerja dengan beranggotakan perwakilan dari masing-masing Bidang, Seksi dan Sekretariat.

Dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Samarinda dilakukan pertemuan dengan seluruh anggota tim untuk persamaan persepsi dan memberikan pemahaman yang diperlukan. Adapun aspek-aspek orientasi meliputi : Peraturan perUndang-Undangan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah yang meliputi Keuangan Negara, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota, Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana penyelenggaraan daerah, dan tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan Dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kota Samarinda, dan teknis menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Agenda kerja dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari pembentukan tim hingga penetapan rancangan Renstra Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Adapun agenda kerja tersebut meliputi: persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan Renstra, penyusunan rancangan akhir Renstra, penetapan Renstra Dinas Perhubungan.



Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen rencana pembangunan daerah yang disusun. Untuk itu, dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Samarinda perlu dikumpulkan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggung jawabkan. Adapun data dan informasi yang harus disiapkan antara lain: Peraturan perundang-undangan yang terkait, kebijakan pemerintah yang terkait, dokumen-dokumen seperti RTRW Kota Samarinda, Renstra Kementerian Perhubungan serta Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Timur, hasil evaluasi Renstra Dinas Perhubungan Kota Samarinda periode lalu. Dalam kaitan dengan sistem Perencanaan Pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka keberadaan Renstra Dinas Perhubungan Kota Samarinda merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda khususnya dalam menjalankan rencana agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda, serta juga telah menyesuaikan dengan rencana strategis Kementerian Perhubungan juga Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur. Renstra Dinas Perhubungan Kota Samarinda setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda.

Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, keberadaan Renja Dinas Perhubungan Kota Samarinda akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kota Samarinda yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Samarinda.

1.2 Landasan Hukum

Ketentuan hukum yang melandasi penyusunan Renstra Strategis ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 7) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 16) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



- 18) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 19) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 21) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 23) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda;
- 24) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
- 25) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda 2014-2034;
- 26) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Samarinda Tahun 2016 - 2021;
- 27) Peraturan Walikota Samarinda Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Samarinda, dimaksudkan untuk menyediakan pedoman dan tolak ukur bagi masing-masing bidang dan sekretariat dalam pelaksanaan pembangunan perhubungan di Kota Samarinda.

Adapun tujuan Renstra Dinas Perhubungan Kota Samarinda yaitu :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas dibidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2016-2021 dapat tercapai,



2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal,
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan perhubungan tahunan,
4. Menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Samarinda 2016-2021 dibuat dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan; berisikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan; berisi Struktur Organisasi Dishub Kota Samarinda, Gambaran Tugas dan Fungsi, Sumber Daya Dishub, Kinerja Pelayanan Dishub serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi; berisi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Timur, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan; berisi Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif; berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif).

BAB VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD; berisi indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII Penutup.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

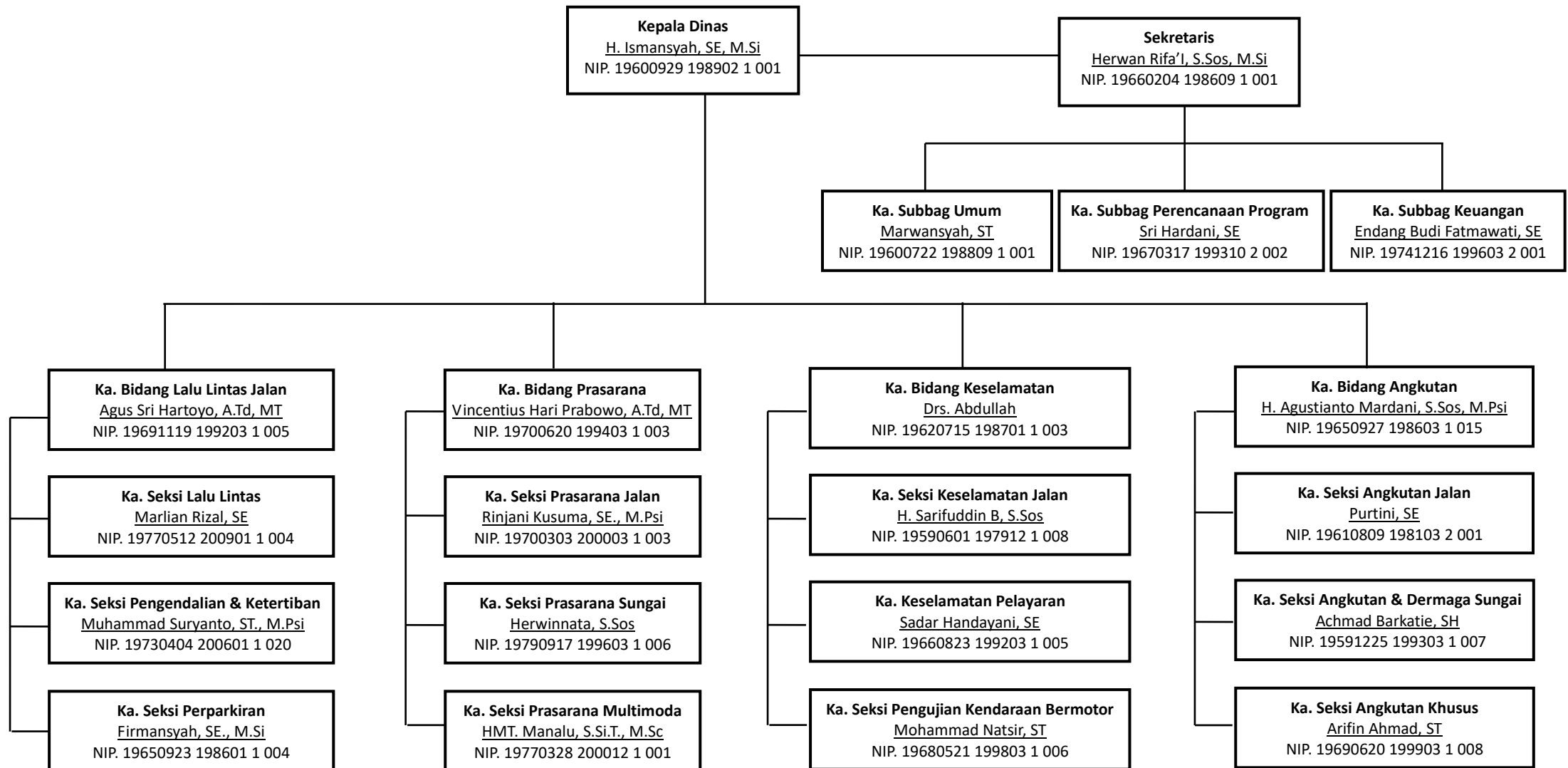
2.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Serta Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Samarinda tentang, susunan organisasi SKPD Dinas Perhubungan terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Perencanaan Program
3. Bidang Lalu Lintas Jalan membawahkan :
 - a. Seksi Lalu Lintas
 - b. Seksi Pengendalian & Ketertiban
 - c. Seksi Perparkiran
4. Bidang Prasarana membawahkan :
 - a. Seksi Prasarana Jalan
 - b. Seksi Prasarana Sungai
 - c. Seksi Prasarana Multimoda
5. Bidang Keselamatan membawahkan :
 - a. Seksi Keselamatan Jalan
 - b. Seksi Keselamatan Pelayaran
 - c. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
6. Bidang Angkutan membawahkan :
 - a. Seksi Angkutan Jalan
 - b. Seksi Angkutan & Dermaga Sungai
 - c. Seksi Angkutan Khusus



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Samarinda





2.2 Gambaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Daerah adalah Kota Samarinda, Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda. Walikota adalah Walikota Samarinda, Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda dan merupakan unsur staf yang membantu tugas Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Samarinda yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan konkuren bidang perhubungan. Bidang/Seksi adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pemegang jabatan fungsional yang tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu sesuai kebutuhan daerah. Uraian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan adalah tugas dan fungsi dari setiap unsur / unit kerja yang berada dalam satuan organisasi Dinas Perhubungan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda, adapun uraian tugas dan fungsi pejabat adalah sebagai berikut :

1) Kepala Dinas Perhubungan

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Dinas Perhubungan, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas angkutan jalan, sungai dan penyeberangan serta rencana pelayanan sistem (jaringan) jalur perkeretaapian dan pengelolaannya, sarana prasarana kepelabuhan, keselamatan, pelayaran sungai dan laut, kebandarudaraan, pengendalian dan operasional transportasi umum baik keluar;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas angkutan jalan, sungai dan penyeberangan serta rencana pelayanan sistem (jaringan) jalur perkeretaapian dan pengelolaannya, sarana prasarana kepelabuhan, keselamatan, pelayaran sungai dan laut, kebandarudaraan, pengendalian dan operasional transportasi umum baik keluar;



- c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Lingkungan Dinas Perhubungan;
- d. Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan;
- e. Pengawasan dan pengendalian bidang perhubungan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan;
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

2) Sekretariat Dinas Perhubungan

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan dan pengelolaan barang milik daerah serta evaluasi dan pelaporan. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
- b. Pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- d. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepustakaan, dan layanan informasi dan pengaduan;
- f. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- g. Pengelolaan anggaran Dinas dan penerimaan Dinas / retribusi;
- h. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- i. Pelaksanaan verifikasi Surat pertanggungjawaban keuangan;
- j. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- k. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Estándar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- l. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat / pelanggan;



- m. Pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai tugas fungsi Dinas;
- n. Pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelolaan informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- o. Pengoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi/aplikasi yang digunakan oleh lintas bidang pada Dinas;
- p. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- q. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- r. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat membawahkan sub bagian yang dipimpin oleh kepala sub bagian dan bertanggungjawab langsung kepada sekretaris. Adapun Sekretariat membawahi :

1. Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinir pengumpulan bahan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja);
 - b. Menyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja);
 - c. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
 - d. Melaksanakan supervise, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas;
 - e. Mengumpulkan data lintas bidang sebagai bahan dokumen Dinas;
 - f. Mengkoordinir laporan bulanan pelaksanaan kegiatan Dinas;
 - g. Mengkoordinir penyusunan RKA/DPA/DPPA Dinas;
 - h. Menyusun laporan tahunan Dinas;
 - i. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - j. Mengumpulkan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - k. Membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - l. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
 - a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - b. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
 - c. Memeriksa/meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang–undangan yang berlaku;
 - d. Melaksanakan verifikasi SPP;
 - e. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan Dinas;
 - f. Melaksanakan penyiapan surat perintah membayar (SPM);
 - g. Melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan;
 - h. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
 - i. Menyusun neraca keuangan Dinas;
 - j. Mengkoordinir dan meneliti anggaran perubahan Dinas;
 - k. Menyusun laporan keuangan Dinas;
 - l. Membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - m. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, dan ketatausahaan;
 - c. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
 - d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
 - e. Menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
 - f. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
 - g. Melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang daerah dan aset daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas,



- h. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan Dinas;
- i. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- j. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian dan penempatan pegawai non struktural dan fungsional;
- k. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- l. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- m. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi pembantu melalui website maupun permintaan data langsung;
- n. Menyusun tatalaksana dan Standar Pelayanan penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
- o. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- p. Memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
- q. Membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- r. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- s. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3) Bidang Lalu Lintas Jalan

Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Lalu Lintas Jalan. Bidang Lalu Lintas Jalan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas Perhubungan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang lalu lintas, pengendalian dan ketertiban, dan perparkiran;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, pengendalian dan ketertiban, dan perparkiran;
- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, proses dan kriteria penyelenggaraan di bidang lalu lintas, pengendalian dan ketertiban, dan perparkiran;
- e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang di bidang lalu lintas, pengendalian dan ketertiban, dan perparkiran;



- f. Penyusunan penetapan rencana dan sasaran kebijakan pengembangan pelayanan sistem jaringan lalu lintas jalan raya dan pengelolaannya, pengendalian dan operasional;
- g. Penyiapan dan pelaksana koordinator Forum Lalu lintas.
- h. Penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan penetapan kinerja jalan;
- i. Pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota serta koordinator pelaksanaan lomba tertib lalu lintas.
- j. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kota;
- k. Pelaksanaan pungutan dan penyetoran retribusi berkaitan operasional parkir dan penderekan;
- l. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- m. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan keharmonisan pelaksanaan pedoman dan standarisasi pengembangan sistem jaringan jalan, rekomendasi, pemantauan, perizinan penyelenggaraan dan pengoperasian dampak pembangunan sesuai norma, standar dan prosedur manajemen rekayasa lalu lintas
- n. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang lalu lintas, pengendalian dan ketertiban, dan perparkiran;
- o. Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- p. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- q. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Lalu Lintas Jalan membawahkan seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab langsung pada kepala bidang. Adapun Bidang Lalu Lintas Jalan membawahi :

1. Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas :
 - a. Menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - b. Melaksanakan penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan raya kota;
 - c. Menyusun jaringan jalan kota yang disesuaikan dengan tatanan transportasi wilayah dan tatanan transportasi nasional;
 - d. Memberikan advis teknis rencana pembangunan fasilitas parkir untuk umum;
 - e. Memberikan advis lalu lintas sebagai syarat penerbitan IMB/SITU/SIUP terhadap rencana bangunan khusus;
 - f. Menyusun dan menetapkan kelas pada jaringan jalan wilayah kota serta penilaian kinerja jalan;
 - g. Menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan-jalan dalam



- wilayah kota;
- h. Melaksanakan dan mengoperasikan *Area Traffic Control System* (ATCS) serta pengaturan siklus dan waktu APILL;
 - i. Pelaksanaan koordinator Forum Lalulintas dan lomba tertib lalulintas.
 - j. Mengkaji dan menganalisa Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalulintas (ANDALALIN) melalui tim penilai sebagai dasar penerbitan persetujuan dokumen ANDALALIN;
 - k. Menyusun pertimbangan teknis analisis dampak lalu lintas;
 - l. Memberikan advis/pertimbangan teknis manajemen rekayasa dan pengendalian dampak lalulintas kepada Institusi Polri terkait permohonan ijin penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalulintas di jalan wilayah kota;
 - m. Menentukan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan wilayah kota;
 - n. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan;
 - o. Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - p. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - q. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Seksi Pengendalian dan Ketertiban mempunyai tugas :
- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - b. Merumuskan rencana pengendalian dan penertiban lalu lintas jalan (LLJ);
 - c. Melakukan pemeriksaan kendaraan di jalan yang berkaitan dengan kewenangan di bidang lalu lintas jalan;
 - d. Melakukan koordinasi dengan PPNS terhadap pelaksanaan penyidikan pelanggaran peraturan perundangan bidang lalu lintas jalan;
 - e. Pemeriksaan dokumen teknis laik jalan, pelanggaran ketentuan pengujian berkala dan perizinan angkutan umum;
 - f. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
 - g. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta menganalisa pelanggaran lalulintas jalan;
 - h. Melaksanakan pengaturan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalulintas di jalan raya dalam wilayah Daerah;



- i. Melakukan tugas-tugas pengawalan sesuai peraturan perundangan dalam rangka kelancaran dan ketertiban lalu lintas di jalan;
 - j. Melaksanakan pungutan dan penyetoran retribusi penderekan yang dilaksanakan mobil derek Dinas;
 - k. Melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi dengan instansi terkait yang menangani pengendalian dan ketertiban di jalan;
 - l. Melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi kegiatan pengendalian dan penertiban;
 - m. Membuat laporan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - n. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai bidang tugasnya.
3. Seksi Perparkiran mempunyai tugas :
- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - b. Merumuskan kebijakan penyelenggaraan dan operasional fasilitas parkir;
 - c. Menghimpun dan menganalisa data guna pengelolaan dan manajemen parkir;
 - d. Menetapkan kantong parkir dan ruas jalan yang dapat dijadikan tempat parkir;
 - e. Mengendalikan ruas jalan terhadap kegiatan parkir yang tidak pada tempatnya;
 - f. Melaksanakan pemrosesan pertimbangan teknis perizinan pengelolaan parkir;
 - g. Menerbitkan izin penyelenggaraan perparkiran;
 - h. Pengaturan fasilitas perparkiran;
 - i. Membina terhadap pihak penyelenggara parkir baik yang dikelola oleh instansi pemerintah maupun swasta;
 - j. Melaksanakan pembinaan, arahan dan penyuluhan terhadap juru parkir;
 - k. Menyediakan sistem data dan informasi perparkiran;
 - l. Penentuan besaran retribusi parkir dan memungut retribusi parkir dari pihak penyelenggara;
 - m. Menghitung data potensi dalam rangka penyusunan rencana target retribusi parkir;
 - n. Melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi kegiatan perparkiran;
 - o. Membuat laporan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;



- p. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- q. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai bidang tugasnya

4) Bidang Prasarana

Bidang Prasarana mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dalam memberikan pelayanan teknis prasarana dan fasilitas perhubungan. Bidang Prasarana dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas Perhubungan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Prasarana mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang prasarana dan fasilitas perhubungan serta lampu penerangan jalan umum meliputi prasarana jalan, sungai dan multimoda;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, proses dan kriteria penyelenggaraan di bidang prasarana serta lampu penerangan jalan umum dan fasilitas perhubungan meliputi prasarana jalan, sungai dan multimoda;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang prasarana dan fasilitas perhubungan serta lampu penerangan jalan umum meliputi prasarana jalan, sungai dan multimoda;
- e. Penyusunan penetapan rencana dan sasaran kebijakan pengembangan pelayanan teknis prasarana perhubungan serta lampu penerangan jalan umum dan pengelolaannya, pengendalian dan pemeliharaan sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku;
- f. Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan serta lampu penerangan jalan umum;
- g. Pengelolaan dan pemeliharaan terminal penumpang tipe C;
- h. Pelaksanaan pungutan retribusi berkaitan operasional terminal type C;
- i. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan keharmonisan pelaksanaan pedoman dan standarisasi pengembangan fasilitas dan prasarana, perekomendasi, pemantauan, perizinan penyelenggaraan dan pengoperasian prasarana perhubungan;



- j. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan operasional di bidang prasarana dan fasilitas perhubungan serta lampu penerangan jalan umum meliputi prasarana jalan, sungai dan multimoda;
- k. Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- l. Pelaksana sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- m. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bidang Prasarana membawahkan seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab langsung pada kepala bidang.

1. Seksi Prasarana Jalan mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang prasarana jalan dan lampu penerangan jalan umum;
- c. Melaksanakan kebijakan operasional di bidang prasarana jalan dan lampu penerangan jalan umum;
- d. Menetapkan lokasi terminal penumpang tipe c;
- e. Mengesahkan rancang bangun terminal penumpang tipe c;
- f. Melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan terminal tipe c;
- g. Melaksanakan pungutan dan penyetoran retribusi terminal tipe c;
- h. Melaksanakan kegiatan pengoperasian terminal angkutan barang;
- i. Menyusun perencanaan prasarana jalan dan perlengkapan jalan berupa halte, serta lampu penerangan jalan umum, alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu, marka jalan, alat penerangan jalan, pagar pengaman, cermin tikungan, tanda patok tikungan (*delineator*), pita penggaduh, dan alat pengendali pemakai jalan;
- j. Menetapkan titik lokasi fasilitas dan prasarana jalan dan perlengkapan jalan berupa halte, alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu, marka jalan, alat penerangan jalan, pagar pengaman, cermin tikungan, tanda patok tikungan (*delineator*), pita penggaduh, dan alat pengendali pemakai jalan serta lampu penerangan jalan umum;
- k. Melaksanakan pembangunan dan pemasangan baru fasilitas dan prasarana jalan dan perlengkapan jalan berupa halte, alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu, marka jalan, alat penerangan jalan, pagar pengaman, cermin tikungan,



tanda patok tikungan (*delineator*), pita pengaduh, dan alat pengendali pemakai jalan serta lampu penerangan jalan umum;

- l. Menyelenggarakan pemeliharaan fasilitas dan prasarana jalan dan perlengkapan jalan berupa terminal, halte, alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu, marka jalan, alat penerangan jalan, pagar pengaman, cermin tikungan, tanda patok tikungan (*delineator*), pita pengaduh, dan alat pengendali pemakai jalan serta lampu penerangan jalan umum;
 - m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai dengan bidang tugasnya;
 - n. Membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - o. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - p. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai bidang tugasnya.
2. Seksi Prasarana Sungai mempunyai tugas:
- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang Prasarana Sungai;
 - c. Melaksanakan kebijakan operasional di Prasarana Sungai;
 - d. Melaksanakan penyiapan penetapan kebijakan tatanan pelabuhan dan dermaga;
 - e. Melaksanakan penyiapan pengelolaan pelabuhan/dermaga;
 - f. Melaksanakan kegiatan pengembangan, pembangunan, pemeliharaan fasilitas dan peralatan pelabuhan dan dermaga yang dikelola oleh dinas;
 - g. Melaksanakan kegiatan pembersihan alur pelayaran angkutan sungai;
 - h. Melaksanakan kegiatan pengerukan pada kolam pelabuhan dan dermaga sungai;
 - i. Melaksanakan pengawasan dan penertiban pada area logpond, keramba dan usaha perhubungan yang mengganggu alur pelayaran;
 - j. Memberikan rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum sungai;
 - k. Memberikan rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus sungai;
 - l. Menetapkan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan sungai;
 - m. Melaksanakan pemberian izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus sungai;
 - n. Menetapkan izin terminal khusus sungai yang dikelola oleh swasta;



- o. Memberikan rekomendasi rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan sungai yang terletak pada jaringan kota;
 - p. Melaksanakan pemeliharaan, pengadaan dan pemasangan rambu sungai, dermaga, navigasi alur pelayaran dan prasarana lainnya;
 - q. Memberikan izin logpond;
 - r. Memberikan izin usaha pemeliharaan dan perawatan kapal di perairan sungai;
 - s. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai dengan bidang tugasnya;
 - t. Membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - u. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - v. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai bidang tugasnya.
3. Seksi Prasarana Multimoda mempunyai tugas :
- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang prasarana multimoda;
 - c. Menetapkan rencana induk perkeretaapian wilayah kota;
 - d. Menerbitkan izin usaha, izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah;
 - e. Menetapkan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) daerah kota;
 - f. Menetapkan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kota;
 - g. Menerbitkan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) daerah kota;
 - h. Menetapkan jaringan pelayanan perkeretaapian kota;
 - i. Menetapkan rencana induk jalur sepeda dan pejalan kaki, aksesibilitas orang cacat wilayah kota;
 - j. Menetapkan rencana jangka pendek, menengah dan panjang jalur sepeda dan pejalan kaki, aksesibilitas orang cacat dalam wilayah kota;
 - k. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana serta fasilitas yang berhubungan dengan sepeda dan pejalan kaki, aksesibilitas orang cacat dalam wilayah kota;
 - l. Menyiapkan perumusan, perencanaan dan penetapan aksesibilitas ke pelabuhan laut dan terminal;



- m. Menetapkan rencana jangka pendek, menengah dan panjang jalur aksesibilitas ke pelabuhan laut dan terminal;
- n. Memberikan advis teknis penetapan lokasi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri kapal type laut yang beroperasi di perairan sungai;
- o. menerbitkan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
- p. Mengumpulkan dan melaporkan kegiatan operasional pelabuhan laut dan terminal;
- q. Mengumpulkan dan melaporkan kegiatan operasional bandar udara;
- r. Menyusun bahan dan pelaksanaan promosi serta pengembangan usaha di bidang perkeretaapian, sepeda, pejalan kaki dan moda lainnya;
- s. Menyusun bahan dan pelaksanaan promosi serta pengembangan prasarana yang akan dibangun oleh pihak swasta;
- t. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai dengan bidang tugasnya;
- u. Membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- v. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- w. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai bidang tugasnya.

5) Bidang Keselamatan

Bidang Keselamatan mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dalam memberikan pelayanan teknis keselamatan terhadap jasa/pelayanan perhubungan. Bidang Keselamatan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas Perhubungan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Keselamatan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang keselamatan perhubungan meliputi keselamatan jalan, pelayaran dan pengujian kendaraan bermotor;
- c. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan norma, standar, proses dan kriteria penyelenggaraan di bidang keselamatan perhubungan meliputi keselamatan jalan, pelayaran dan pengujian kendaraan bermotor;



- d. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang prasarana dan fasilitas perhubungan meliputi prasarana jalan, sungai dan multimoda;
- e. Penyusunan penetapan rencana dan sasaran kebijakan pengembangan pelayanan teknis keselamatan perhubungan dan pengelolaannya, pengendalian dan pemeliharaan;
- f. Penyiapan dan pelaksanaan kegiatan Dewan Maritim Kota;
- g. Pelaksanaan penyusunan program audit, investigasi terhadap keselamatan perhubungan, pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pengujian kendaraan bermotor dan pengukuran dan pengujian kelaikan kapal – kapal;
- h. Pelaksanaan pungutan retribusi berkaitan pengujian kendaraan bermotor dan pengukuran dan pengujian kelaikan kapal – kapal;
- i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan operasional di bidang keselamatan perhubungan meliputi keselamatan jalan, pelayaran dan pengujian kendaraan bermotor;
- j. Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- k. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- l. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bidang Keselamatan membawahkan seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab langsung pada kepala bidang. Adapun Bidang Keselamatan membawahi :

1. Seksi Keselamatan Jalan mempunyai tugas:
 - a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang keselamatan jalan;
 - c. Melaksanakan kebijakan operasional di bidang keselamatan jalan;
 - d. Menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan dalam kota;
 - e. Melaksanakan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan / atau yang menjadi isu kota;
 - f. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kota;



- g. Melaksanakan audit terhadap ruas jalan, persimpangan dan seluruh hal yang berkaitan dengan pencegahan kecelakaan lalu lintas di jalan dalam kota;
 - h. Melaksanakan inspeksi keselamatan di jalan dalam kota;
 - i. Menentukan lokasi letak rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, halte dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan raya berkaitan dengan keselamatan jalan dalam wilayah kota;
 - j. Memberikan rekomendasi izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor;
 - k. Memberikan rekomendasi izin usaha mendirikan pendidikan dan pelatihan mengemudi;
 - l. Melaksanakan penyuluhan lalu lintas terhadap seluruh pengguna jalan dalam kota;
 - m. Melaksanakan kegiatan pemilihan sopir teladan, pelajar tertib lalu lintas;
 - n. Melaksanakan sosialisasi keselamatan jalan melalui promosi dan kerjasama pihak ketiga/swasta;
 - o. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai dengan bidang tugasnya;
 - p. Membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - q. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - r. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai bidang tugasnya.
2. Seksi Keselamatan Pelayaran mempunyai tugas:
- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang keselamatan pelayaran;
 - c. Melaksanakan perencanaan dan koordinasi kegiatan operasional sarana sungai;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian untuk menunjang keselamatan kapal, lalu lintas sungai dan pelayaran;
 - e. Melaksanakan penertiban dan pemeriksaan dokumen kapal;
 - f. Melaksanakan pengukuran kapal sungai;
 - g. Melaksanakan registrasi kapal sungai;
 - h. Melaksanakan pemberian sertifikat kelaikan kapal sungai;



- i. Melaksanakan pemeriksaan konstruksi kapal dan perlengkapannya serta pemberian Surat Tanda Kecakapan (STK) Nakhoda, Kepala Kamar Mesin (KKM) dan Nakhoda/Motoris (NM);
 - j. Merencanakan kapal kerja perhubungan;
 - k. Pemberian penilaian teknis kondisi kapal;
 - l. Menyusun tata cara berlalulintas di perairan sungai;
 - m. Melaksanakan kegiatan Dewan Maritim Kota;
 - n. Menyusun database sarana kapal-kapal sungai;
 - o. Melaksanakan pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB), penerbitan pas perairan daratan;
 - p. Melaksanakan pemeriksaan permesinan kapal sungai Melakukan penyetoran hasil pemungutan retribusi ke kas daerah;
 - q. Melakukan pungutan retribusi terhadap pengujian kendaraan bermotor di atas air yang berkaitan dengan kelaikan kapal;
 - r. Menerbitkan Surat Keterangan Radio Kapal Sungai;
 - s. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi keselamatan pelayaran;
 - t. Melaksanakan audit dan inspeksi terhadap keselamatan pelayaran dan kecelakaan kapal;
 - u. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai dengan bidang tugasnya;
 - v. Membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - w. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - x. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai bidang tugasnya.
3. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas :
- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang pengujian kendaraan bermotor;
 - c. Menetapkan rencana kerja Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - d. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengujian kendaraan bermotor;
 - e. Melakukan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengujian kendaraan bermotor;



- f. Melakukan pendaftaran dan pengujian kendaraan bermotor;
- g. Melakukan pemugutan retribusi dan administrasi pengujian kendaraan bermotor;
- h. Melakukan pemberian penilaian teknis kondisi kendaraan;
- i. Melakukan penyetoran hasil pemungutan retribusi ke kas daerah;
- j. Melakukan evaluasi dan inovasi terhadap pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
- k. Melakukan pembinaan pengelolaan ketatausahaan pengujian kendaraan bermotor;
- l. Menginvestasi permasalahan yang berhubungan dengan pengujian kendaraan bermotor serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai dengan bidang tugasnya;
- n. Membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- o. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- p. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai bidang tugasnya.

6) Bidang Angkutan

Bidang Angkutan mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dalam melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian bidang angkutan. Bidang Angkutan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas Perhubungan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Angkutan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang angkutan meliputi angkutan jalan, angkutan dan dermaga sungai dan angkutan khusus;
- c. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data perumusan angkutan;
- d. Pelaksanaan kegiatan perumusan angkutan;
- e. Pelaksanaan pungutan retribusi berkaitan trayek dan operasional dermaga;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait perumusan angkutan;



- g. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data perumusan pemadu moda;
- h. Pelaksanaa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan operasional di bidang keselamatan perhubungan meliputi keselamatan jalan, pelayaran dan pengujian kendaraan bermotor;
- i. Pembuatan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bidang Angkutan membawahkan seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab langsung pada kepala bidang. Adapun Bidang Angkutan membawahi :

1. Seksi Angkutan Jalan mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang angkutan jalan;
- c. Menetapkan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan orang perkotaan;
- d. Menyusun jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan umum yang wilayah pelayanannya dalam wilayah kota;
- e. Memberikan izin trayek angkutan kota;
- f. Menetapkan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam kota;
- g. Memberikan izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah kota;
- h. Memberikan rekomendasi operasi angkutan sewa/rental;
- i. Memberikan izin usaha angkutan pariwisata;
- j. Menetapkan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan kota;
- k. Memberikan kartu pengawasan izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam wilayah kota;
- l. Menyusun database angkutan jalan dalam kota;
- m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan operasional dan kondisi fisik angkutan jalan dalam kota;
- n. Menyediakan angkutan umum dan pemadu moda;
- o. Mengelola data dan informasi di bidang angkutan jalan;



- p. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai dengan bidang tugasnya;
 - q. Membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - r. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - s. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai bidang tugasnya.
2. Seksi Angkutan dan Dermaga Sungai mempunyai tugas:
- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang angkutan dan dermaga sungai;
 - c. Menyusun jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kapal untuk kebutuhan angkutan umum yang wilayah pelayanannya dalam wilayah kota;
 - d. Memberikan izin trayek kapal angkutan kota;
 - e. Melaksanakan penertiban ijin trayek kapal dalam wilayah kota;
 - f. Memberikan izin usaha angkutan sungai;
 - g. Menetapkan lintasan penyeberangan dalam wilayah kota;
 - h. Menetapkan tarif ekonomi kapal angkutan kota;
 - i. Melaksanakan pengoperasian dermaga;
 - j. Menetapkan Sistem Operasional Prosedur Dermaga;
 - k. Menetapkan tarif jasa pelabuhan, pungutan sera penyetoran retribusi dermaga;
 - l. Membuat laporan kepadatan bongkar muat penumpang dan atau barang di dermaga;
 - m. Melaksanakan penertiban dan pengawasan terhadap kapal – kapal angkutan terhadap dokumen kapal;
 - n. Menerbitkan manifest dan pas pemberangkatan kapal;
 - o. Melaksanakan pemberangkatan kapal di dermaga sungai;
 - p. Mengelola data dan informasi di bidang angkutan sungai;
 - q. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai dengan bidang tugasnya;
 - r. Membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - s. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - t. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai bidang tugasnya.



3. Seksi Angkutan Khusus mempunyai tugas :
- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang angkutan khusus;
 - c. Menerbitkan izin usaha angkutan barang, angkutan BBM, Angkutan Barang Berbahaya dan Limbah, Angkutan alat berat dan angkutan hewan serta angkutan khusus lainnya;
 - d. Menetapkan jaringan lintas angkutan barang dan angkutan khusus lainnya;
 - e. Menetapkan standar pelayanan angkutan khusus yang beroperasi dalam wilayah kota;
 - f. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi tata cara berlalu lintas kepada pengemudi angkutan khusus dalam wilayah kota;
 - g. Menetapkan tata cara pemuatan angkutan khusus yang membawa muatan dalam operasi kota;
 - h. Mengolah data dan informasi sesuai lingkup tugasnya di bidang angkutan khusus;
 - i. Memonitoring dan evaluasi serta pelaporan operasional angkutan khusus;
 - j. Melaksanakan pemantauan terhadap angkutan khusus yang masuk dalam wilayah kota dengan membuat dan menyusun laporan;
 - k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai dengan bidang tugasnya;
 - l. Membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - m. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2.3 Sumber Daya Dinas Perhubungan

Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Samarinda terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti peralatan / perlengkapan / aset.

2.3.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan, khususnya Sumber Daya Aparatur yang merupakan mesin penggerak berjalannya roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Komposisi pegawai Dinas Perhubungan Kota Samarinda adalah sebagai berikut :



Tabel 2.1 Jabatan Struktural dan Fungsional Tahun 2011-2016

NO	Jabatan	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Eselon II	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
2	Eselon III	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0
3	Eselon IV	21	3	21	3	21	3	21	3	21	3	21	3
Jumlah		27	3	27	3	27	3	27	3	27	3	27	3
Total		30		30		30		30		30		30	

Sumber : Database Sub Bagian Umum Dishub Kota Samarinda, Tahun 2016

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2012-2016

NO	Kualifikasi Pendidikan	Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Sekolah Dasar (SD)	4	0	5	0	5	0	6	0	3	0
2	SMP	10	0	8	0	8	0	2	0	3	0
3	SMA / SMK	96	26	91	24	88	23	105	18	90	19
4	Sarjana Muda (D-III)	5	2	5	2	5	2	5	0	9	1
5	Sarjana (S1/D-IV)	29	9	28	12	25	9	27	15	26	12
6	Pasca Sarjana (S2)	10	0	11	0	11	0	12	0	19	0
Jumlah		154	37	148	38	142	34	157	33	145	32
Total		191		186		176		190		177	

Sumber : Database Sub Bagian Umum Dishub Kota Samarinda, Tahun 2016

Tabel 2.3 Pegawai Tidak Tetap Harian / Pegawai Tidak Tetap Bulanan Tahun 2014-2016

NO	Kualifikasi Pendidikan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
		L	P	L	P	L	P
1	Sekolah Dasar (SD)	71	6	65	5	67	3
2	SMP	23	1	0	2	18	2
3	SMA / SMK	127	17	144	18	196	17
4	Sarjana Muda (D-III)	6	1	12	0	12	2
5	Sarjana (S1/D-IV)	21	10	37	12	49	16
Jumlah		248	35	258	37	342	40
Total		283		295		382	

Sumber : Database Sub Bagian Umum Dishub Kota Samarinda, Tahun 2016



Tabel 2.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2011 - 2016

No	Pangkat dan Golongan		Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	I/a	Juru Muda	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0
2	I/b	Juru Muda Tk. I	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
3	I/c	Juru	2	0	1	0	0	0	0	0	3	0	3	0
4	I/d	Juru Tk. I	1	0	2	0	3	0	3	0	2	0	0	0
5	II/a	Pengatur Muda	44	13	17	8	11	3	11	3	25	3	26	3
6	II/b	Pengatur Muda Tk. I	22	4	44	10	48	10	46	10	42	9	18	3
7	II/c	Pengatur	10	0	8	1	9	0	9	0	12	1	39	6
8	II/d	Pengatur Tk. I	12	2	11	2	8	1	8	1	7	0	8	0
9	III/a	Penata Muda	20	5	11	5	9	7	9	7	9	6	10	2
10	III/b	Penata Muda Tk. I	34	9	32	8	27	10	21	8	33	8	22	8
11	III/c	Penata	11	1	8	0	7	2	7	2	5	3	7	4
12	III/d	Penata Tk. I	11	2	13	3	11	13	11	13	10	3	7	3
13	IV/a	Pembina	4	1	5	0	5	0	5	0	5	0	4	0
14	IV/b	Pembina Tk. I	2	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
15	IV/c	Pembina Utama Muda	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
16	IV/d	Pembina Utama Madya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah			175	37	154	37	140	46	132	44	157	33	148	29
TOTAL			212		191		186		176		190		177	

Sumber : Database Sub Bagian Umum Dishub Kota Samarinda, Tahun 2016



Tabel 2.5 Berdasarkan Penempatan Tahun 2014 - 2016

No	Pangkat dan Golongan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
		L	P	L	P	L	P
1	Kadis Perhubungan	1	0	1	0	1	0
2	Sekretaris	1	0	1	0	1	0
a	Sub. Bagian Perencanaan	3	6	1	4	1	4
b	Sub. Bagian Umum	5	6	13	7	11	1
c	Sub. Bagian Keuangan	3	5	4	5	4	3
3	Kepala Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	1	0	1	0	1	0
a	Seksi Lalu Lintas	3	1	3	1	4	0
b	Seksi Angkutan	4	2	6	2	5	2
c	Seksi Teknik Sarana Dan Prasarana	8	3	10	2	8	1
4	Kepala Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Sungai	1	0	1	0	1	0
	Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai	1	2	1	2	1	1
	Seksi Prasarana	3	1	3	1	2	1
	Seksi Keselamatan Pelayaran	3	1	3	1	3	1
5	Kepala Bidang Perhubungan Laut Dan Udara	1	0	1	0	1	0
	Seksi Prasana Laut Dan Kebandarudaraan	3	0	3	0	1	0
	Seksi Pengaturan Perairan Dan Tata Kebandarudaraan	1	0	1	0	1	1
6	Kepala Bidang Pengendalian Dan Operasional	1	0	1	0	1	0
	Seksi Pengendalian Dan Operasional LLAJ	24	0	24	0	19	0
	Seksi Pengendalian Dan Operasional LLDS	6	0	6	0	6	0
	Seksi Pengawasan Fasilitas Perhubungan	5	1	5	1	3	1
II	UPTD PKB	19	3	19	3	18	1
II	UPTD Pengelolaan Terminal	25	4	25	4	27	6
IV	UPTD Penglolaan Parkir	9	3	9	3	11	3
V	UPTD Pengelolaan Pelabuhan Dan Dermaga	19	4	19	4	14	3
VI	UPTD Pengelolaan Bandara	2	1	2	1	3	0
	Jumlah	148	33	159	33	148	29
	Total	181		192		177	

Sumber : Database Sub Bagian Umum Dishub Kota Samarinda, Tahun 2016

2.3.2 Sumber Daya Lainnya

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perhubungan Kota Samarinda. menempati Kantor Wilayah Koperasi Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2001, selain prasarana Kantor juga dilengkapi sumber daya lainnya seperti peralatan, perlengkapan baik berupa aset bergerak maupun tidak bergerak, Sarana dan prasarana tersebut dalam kondisi baik dan kurang baik.



Tabel 2.6 Aset Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun Per 31 Desember 2013 - 2015

No	Nama Barang (Berdasarkan Bidang Barang)	Keadaan Per 31 Des 2013		Keadaan Per 31 Des 2014		Keadaan Per 31 Des 2015
		Jumlah	Harga (Ribuan)	Jumlah	Harga (ribuan)	Harga (ribuan)
1	Tanah	14	119.810.549.004,00	14	119.810.549.004,00	144.292.469.000,00
2	Alat-alat besar	1	969.700.000,00	2	3.721.124.600,00	3.721.124.600,00
3	Alat-alat Angkutan	63	6.921.489.210,00	64	6.931.356.210,00	7.340.032.010,00
4	Alat-alat Bengkel dan Alat ukur	30	4.816.777.900,00	30	4.816.777.900,00	4.830.747.900,00
5	Alat kantor dan rumah tangga	678	7.866.063.218,00	706	9.146.471.618,00	10.239.008.118,00
6	Alat studio dan alat komunikasi	279	1.048.062.379,00	292	2.034.056.879,00	1.875.871.240,00
7	Alat-alat kedokteran	1	5.979.000,00	1	5.979.000,00	45.879.000,00
8	Alat Laboratorium	86	1.332.508.550,00	86	1332.508.550,00	901.754.550,00
9	Bangunan Gedung	31	28.015.864.000,00	58	32.116.734.000,00	36.666.231.000,00
10	Monumen	0	0	1	287.614.000,00	1.125.139.000,00



No	Nama Barang (Berdasarkan Bidang Barang)	Keadaan Per 31 Des 2013		Keadaan Per 31 Des 2014		Keadaan Per 31 Des 2015
		Jumlah	Harga (Ribuan)	Jumlah	Harga (ribuan)	Harga (ribuan)
11	Jalan dan Jembatan	22	23.057.841.550,00	22	23.057.841.550,00	23.057.841.550,00
12	Bangunan Air/Irigasi	0	0	0	0	44.825.000,00
13	Instalasi	12	6.871.898.450,00	12	6.871.898.450,00	6.871.898.450,00
14	Hewan dan Ternak Serta Tanaman	8	418.302.000,00	8	418.302.000,00	418.302.000,00
15	Aset Kondisi Rusak Berat	0	0	0	0	1.391.675.439,00
16	Aset Tidak Berwujud	0	0	0	0	577.705.400,00
17	Konstruksi dalam pengerjaan	18	129.565.010.598,00	18	129.565.010.598,00	0
	Jumlah	1.243	330.700.045.859,00	1.314	340.16.224.359,00	380.996.134.016,00

Sumber : Database Sub Bagian Umum Dishub Kota Samarinda, Tahun 2016



Tabel 2.7

Data Sarana Operasional Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2013 - 2016

Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Keterangan
Mobil Operasional	9	9	10	10	Kondisi Baik
Mobil Derek	2	3	3	3	Kondisi Baik
Mobil Uji Keliling	1	1	1	1	Kondisi Baik
Mobil APILL	1	2	2	2	Kondisi Baik
Mobil Dinas	10	10	12	13	Kondisi Baik
Sepeda Motor Operasional	14	14	16	16	Kondisi Baik
Sepeda Motor Dinas	31	31	31	31	Kondisi Baik
Jumlah	68	70	75	76	Unit

Sumber : Database Sub Bagian Umum Dishub Kota Samarinda, Tahun 2016

2.3.3 Keadaan Umum Wilayah

Tabel 2.8

Panjang Jaringan Jalan Menurut Kondisi Jalan Kota Samarinda Tahun 2009 - 2014

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km)					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Kondisi Baik	327,09	420,64	430,00	450,50	351,89	159,63
2	Kondisi Sedang	199,34	114,39	102,90	81,25	444,79	247,34
3	Kondisi Rusak	9,90	144,55	180,60	184,15	74,55	152,07
4	Jalan Secara Keseluruhan (nasional, provinsi, dan kota)	704,62	847,78	880,61	883,99	871,34	651,342

Sumber : Dinas Bina Marga dan Pengairan, Tahun 2015

Berdasarkan tabel 2.8, terlihat bahwa dari tahun 2009 hingga 2012, panjang jalan keseluruhan Nasional, Provinsi, dan Kota mengalami peningkatan panjang jalan hingga mencapai 883,99 km pada tahun 2012. Namun pada tahun-tahun berikutnya, panjang jalan menurun hingga mencapai 721,34 km pada tahun 2014.

Hal yang perlu dicermati lebih lanjut berkenaan dengan data diatas adalah adanya kecenderungan peningkatan jumlah jalan dengan kondisi rusak dan penurunan jumlah jalan dengan kondisi jalan baik. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya atau tidak ada pemeliharaan jalan yang baik, sehingga kondisi jalan yang sebelumnya baik dapat menjadi rusak dan sedang.



Panjang jalan secara keseluruhan berdasarkan kewenangan jalan yang dibagi menjadi tiga jenis yaitu, Jalan Nasional, Jalan Provinsi, dan Jalan Kota. Dilihat dari tabel 2.9, jalan Nasional mengalami kenaikan pada tahun 2014 yaitu 54,740 km sedangkan di tahun 2013 sebesar 43,00 km.

Tabel 2.9
Panjang Jalan di Kota Samarinda berdasarkan Kewenangan Jalan Tahun 2011 - 2014

No	Jenis Jalan	Panjang (km)			
		2011	2012	2013	2014
1	Jalan Nasional	52,38	53,36	43,00	54,740
2	Jalan Provinsi	114,73	114,73	114,73	3,100
3	Jalan Kota	713,50	715,90	713,50	593,502
Jumlah		880,63	883,99	871,23	651,342

Sumber : Dinas Bina Marga dan Pengairan, Tahun 2015

1. Kondisi Angkutan Jalan dan Terminal

Fasilitas lalu lintas berupa simpul lalu lintas dalam bentuk Sub Terminal pelayanan angkutan umum dalam kota adalah :

1. Sub Terminal Pasar Pagi
2. Sub Terminal Pasar Segiri
3. Sub Terminal Sambutan
4. Sub Terminal Pal Lima Suryanata

Tabel 2.10 Data Pengelolaan Terminal Tahun 2013-2015

Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Keterangan
Data Pengelolaan Terminal	4	4	4	Type Terminal Kelas C
				Jumlah Penumpang
	21.325	23.426	27.575	Tiba
	40.121	43.440	46.958	Berangkat
	1	1	1	Terminal Angkutan Barang (belum di Operasikan)

Sumber : Database UPT. Terminal Dishub Kota Samarinda, Tahun 2015



Tabel 2.11 Jumlah Angkutan yang melayani Kota Samarinda Tahun 2016

No	JENIS PELAYANAN	JUMLAH KENDARAAN
1	Angkot dalam Kota	1524 Kendaraan / 19 Trayek
2	Taxi Argometer dalam Kota	42 Kendaraan
3	Angkutan Pelajar	- Kendaraan
4	Angkutan Barang	117 Perusahaan 651 Kendaraan
Total		2.561 Kendaraan berdasarkan domisili

Sumber : Database Seksi Angkutan Bidang LLAJ, Tahun 2016

Tabel 2.12 Jumlah Penumpang yang terlayani oleh Angkutan Umum Tahun 2010-2015

Data	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Load Factor (LF)	4.113.736	4.113.736	4.113.736	4.113.736	4.113.736	4.113.736
Jumlah orang yang melalui Terminal	1.582.328	1.183.544	983.628	857.432	733.058	663.812
Total	5.696.064	5.297.280	5.097.364	4.971.168	4.846.794	4.777.548

Sumber : Database Seksi Angkutan Bidang LLAJ, Tahun 2015

2. Kondisi Sungai

Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu (sumber) menuju hilir (muara). Sungai Mahakam merupakan nama sebuah sungai terbesar di provinsi Kalimantan Timur yang bermuara di Selat Makassar. Sungai dengan panjang sekitar 920 km ini melintasi wilayah Kabupaten Kutai Barat di bagian hulu, hingga Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda di bagian hilir. Sungai Mahakam sejak dulu hingga saat ini memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat di sekitarnya sebagai sumber air, potensi perikanan maupun sebagai prasarana transportasi. Panjang sungai Mahakam yang berada di wilayah Pemerintah Kota Samarinda 34 Kilometer. Mulai dari batas Loa Janan sampai Palaran Sungai Meriam dengan lebar sungai berkisar 300-500 meter serta kedalaman berkisar 30 meter.

3. Kondisi Dermaga di Kota Samarinda

Dermaga adalah tempat kapal ditambatkan di pelabuhan. Pada dermaga dilakukan berbagai kegiatan bongkar muat barang dan orang dari dan ke atas kapal. Dermaga yang ada di wilayah Pemerintah Kota Samarinda sebanyak 5 (lima) unit terdiri dari :

1. Dermaga Mahakam Hilir
2. Dermaga Mahakam Hulu



3. Dermaga Samarinda Seberang
4. Dermaga Harapan Baru
5. Dermaga Loa Janan

Dermaga tersebut berpotensi melayani angkutan antar daerah dan dalam wilayah Kota Samarinda, serta dapat menjadi sumber PAD terutama untuk retribusi tambat, parkir dan retribusi masuk. Untuk jumlah kapal dan jenis operasi dapat dilihat pada tabel 2.13 dan tabel 2.14 berikut :

Tabel 2.13 Jumlah Kapal dan Jenis operasi Tahun 2016

Jenis Kapal Beroperasi	Tujuan	Jumlah Kapal
Kapal Muatan	Samarinda – Muara Wahau	9 Kapal
	Samarinda – Long Iram	5 Kapal
	Samarinda – Melak	8 Kapal
	Samarinda – Long Tesak	4 Kapal
	Samarinda – Long Bagun	15 Kapal
	Samarinda – Long Tabang	23 Kapal
	Samarinda – Damai	3 Kapal
Kapal Barang	Luar dan Dalam Kota Samarinda	40 Kapal
Total		107 Kapal

Sumber : Database Bidang LLAS Dishub Kota Samarinda, Tahun 2016

Tabel 2.14 Data Bongkar atau Muat Dermaga Tahun 2013 - 2016

Uraian	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		KET
	Tiba	Berangkat	Tiba	Berangkat	Tiba	Berangkat	Tiba	Berangkat	
Bongkar Muat Penumpang dan Barang	42.922	42.870	8.377	7.362	37.516	37.487	105.740	130.096	Orang
	9.244	13.056	3.530	1.714	7.234	14.160	18.485	25.600	Barang
	1.719	5.369	417	180	1.583	3.360	848	1.397	Sepeda Motor
Jumlah	53.885	61.295	12.324	9.256	46.333	55.007	125.073	157.093	Unit

Sumber : Database Sub Bagian Umum Dishub Kota Samarinda, Tahun 2015



4. Penggunaan Fasilitas Alur Pelayaran

Alur pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari oleh kapal di laut, sungai atau danau. Alur pelayaran digunakan untuk mengarahkan kapal masuk ke pelabuhan, oleh karena itu harus melalui suatu perairan yang tenang terhadap gelombang dan arus yang tidak terlalu kuat. Penguasa pelabuhan berkewajiban untuk melakukan perawatan terhadap alur pelayaran, perambuan dan pengendalian penggunaan alur. Persyaratan perawatan harus menjamin: keselamatan berlayar, kelestarian lingkungan, tata ruang perairan dan tata pengairan untuk pekerjaan di sungai.

Pada umumnya fasilitas alur pelayaran angkutan sungai selama ini dimanfaatkan untuk penimbunan kayu (*log pond*), jaring keramba dan doking kapal. Selain berfungsi sebagai fasilitas alur pelayaran, juga merupakan potensi dalam hal perijinan dokumen kapal sungai, yaitu :

1. Retribusi ijin usaha angkutan sungai
2. Sertifikat kesempurnaan kapal
3. Surat tanda pendaftaran kapal
4. Surat tanda kecakapan
5. Ijin trayek
6. Ijin penimbunan log pond dan perpanjangan ijin penimbunan kayu
7. Ijin pembuatan/perpanjangan pemakaian dermaga sungai
8. Ijin pemakaian fasilitas dermaga untuk pertokoan, pergudangan dan perikanan.

5. Fasilitas Pejalan Kaki

Fasilitas Pejalan kaki untuk menyeberang jalan dalam bentuk jembatan penyeberangan terdapat 4 (empat) titik lokasi sebagaimana tergambar dalam tabel 2.15 berikut ini :

Tabel 2.15 Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)

No	Lokasi	Volume	Kondisi
1	Jl. Ir. H. Juanda	1	Baik
2	Jl. Letd. S. Parman	1	Baik
3	Jl. Gajah Mada	1	Baik
4	Jl. Slamet Riyadi	1	Baik
Jumlah		4	Baik

Sumber : Database Seksi Lalu lintas Bidang LLAJ, Tahun 2016



Salah satu fasilitas pejalan kaki yang tidak kalah penting adalah Zona Selamat Sekolah (ZOSS). ZOSS merupakan hasil kebijakan yang dibuat dengan tujuan untuk mengurangi potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas dalam suatu ruas jalan area sekolah yang memiliki lalu lintas pejalan kaki anak sekolah yang cukup tinggi. Sekolah sebagaimana dimaksud adalah PAUD, TK, SD / MI, SMP / MTS dan SMA / SMK / MA. Logikanya, anak-anak pada tingkat sekolah tersebut masih belum bisa dikategorikan mandiri secara 100% maka dengan adanya ZOSS melindungi mereka ketika ingin menyeberang jalan menuju sekolah dan sebaliknya.

ZOSS dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan yang terdiri dari :

1. Marka jalan; terbagi menjadi beberapa warna yakni :
2. Marka berwarna putih;
3. Marka berwarna kuning; dan
4. Marka berwarna merah;
5. Rambu lalu lintas.

Penerapan ZOSS merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap ketertiban lalu lintas dan pendidikan. Melalui adanya ZOSS akan mengurangi kecelakaan yang sering terjadi di saat jam berangkat ke sekolah dan pulang ke sekolah. Harapan pemerintah dengan adanya ZOSS ini agar para pengguna jalan mengurangi kecepatan kendaraan saat melewati area ZOSS tersebut. Fenomena yang sering terjadi para pengguna jalan masih ada yang sering melanggar seperti melewati ruas jalan di sebelahnya agar tidak melewati pita penghadang di area ZOSS. Untuk di Kota Samarinda penerapan ZOSS masih sangat kurang dikarenakan kondisi keuangan Pemerintah Kota Samarinda yang mengalami defisit anggaran, dari tahun 2010 sampai dengan 2016 usulan dari Dinas Perhubungan mengenai ZOSS dapat diakomodir pada tahun 2014 dan berjumlah 3 (tiga) titik di jalan Kota Samarinda data ini bersumber dari database Seksi Lalu lintas Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

6. Kemacetan di Kota Samarinda

Kemacetan adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Kemacetan banyak terjadi di kota-kota besar, terutamanya yang tidak mempunyai transportasi publik yang baik atau memadai ataupun juga tidak seimbangya kebutuhan jalan dengan kepadatan penduduk, adapun titik kemacetan di Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel 2.16 berikut :



Tabel 2.16 Titik Kemacetan Kota Samarinda

No	Kemacetan Pada Ruas Jalan
1.	Jalan Sudirman II (Pasar Pagi)
2.	Jalan Gajah Mada
3.	Jalan Otto Iskandardinata (Pasar)
4.	Jalan Cipto Mangunkusumo (Pasar Loajanan)
5.	Jalan A. Khalid
6.	Jalan Panglima Batur
7.	Jalan Batuah (Pasar Kedondong)
8.	Jalan Abul Hasan
9.	Jalan Jembatan Mahakam
10.	Jalan Slamet Riyadi
Antrian Panjang Pada Simpangan	
1.	Simpangan Air Putih
2.	Simpangan Air Hitam
3.	Simpangan Sempaja
4.	Simpangan Sungai Dama
Kemacetan Akibat Banjir	
1.	Simpangan Mall Lembuswana
2.	Jalan Suryanata
3.	Jalan Antasari
4.	Jalan Pasundan
5.	Jalan Wahid Hasyim I
6.	Jalan Wahid Hasyim II
7.	Jalan D.I. Panjaitan

Sumber : Database Seksi Lalu lintas Bidang LLAJ Dishub Kota Samarinda, Tahun 2016

Kemacetan lalu lintas dapat disebabkan adanya antrian panjang pada simpangan, kecelakaan, banjir, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap rambu lalu lintas dan kebakaran. Langkah yang penting dalam memecahkan kemacetan adalah dengan meningkatkan kapasitas jalan/parasarana seperti:

1. Memperlebar jalan, menambah lajur lalu lintas sepanjang hal itu memungkinkan,
2. Mengubah sirkulasi lalu lintas menjadi jalan satu arah,
3. Mengurangi konflik dipersimpangan melalui pembatasan arus tertentu, biasanya yang paling dominan membatasi arus belok kanan,

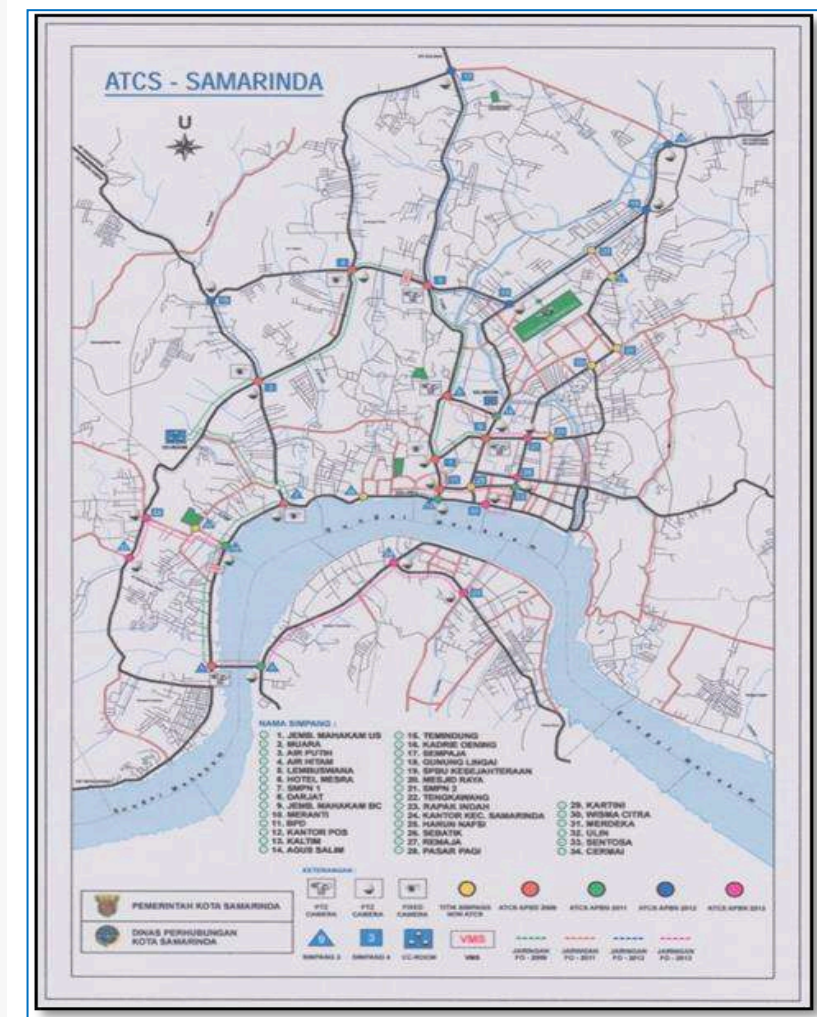


4. Meningkatkan kapasitas persimpangan melalui lampu lalu lintas, persimpangan tidak sebidang/flyover,
5. Mengembangkan jaringan pelayanan Angkutan Umum
6. Memberikan sanksi jika ada yang melanggar.

Salah satu upaya mengurangi kemacetan di Kota Samarinda, Dinas Perhubungan Kota Samarinda menerapkan teknologi *Area Traffic Control System* (ATCS) di 24 titik simpangan dari 39 titik dan dilengkapi Camera CCTV yang berfungsi untuk memantau, mengawasi, dan mengatur arus lalu lintas.

Setiap lokasi simpang tersebut dihubungkan dengan Pusat Kendali (*CC-ROOM*) yang berada di Kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda, disesuaikan dengan tingkat kepadatan arus kendaraan yang melintas di setiap titik lokasi simpang tersebut. Keberadaan ATCS bukan hanya sebatas penataan ritme lalu lintas dalam melakukan rekayasa lalu lintas sehingga diperoleh kondisi pergerakan lalu lintas secara efisien.

Gambar 2.2 Peta Jaringan *Area Traffic Control System* (ATCS)





Penataan siklus lampu lalu lintas berdasar input data lalu lintas yang diperoleh secara *real time*, melalui kamera CCTV pemantau lalu lintas pada titik-titik persimpangan. Penentuan waktu siklus lampu persimpangan dapat diubah berkali-kali dalam satu hari sesuai kebutuhan lalu lintas paling efisien yang mencakup keseluruhan wilayah tersebut. Dari teknologi *Area Traffic Control System (ATCS)* juga dapat memantau banjir, dan segera langsung menurunkan petugas lapangan Dinas Perhubungan untuk turun mengatur arus lalu lintas yang jadi penyebab kemacetan di area banjir tersebut.

2.4 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Adapun Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda yang mengacu pada SPM (Standar Pelayanan Minimal) Dinas Perhubungan Kota Samarinda, yaitu :

1. Tersedianya Angkutan Umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota;
2. Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kota;
3. Tersedianya halte pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek;
4. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek;
5. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kota;
6. Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten/kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji;
7. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kota yang telah memiliki terminal;
8. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor;
9. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRL, Evaluasi Andalin, pengelolaan parkir pada kota;
10. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap angkutan umum;
11. Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kota;



12. Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan dapat dilayari;
13. Tersedianya kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam Kota yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari;
14. Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau;
15. Terpenuhi standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi ada lintas antar pelabuhan dalam satu kota;
16. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau untuk daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau.

Review capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2010 - 2015 dan proyeksi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2016 – 2021 dapat dilihat pada table berikut:



Tabel 2.17 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian SKPD Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke					KET
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Urusan Perhubungan																			
1	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota.	75	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Pada penyusunan Renstra SKPD 2011-2015, indikator - indikator SPM belum terintegrasi sehingga tidak ada pencapaian Target
2	Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota.	60	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	
3	Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	100	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	36%	36%	36%	90%	98%	0%	0%	0%	0%	0%	



*Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021*

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian SKPD Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke					KET
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	40	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	77,78%	77,78%	77,78%	77,78%	77,78%	0%	0%	0%	0%	0%	
5	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota	60	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	96,73	95,61	87,67	87,67	87,67	0%	0%	0%	0%	0%	
6	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) pada jalan Kabupaten/Kota	60	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	93,54	91,3	75,42	75,42	75,42	0%	0%	0%	0%	0%	
7	Tersedianya fasilitas penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota	50	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	99,93	99,91	99,91	99,91	99,91	0%	0%	0%	0%	0%	
8	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota	100	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	



*Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021*

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian SKPD Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke					KET
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
9	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.	40	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	86.08	93.67	93.67	93.67	93.67	0%	0%	0%	0%	0%	
10	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.	100	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	50	50	50	50	50	0%	0%	0%	0%	0%	
11	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota	100	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	85.67	85.67	85.67	86.67	85.67	0%	0%	0%	0%	0%	



*Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021*

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian SKPD Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke					KET
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
12	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum.	75	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	20	20	20	20	40	0%	0%	0%	0%	0%	
13	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.	40	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	72.75	86.07	72.77	90	100	0%	0%	0%	0%	0%	
14	Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.	60	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	100	100	100	100	100	0%	0%	0%	0%	0%	



*Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021*

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian SKPD Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke					KET
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
15	Tersedianya kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam Kabupaten/Kota yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.	100	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	100	100	100	100	100	0%	0%	0%	0%	0%	
16	Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau.	50	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	100	100	100	100	100	0%	0%	0%	0%	0%	

Sumber : Database Sub Bagian Perencanaan Program Dishub Kota Samarinda, Tahun 2011-2015



2.4.1 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan

Evaluasi terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan dan laporan bulanan dapat dilihat anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Perhubungan serta capaian penganggaran belanja langsung dan tidak langsung tahun 2011-2015 pada table 2.18 berikut:

Tabel 2.18 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Serta capaian Penganggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Tahun 2011-2015

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan
	2011	2012	2013	2014	2015	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Pendanaan Daerah						
- Pendapatan	Rp 8,060,000,000	Rp 10,588,000,000	Rp 4,134,857,350	Rp 6,722,730,000	Rp 6,751,010,000	Rp 7,251,319,470
- Belanja Langsung	Rp 7,535,933,400	Rp 26,573,112,950	Rp 34,771,568,703	Rp 26,094,793,500	Rp 18,039,783,000	Rp 22,603,038,311
- Belanja Tidak Langsung	Rp 12,264,020,571	Rp 12,930,174,996	Rp 17,273,196,143	Rp 18,063,035,635	Rp 17,954,854,468	Rp 15,697,056,363
TOTAL	Rp 27,859,953,971	Rp 50,091,287,946	Rp 56,179,622,196	Rp 50,880,559,135	Rp 42,745,647,468	Rp 45,551,414,143

Sumber : Database Sub Bagian Perencanaan Program Dishub Kota Samarinda, Tahun 2011-2015



Uraian	Realisasi pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan
	2011	2012	2013	2014	2015	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Pendanaan Daerah						
- Pendapatan	Rp 5,819,043,248	Rp 6,957,938,850	Rp 3,064,611,875	Rp 4,742,657,500	Rp 3,294,301,750	Rp 4,775,710,645
- Belanja Langsung	Rp 4,641,272,703	Rp 15,591,772,742	Rp 3,093,562,706	Rp 19,054,900,378	Rp 4,704,612,574	Rp 9,417,224,221
- Belanja Tidak Langsung	Rp 8,241,682,649	Rp 10,624,772,152	Rp 6,376,604,003	Rp 15,521,381,806	Rp 7,374,891,819	Rp 9,627,866,486
TOTAL	Rp 18,701,998,600	Rp 33,174,483,744	Rp 33,174,483,744	Rp 39,318,939,684	Rp 15,373,806,143	Rp 23,820,801,351

Sumber : Database Sub Bagian Perencanaan Program Dishub Kota Samarinda, Tahun 2011-2015

Uraian	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				
	2011	2012	2013	2014	2015
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Pendanaan Daerah					
- Pendapatan	72.20%	65.72%	45.59%	70.55%	48.80%
- Belanja Langsung	61.59%	58.67%	11.86%	73.02%	26.08%
- Belanja Tidak Langsung	67.20%	82.17%	35.30%	85.93%	41.07%
TOTAL					

Sumber : Database Sub Bagian Perencanaan Program Dishub Kota Samarinda, Tahun 2011-2015



Evaluasi Terhadap Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Samarinda Periode Pelaksanaan 2011-2015 serta Indikator dan Target Kinerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda yang Mengacu pada Sasaran RPJMD Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel 2.19 berikut :

Tabel 2.19 Capaian Kinerja antara Renstra Dinas Perhubungan dengan RPJMD Periode 2011-2015

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian	Target Capaian	Target										Unit Penanggung Jawab	
						2011		2012		2013		2014		2015			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
I		Program pelayanan administrasi perkantoran															
1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan				100	162,000,000	100	231,000,000	100	328,149,000	100	776,552,000	100	783,844,000	Dinas Perhubungan	
2		Penyedia Alat Tulis Kantor				100	15,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000		
3		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				100	341,852,500	100	461,012,747	100	49,773,650	100	200,000,000	100	200,000,000		
4		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100	2,400,000	100	2,400,000	100	2,400,000	100	4,524,000	100	4,524,000		
5		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				100	187,680,000	100	209,744,800	100	249,419,800	100	88,862,500	100	80,000,000		
6		Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah				100	120,000,000	100	235,000,000	100	750,868,000	100	600,000,000	100	420,000,000		
7		Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran				100	2,447,948,900	100	1,933,377,403	100	2,987,144,250	100	4,416,030,000	100	4,597,830,000		



*Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021*

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian	Target Capaian	Target										Unit Penanggung Jawab
						2011		2012		2013		2014		2015		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
II		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur (BOP)														
8		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				100	12,000,000	100	189,240,000	100	90,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	
9		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional				100	441,394,000	100	494,570,000	100	539,480,000	100	1,161,450,000	100	1,142,535,000	
10		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor				100	133,700,000	100	141,100,000	100	51,600,000	100	141,200,000	100	141,200,000	
III		Program peningkatan disiplin aparatur														
11		Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya				100	218,958,000	100	218,958,000	100	399,900,000	100	148,500,000	0	0	
IV		Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan														
12		Sosialisasi pengawasan dan pendataan tower dan gedung sekitar leanding				-	-	-	-	-	-	-	-	100	50,000,000	
13		Peningkatan data operasional kebandarudaraan dan kelautan				-	-	-	-	-	-	-	-	100	90,000,000	
14		Pelaksanaan rapat kerja koordinasi provinsi regional dan nasional (Tuan rumah rakornis 2015)				-	-	-	-	-	-	-	-	100	500,000,000	



*Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021*

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian	Target Capaian	Target										Unit Penanggung Jawab
						2011		2012		2013		2014		2015		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
15		Penyusunan Program dan kebijakan perhubungan				-	-	100	400,000,000	-	-	-	-	-	-	
16		Monitoring dan evaluasi				-	-	100	200,000,000	-	-	-	-	-	-	
17		Penyusunan monitoring dan evaluasi program dan kebijakan perhubungan				-	-	-	-	100	144.000.000	100	200.000.000	100	240.000.000	
18		Evaluasi dan realisasi anggaran dan perhitungan optimalisasi penerimaan PAD dinas Perhubungan				-	-	100	150,000,000	100	72,847,000	-	-	-	-	
19		Penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan dinas perhubungan				-	-	-	-	-	-	100	100,000,000	100	150,000,000	
20		Pembuatan koridor terminal sungai kunjang				-	-	-	-	100	200,000,000	-	-	-	-	
21		Pembuatan database angkutan sungai				-	-	-	-	100	310,000,000	-	-	-	-	
22		Penyusunan data dan operasional pelayanan kebandarudaraan dan pelabuhan				-	-	100	70,000,000	100	170,000,000	-	-	-	-	
23		Pengawasan dan sosialisasi kawasan keselamatan operasi pelabuhan				-	-	-	-	100	200,000,000	-	-	-	-	
24		Sosialisasi dan pengawasan kawasan keselamatan operasional penerbangan				-	-	-	-	-	-	100	100,000,000	-	-	



*Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021*

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian	Target Capaian	Target										Unit Penanggung Jawab
						2011		2012		2013		2014		2015		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
25		Penunjang adipura				-	-	-	-	100	186,900,000	-	-	-	-	
26		Pengadaan kendaraan/mobil pengujian kendaraan bermotor				-	-	-	-	100	1,540,934,000	-	-	-	-	
27		Lanjutan pembangunan gedung PKB Jl. HM. Ardans				-	-	100	4,358,500,000	100	4,221,800,000	-	-	-	-	
28		Lanjutan pembangunan terminal cargo (tahap I)				-	-	-	-	-	-	100	200,000,000	-	-	
29		Pengadaan alat uji bermotor (Gedung PKB Jl. HM. Ardans)				-	-	100	3,499,000,000	-	-	-	-	-	-	
30		Pengadaan sitem informasi pembukuan & pelaporan uji keur pengujian kendaraan bermotor				-	-	100	12,425,000	-	-	-	-	-	-	
31		Pembangunan terminal induk di ring road (bantuan keuangan provinsi 2008)(Lanjutan tahun 2008)				100	3,416,720,000	100	3,416,720,000	-	-	-	-	-	-	
32		Peningkatan sarana prasarana mobilitas perhubungan				-	-	-	-	100	4,210,000,000	100	3,222,550,000	-	-	
V		Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana fasilitas LLAJ														
33		Penunjang operasional ATCS				-	-	100	224,885,000	-	-	-	-	-	-	



No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian	Target Capaian	Target										Unit Penanggung Jawab
						2011		2012		2013		2014		2015		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
34		Peningkatan pengawasan dan pendataan fasilitas LLAJ Perhubungan				-	-	100	50,000,000	-	-	-	-	-	-	
35		Penyuluhan dan Penertiban/Razia terhadap kapal - kapal sungai				-	-	100	89,300,000	-	-	-	-	-	-	
36		Penunjang patroli gabungan rutin PPNS, DAL OPS LLAJ, POL PP dan Polantas untuk penertiban angkutan, perparkiran dan pedagang kaki lima (PKL)				-	-	100	740,140,000	-	-	-	-	-	-	
37		Peningkatan pelayanan publik pada pelayanan parkir				100	400,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	
VI		Program peningkatan pelayanan angkutan														
38		UPT PKB				100	400.000.000	100	150,000,000	100	1.033.750.000	100	646.125.000	100	600.000.000	
39		UPT Terminal (Operasional kegiatan terminal cargo)				100	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
40		UPT. Terminal				-	-	100	250.000.000	100	183.250.000	100	270.000.000	98.4	200.000.000	
41		UPT.Dermaga dan Pelabuhan				100	200.000.000	100	150.000.000	100	279.040.000	100	150.000.000	100	150.000.000	



*Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021*

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian	Target Capaian	Target										Unit Penanggung Jawab
						2011		2012		2013		2014		2015		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
42		Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal barang (cargo)				-	-	100	100.000.000	-	-	-	-	-	-	
43		Rehabilitasi terminal kota				-	-	100	150.000.000	-	-	-	-	-	-	
44		Rehabilitasi terminal pinang				-	-	100	450.000.000	-	-	-	-	-	-	
45		Rehabilitasi pemeliharaan terminal dalam kota				-	-	-	-	100	400.000.000	-	-	-	-	
46		Penunjang kegiatan forum lalu lintas angkutan jalan				-	-	100	60.000.000	-	-	100	150.000.000	-	-	
47		Lomba WTN dan posko angkutan lebaran, adipura dan pelajar pelopor				-	-	100	148.075.000	-	-	-	-	-	-	
48		Perawatan dan perbaikan kapal				-	-	100	50.000.000	-	-	-	-	-	-	
49		Review DED terminal penumpang pelabuhan palaran samarinda				-	-	100	1.700.000.000	-	-	-	-	-	-	
50		Rehabilitasi dermaga pasar pagi				-	-	100	200.000.000	-	-	-	-	-	-	
51		Rehabilitasi terminal dan pelabuhan dikota samarinda penunjang adipura				-	-	100	1.141.000.000	-	-	-	-	-	-	



*Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021*

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian	Target Capaian	Target										Unit Penanggung Jawab
						2011		2012		2013		2014		2015		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
52		Peningkatan pelayanan publik pada pelayanan proses perijinan angkutan				-	-	-	-	100	200.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	
53		Daftar ulang armada angkutan penumpang umum dalam wilayah kota				-	-	-	-	100	150.000.000	-	-	-	-	
54		Pengendalian dan operasional pengawasan lalu lintas angkutan jalan				-	-	-	-	100	1.193.870.000	-	-	-	-	
55		Pengendalian dan operasional pengawasan lalu lintas angkutan sungai				-	-	-	-	100	200.000.000	-	-	-	-	
56		Pengendalian dan operasional pengawasan fasilitas perhubungan				-	-	-	-	100	139.490.000	-	-	-	-	
57		Wahana tata nagraha (WTN)				-	-	-	-	100	275.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	
58		Pembangunan sisi darat terminal penumpang palaran				-	-	-	-	100	5.000.000.000	-	-	-	-	
59		Pembangunan sisi darat terminal penumpang palaran (realokasi kegiatan th. 2013)				-	-	-	-	-	-	100	533.000.000	-	-	
60		Pendataan potensi kebandarudaraan dan kelautan				-	-	-	-	-	-	100	100.000.000	-	-	
61		Peningkatan pengawasan dan pendataan fasilitas LLAJ dan LLAS Perhubungan				-	-	-	-	-	-	100	105.000.000	100	49.500.000	



*Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021*

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian	Target Capaian	Target										Unit Penanggung Jawab
						2011		2012		2013		2014		2015		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
62		Perencanaan pemindahan terminal pasar pagi dan penataan kantong parkir tepian mahakam tahap I (segmen masjid raya - kantor pos)				-	-	-	-	-	-	100	2.500.000.000	-	-	
63		Pembangunan terminal induk di ring road (bantuan keuangan provinsi 2008)(Lanjutan tahun 2008)(Realokasi th. 2012)				-	-	-	-	100	1.512.480.000	-	-	-	-	
64		Review DED terminal penumpang pelabuhan palaran (Realokasi kegiatan th. 2012 Samarinda)				-	-	-	-	100	1.162.265.000	-	-	-	-	
65		Review DED terminal cargo kota samarinda				-	-	-	-	100	250.000.000	-	-	-	-	
66		Penataan kantong parkir tepian mahakam (segmen masjid raya - kantor pos)				-	-	-	-	-	-	-	-	100	2.500.000.000	
67		DAK Perhubungan				-	-	-	-	-	-	-	-	100	653.850.000	
68		Dana penunjang DAK				-	-	-	-	-	-	-	-	100	80.000.000	
69		Kampanye dan sar keselamatan pelayaran sungai				-	-	-	-	-	-	-	-	100	390.000.000	
70		Pengendalian dan operasional pengawasan lalu lintas angkutan sungai				-	-	-	-	-	-	-	-	100	41.500.000	



*Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021*

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian	Target Capaian	Target										Unit Penanggung Jawab
						2011		2012		2013		2014		2015		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
VII		Program pembangunan sarana prasarana perhubungan														
71		Peningkatan sarana prasarana kedinasan				-	-	100	1.825.890.000	-	-	-	-	-	-	
VII I		Program pengendalian dan pengamanan lalu - lintas														
72		Pemeliharaan traffic light dan jaringan area traffic control system (ATCS)				-	-	-	-	100	1.000.000.000	100	1.250.000.000	100	500.000.000	
73		Pembangunan dan rehabilitasi halte angkutan umum				-	-	-	-	-	-	100	4.250.000.000	-	-	
74		Pemeliharaan trafic light						100	650.000.000	-	-	-	-	-	-	
75		Pengadaan fasilitas keselamatan jalan dan rambu				-	-	-	-	100	1.000.000.000	100	500.000.000			
76		Forum lalu lintas dan angkutan jalan				-	-	-	-	100	279.900.000	-	-	100	200.000.000	
77		Studi pembuatan master plan transfortasi kota samarinda				-	-	-	-	-	-	100	1.330.000.000	-	-	
78		Tim gabungan penertiban mobil angkutan galian C/Material dan pengotoran jalan serta razia gabungan penegakan hukum terhadap perizinan persyaratan teknis				-	-	-	-	-	-	100	595.000.000	-	-	



*Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021*

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian	Target Capaian	Target										Unit Penanggung Jawab
						2011		2012		2013		2014		2015		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		dan laik jalan angkutan umum														
79		Tim gabungan penertiban dan penegakan hukum undang-undang lalu lintas angkutan				-	-	-	-	-	-	-	-	100	745.000.000	
80		Pengadaan rambu - rambu lalu lintas dan alat pengaman jalan (Realokasi kegiatan th. 2012)				-	-	-	-	-	-	-	-	100	900.000.000	
81		Zona aman lalu lintas sekolah				-	-	-	-	-	-	100	300.000.000	-	-	
82		Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan				-	-	-	-	-	-	100	76.000.000	100	100.000.000	
83		Penunjang operasional ruang kendali ATCS				-	-	-	-	100	563.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	
84		Pemeliharaan dan pengecatan marka jalan						100	1.550.000.000	100	1.500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	
85		Pengadaan alat uji bermotor (Realokasi kegiatan th. 2012)				-	-	-	-	100	316.600.000	-	-	-	-	
86		Pemeliharaan dan pengecatan marka jalan (Realokasi kegiatan 2012)				-	-	-	-	100	1.059.576.000	-	-	-	-	
87		Pengadaan rambu lalu - lintas dan alat pengaman jalan				-	-	100	350.000.000	-	-	-	-	-	-	



*Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021*

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian	Target Capaian	Target										Unit Penanggung Jawab
						2011		2012		2013		2014		2015		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
88		Penyusunan program penetapan dan penyusunan pedoman penanggulangan SAR kelautan dan kebandarudaraan				-	-	100	140.775.000	-	-	-	-	-	-	
89		Pengadaan rambu lalu lintas dan alat pengaman jalan (Realokasi kegiatan th. 2012)				-	-	-	-	100	188.132.000					
90		Pembangunan terminal kota tahap VII (terminal cargo) 2011				100	1.500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
91		Program kegiatan dan fasilitas perhubungan				100	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
92		Sosialisasi pertanggung jawaban, pengelolaan keuangan dan fasilitas aparatur				100	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
93		Penyelesaian dampak sosial pembangunan terminal penyangga pinang (Multiyears)				100	1.500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
94		Penunjang operasional ATCS				100	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
95		Pemeliharaan Traffic Light				100	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	



*Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021*

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian	Target Capaian	Target										Unit Penanggung Jawab
						2011		2012		2013		2014		2015		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
IX		Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana fasilitas LLAJ														
96		Pembuatan marka dan rambu jalan kota samarinda (Bantuan keuangan propinsi tahun 2011)				100	2.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
97		Penertiban terhadap angkutan pedagang kaki lima/PKL dengan patroli gabungan secara rutin oleh PPNS dan polisi				100	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
X		Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor														
98		Lanjutan pembangunan gedung pengujian kendaraan bermotor jl. HM. Ardans				-	-	-	-	-	-	-	-	100	1.300.000.000	
Jumlah						100	14.449.653.400	100	26.573.112.950	100	34.771.568.703	100	26.094.793.500	100	18.039.783.000	

Sumber: Database Sub Bagian Perencanaan Program Renstra Dishub Kota Samarinda Tahun 2011-2015



*Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021*

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian	Target Capaian	Realisasi										Unit Penanggung Jawab
						2011		2012		2013		2014		2015		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
I		Program pelayanan administrasi perkantoran														Dinas Perhubungan
1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan			72	152.268.564	76	183.087.766	62	212.442.894	61	368.327.701	24	185.604.233		
2		Penyedia Alat Tulis Kantor			100	15.000.000	92	27.558.500	95	29.998.500	100	29.999.500	50	14.976.000		
3		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			54	184.714.600	60	397.074.000	100	49.580.000	94	187.970.000	15	29.410.000		
4		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			0	0	90	2.170.700	96	2.300.000	100	4.523.800	50	2.252.650		
5		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			96	180.721.102	98	206.385.950	94	234.901.006	76	67.633.182	78	62.301.900		
6		Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah			100	119.599.900	70	232.205.699	95	711.091.849	96	578.211.200	18	71.700.500		
7		Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran			78	1.613.783.825	95	1.835.684.325	88	2.614.796.625	63	4.185.500.000	50	2.300.800.000		
II		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur (BOP)														
8		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			88	10.522.989	97	183.336.160	99	89.597.000	100	49.936.000	98	48.782.000		
9		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional			58	255.523.000	84	414.886.800	88	475.154.300	88	1.017.955.000	21	244.886.500		



*Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021*

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian	Target Capaian	Realisasi										Unit Penanggung Jawab
						2011		2012		2013		2014		2015		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
10		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor				30	40.540.000	30	43.100.000	100	51.600.000	96	135.300.000	10	13.900.000	
III		Program peningkatan disiplin aparatur														
11		Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya				99	217.088.400	95	216.466.000	86	346.162.000	100	148.351.500	-	-	
IV		Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan														
12		Sosialisasi pengawasan dan pendataan tower dan gedung sekitar leanding				-	-	-	-	-	-	-	-	19	9.500.000	
13		Peningkatan data operasional kebandarudaraan dan kelautan				-	-	-	-	-	-	-	-	44	39.710.000	
14		Pelaksanaan rapat kerja koordinasi provinsi regional dan nasional (Tuan rumah rakornis 2015)				-	-	-	-	-	-	-	-	71	357.201.300	
15		Penyusunan Program dan kebijakan perhubungan				-	-	99	397.556.045	-	-	-	-	-	-	
16		Monitoring dan evaluasi				-	-	79	157.760.000	-	-	-	-	-	-	
17		Penyusunan monitoring dan evaluasi program dan kebijakan perhubungan				-	-	-	-	97	140.174.000	100	199.950.000	29	70.730.000	



*Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021*

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian	Target Capaian	Realisasi										Unit Penanggung Jawab
						2011		2012		2013		2014		2015		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
18		Evaluasi dan realisasi anggaran dan perhitungan optimalisasi penerimaan PAD dinas Perhubungan				-	-	98	147.818.000	97	70.457.000	-	-	-	-	
19		Penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan dinas perhubungan				-	-	-	-	-	-	93	93.541.700	42	62.863.000	
20		Pembuatan koridor terminal sungai kunjang				-	-	-	-	93	186.038.500	-	-	-	-	
21		Pembuatan database angkutan sungai				-	-	-	-	91	276.717.400	-	-	-	-	
22		Penyusunan data dan operasional pelayanan kebandarudaraan dan pelabuhan				-	-	99	69.650.000	95	161.775.000	-	-	-	-	
23		Pengawasan dan sosialisasi kawasan keselamatan operasi pelabuhan				-	-	-	-	54	107.825.000	-	-	-	-	
24		Sosialisasi dan pengawasan kawasan keselamatan operasional penerbangan				-	-	-	-	-	-	98	99.540.000	-	-	
25		Penunjang adipura				-	-	-	-	27	49.805.500	-	-	-	-	
26		Pengadaan kendaraan/mobil pengujian kendaraan bermotor				-	-	-	-	16	1.514.463.500	-	-	-	-	
27		Lanjutan pembangunan gedung PKB Jl. HM. Ardans				-	-	20	128.965.000	88	4.034.639.000	-	-	-	-	



No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian	Target Capaian	Realisasi										Unit Penanggung Jawab
						2011		2012		2013		2014		2015		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
28		Lanjutan pembangunan terminal cargo (tahap I)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29		Pengadaan alat uji bermotor (Gedung PKB Jl. HM. Ardans)				-	-	95	3.333.705.000	-	-	-	-	-	-	
30		Pengadaan sitem informasi pembukuan & pelaporan uji keur penguji kendaraan bermotor				-	-	41	5.135.000	-	-	-	-	-	-	
31		Pembangunan terminal induk di ring road (bantuan keuangan provinsi 2008)(Lanjutan tahun 2008)				-	-	54	1.532.005.000	-	-	-	-	-	-	
32		Peningkatan sarana prasarana mobilitas perhubungan				-	-	-	-	44	969.700.000	85	2.756.400.500			
V		Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana fasilitas LLAJ														
33		Penunjang operasional ATCS				-	-	40	153.362.000	-	-	-	-	-	-	
34		Peningkatan pengawasan dan pendataan fasilitas LLAJ Perhubungan				-	-	92	48.210.000	-	-	-	-	-	-	
35		Penyuluhan dan Penertiban/Razia terhadap kapal - kapal sungai				-	-	99	86.700.000	-	-	-	-	-	-	
36		Penunjang patroli gabungan rutin PPNS, DAL OPS				-	-	97	718.988.000	-	-	-	-	-	-	



*Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021*

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian	Target Capaian	Realisasi										Unit Penanggung Jawab
						2011		2012		2013		2014		2015		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		LLAJ, POL PP dan Polantas untuk penertiban angkutan, perparkiran dan pedagang kaki lima (PKL)														
37		Peningkatan pelayanan publik pada pelayanan parkir				96	385.679.750	89	133.470.000	55	18.000.000	98	97.780.000	71	71.210.000	
VI		Program peningkatan pelayanan angkutan														
38		UPT PKB				95	380.537.700	97	144.961.924	85	981.287.000	93	602.161.000	66	395486.575	
39		UPT Terminal (Operasional kegiatan terminal cargo)				99	197.283.600	-	-	-	-	-	-	-	-	
40		UPT. Terminal				-	-	88	219.199.700	67	123.374.000	98	265.576.300	62	123.942.500	
41		UPT.Dermaga dan Pelabuhan				97	193.727.575	97	145.903.825	91	254.444.200	97	142.725.870	32	48.821.000	
42		Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal barang (cargo)				-	-	96	95.924.848	-	-	-	-	-	-	
43		Rehabilitasi terminal kota						93	139.829.000	-	-	-	-	-	-	
44		Rehabilitasi terminal pinang				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45		Rehabilitasi pemeliharaan terminal dalam kota				-	-	-	-	92	369.162.700	-	-	-	-	



*Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021*

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian	Target Capaian	Realisasi										Unit Penanggung Jawab
						2011		2012		2013		2014		2015		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
46		Penunjang kegiatan forum lalu lintas angkutan jalan				-	-	82	49.525.000	-	-	100	150.000.000	-	-	
47		Lomba WTN dan posko angkutan lebaran, adipura dan pelajar pelopor				-	-	93	140.312.000	-	-	-	-	-	-	
48		Perawatan dan perbaikan kapal				-	-	97	48.541.500	-	-	-	-	-	-	
49		Review DED terminal penumpang pelabuhan palaran samarinda				-	-	28	482.688.500	-	-	-	-	-	-	
50		Rehabilitasi dermaga pasar pagi				-	-	100	199.930.000	-	-	-	-	-	-	
51		Rehabilitasi terminal dan pelabuhan dikota samarinda penunjang adipura				-	-	85	973.183.500	-	-	-	-	-	-	
52		Peningkatan pelayanan publik pada pelayanan proses perijinan angkutan				-	-	-	-	100	199.789.000	58	58.143.000	57	85.825.000	
53		Daftar ulang armada angkutan penumpang umum dalam wilayah kota				-	-	-	-	83	125.175.000	-	-	-	-	
54		Pengendalian dan operasional pengawasan lalu lintas angkutan jalan				-	-	-	-	91	1.082.245.500	-	-	-	-	
55		Pengendalian dan operasional pengawasan lalu lintas angkutan sungai				-	-	-	-	89	178.750.000	-	-	-	-	
56		Pengendalian dan operasional pengawasan fasilitas perhubungan				-	-	-	-	76	106.370.000	-	-	-	-	



*Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021*

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian	Target Capaian	Realisasi										Unit Penanggung Jawab
						2011		2012		2013		2014		2015		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
57		Wahana tata ngraha (WTN)				-	-	-	-	18	110.185.000	87	174.379.630	29	57.336.000	
58		Pembangunan sisi darat terminal penupang palaran				-	-	-	-	20	994.000.000	-	-	-	-	
59		Pembangunan sisi darat terminal penupang palaran (realokasi kegiatan th. 2013)				-	-	-	-	-	-	20	107.898.500	-	-	
60		Pendataan potensi kebandarudaraan dan kelautan				-	-	-	-	-	-	98	98.000.000	-	-	
61		Peningkatan pengawasan dan pendataan fasilitas LLAJ dan LLAS Perhubungan				-	-	-	-	-	-	-	-	51	25.543.000	
62		Perencanaan pemindahan terminal pasar pagi dan penataan kantong parkir tepian mahakam tahap I (segmen masjid raya - kantor pos)				-	-	-	-	-	-	19	481.360.000	-	-	
63		Pembangunan terminal induk di ring road (bantuan keuangan provinsi 2008)(Lanjutan tahun 2008)(Realokasi th. 2012)				-	-	-	-	95	1.437.334.000	-	-	-	-	
64		Review DED terminal penumpang pelabuhan palaran (Realokasi kegiatan th. 2012 Samarinda)				-	-	-	-	100	1.162.265.000	-	-	-	-	
65		Review DED terminal cargo kota samarinda				-	-	-	-	95	238.026.000	-	-	-	-	



No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian	Target Capaian	Realisasi										Unit Penanggung Jawab
						2011		2012		2013		2014		2015		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
66		Penataan kantong parkir tepi mahakam (segmen masjid raya - kantor pos)				-	-	-	-	-	-	-	-	50	1.241.366.350	
67		DAK Perhubungan				-	-	-	-	-	-	-	-	28	185.254.000	
68		Dana penunjang DAK				-	-	-	-	-	-	-	-	82	65.385.400	
69		Kampanye dan sar keselamatan pelayaran sungai				-	-	-	-	-	-	-	-	74	288.087.445	
70		Pengendalian dan operasional pengawasan lalu lintas angkutan sungai				-	-	-	-	-	-	-	-	26	10.930.000	
VII		Program pembangunan sarana prasarana perhubungan														
71		Peningkatan sarana prasarana kedinasan				-	-	74	1.362.789.000	-	-	-	-	-	-	
VII I		Program pengendalian dan pengamanan lalu - lintas														
72		Pemeliharaan traffic light dan jaringan area traffic control system (ATCS)				-	-	-	-	87	873.143.300	93	1.184.677.400	49	242.904.000	
73		Pembangunan dan rehabilitasi halte angkutan umum				-	-	-	-	-	-	95	3.619.711.095	-	-	
74		Pemeliharaan trafic light				-	-	96	627.190.000	-	-	-	-	-	-	



*Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021*

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian	Target Capaian	Realisasi										Unit Penanggung Jawab
						2011		2012		2013		2014		2015		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
75		Pengadaan fasilitas keselamatan jalan dan rambu				-	-	-	-	97	967.945.000	86	486.701.000			
76		Forum lalu lintas dan angkutan jalan				-	-	-	-	31	85.770.000	-	-	58	115.600.000	
77		Studi pembuatan master plan transfortasi kota samarinda				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
78		Tim gabungan penertiban mobil angkutan galian C/Material dan pengotoran jalan serta razia gabungan penegakan hukum terhadap perizinan persyaratan teknis dan laik jalan angkutan umum				-	-	-	-	-	-	93	554.608.000	-	-	
79		Tim gabungan penertiban dan penegakan hukum undang -undang lalu lintas angkutan				-	-	-	-	-	-	-	-	67	417.032.000	
80		Pengadaan rambu - rambu lalu lintas dan alat pengaman jalan (Realokasi kegiatan th. 2012)				-	-	-	-	-	-	-	-	10	10.865.000	
81		Zona aman lalu lintas sekolah				-	-	-	-	-	-	96	287.614.000			
82		Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan				-	-	-	-	-	-	99	75.648.500	39	38.982.000	
83		Penunjang operasional ruang kendali ATCS				-	-	-	-	95	534.555.500	96	191.870.000	16	32.060.000	



*Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021*

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian	Target Capaian	Realisasi										Unit Penanggung Jawab
						2011		2012		2013		2014		2015		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
84		Pemeliharaan dan pengecatan marka jalan						8	130.460.000	95	1.430.819.000	98	456.056.000	96	481.817.000	
85		Pengadaan alat uji bermotor (Realokasi kegiatan th. 2012)						-	-	99	314.650.000	-	-	-	-	
86		Pemeliharaan dan pengecatan marka jalan (Realokasi kegiatan 2012)						-	-	98	1.041.308.000	-	-	-	-	
87		Pengadaan rambu lalu lintas dan alat pengaman jalan						-	-	10	36.494.000	-	-	-	-	
88		Penyusunan program penetapan dan penyusunan pedoman penanggulangan SAR kelautan dan kebandarudaraan						-	-	96	139.560.000	-	-	-	-	
89		Pengadaan rambu lalu lintas dan alat pengaman jalan (Realokasi kegiatan th. 2012)						-	-	-	-	100	188.132.000	-	-	
90		Pembangunan terminal kota tahap VII (terminal cargo) 2011						-	-	-	-	-	-	-	-	
91		Program kegiatan dan fasilitas perhubungan						90	180.810.000	-	-	-	-	-	-	
92		Sosialisasi pertanggung jawaban, pengelolaan keuangan dan fasilitas aparatur						96	144.590.200	-	-	-	-	-	-	
93		Penyelesaian dampak sosial pembangunan terminal penyangga pinang (Multiyears)						-	-	-	-	-	-	-	-	



*Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021*

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian	Target Capaian	Realisasi										Unit Penanggung Jawab
						2011		2012		2013		2014		2015		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
94		Penunjang operasional ATCS				79	76.349.548									
95		Pemeliharaan Traffic Light				96	192.530.900	-	-	-	-	-	-	-	-	
IX		Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana fasilitas LLAJ														
96		Pembuatan marka dan rambu jalan kota samarinda (Bantuan keuangan propinsi tahun 2011)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
97		Penertiban terhadap angkutan pedagang kaki lima/PKL dengan patroli gabungan secara rutin oleh PPNS dan polisi				100	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
X		Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor														
98		Lanjutan pembangunan gedung pengujian kendaraan bermotor jl. HM. Ardans				-	-	-	-	-	-	-	-	12	164.055.000	
Jumlah						32	4.641.271.653	59	15.591.772.742	72	25.146.049.274	73	18.958.050.378	42	7.617.120.353	

Sumber: Database Sub Bagian Perencanaan Program Renstra Dishub Kota Samarinda Tahun 2011-2015



No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian	Target Capaian	Rasio										Unit Penanggung Jawab
						2011		2012		2013		2014		2015		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
I		Program pelayanan administrasi perkantoran														
1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ...				72	94	76	79	62	65	61	47	24	47	Dinas Perhubungan
2		Penyedia Alat Tulis Kantor				100	100	92	92	0	100	100	100	50	100	
3		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				54	54	6	86	100	100	94	94	15	94	
4		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0	0	90	90	96	96	100	100	50	100	
5		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				96	96	0	98	94	94	76	76	78	76	
6		Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah				100	100	70	99	95	95	96	96	17	96	
7		Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran				78	66	95	95	87	87	63	95	50	95	
II		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur (BOP)														
8		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				88	88	97	97	100	100	100	100	100	100	
9		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional				58	58	84	84	88	88	88	88	21	88	



No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian	Target Capaian	Rasio										Unit Penanggung Jawab
						2011		2012		2013		2014		2015		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
10		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor				30	30	31	31	100	100	96	96	10	96	
III		Program peningkatan disiplin aparatur														
11		Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya				99	99	0	99	87	87	100	100	-	100	
IV		Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan														
12		Sosialisasi pengawasan dan pendataan tower dan gedung sekitar leanding				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13		Peningkatan data operasional kebandarudaraan dan kelautan				-	-	-	-	-	-	-	-	44	-	
14		Pelaksanaan rapat kerja koordinasi provinsi regional dan nasional (Tuan rumah rakornis 2015)				-	-	-	-	-	-	-	-	71	-	
15		Penyusunan Program dan kebijakan perhubungan				-	-	99	99	-	-	-	-	-	-	
16		Monitoring dan evaluasi				-	-	79	79	-	-	-	-	-	-	
17		Penyusunan monitoring dan evaluasi program dan kebijakan perhubungan				-	-	-	-	97	97	100	100	29	100	



*Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021*

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian	Target Capaian	Rasio										Unit Penanggung Jawab
						2011		2012		2013		2014		2015		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
18		Evaluasi dan realisasi anggaran dan perhitungan optimalisasi penerimaan PAD dinas Perhubungan				-	-	99	99	97	97	-	-	-	-	
19		Penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan dinas perhubungan				-	-	-	-	-	-	93	93	41	93	
20		Pembuatan koridor terminal sungai kunjang				-	-	-	-	93	93	-	-	-	-	
21		Pembuatan database angkutan sungai				-	-	-	-	91	90	-	-	-	-	
22		Penyusunan data dan operasional pelayanan kebandarudaraan dan pelabuhan				-	-	-	-	95	95	-	-	-	-	
23		Pengawasan dan sosialisasi kawasan keselamatan operasi pelabuhan				-	-	-	-	54	54	-	-	-	-	
24		Sosialisasi dan pengawasan kawasan keselamatan operasional penerbangan				-	-	-	-	-	-	98	99		99	
25		Penunjang adipura				-	-	-	-	27	27	-	-	-	-	
26		Pengadaan kendaraan/mobil pengujian kendaraan bermotor				-	-	-	-	16	98	-	-	-	-	
27		Lanjutan pembangunan gedung PKB Jl. HM. Ardans				-	-	20	3	88	96	-	-	-	-	



No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian	Target Capaian	Rasio										Unit Penanggung Jawab
						2011		2012		2013		2014		2015		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
28		Lanjutan pembangunan terminal cargo (tahap I)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29		Pengadaan alat uji bermotor (Gedung PKB Jl. HM. Ardans)				-	-	95	95	-	-	-	-	-	-	-
30		Pengadaan sitem informasi pembukuan & pelaporan uji keur pengujian kendaraan bermotor				-	-	41	41	-	-	-	-	-	-	-
31		Pembangunan terminal induk di ring road (bantuan keuangan provinsi 2008)(Lanjutan tahun 2008)				-	-	54	45	-	-	-	-	-	-	-
32		Peningkatan sarana prasarana mobilitas perhubungan				-	-	-	-	-	44	23	85	85	85	-
V		Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana fasilitas LLAJ														
33		Penunjang operasional ATCS						40	68	-	-	-	-	-	-	-
34		Peningkatan pengawasan dan pendataan fasilitas LLAJ Perhubungan						92	96	-	-	-	-	-	-	-
35		Penyuluhan dan Penertiban/Razia terhadap kapal - kapal sungai						99	97	-	-	-	-	-	-	-
36		Penunjang patroli gabungan rutin PPNS, DAL OPS LLAJ, POL PP dan Polantas untuk penertiban angkutan,						97	97	-	-	-	-	-	-	-



No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian	Target Capaian	Rasio										Unit Penanggung Jawab
						2011		2012		2013		2014		2015		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		perparkiran dan pedagang kaki lima (PKL)														
37		Peningkatan pelayanan publik pada pelayanan parkir				96	96	89	89	55	12	98	98	71	98	
VI		Program peningkatan pelayanan angkutan														
38		UPT PKB				95	95	97	97	86	95	93	93	66	93	
39		UPT Terminal (Operasional kegiatan terminal cargo)				95	99	-	-	-	-	-	-	-	-	
40		UPT. Terminal				-	-	88	88	68	68	98	98	63	98	
41		UPT.Dermaga dan Pelabuhan				97	97	97	97	91	91	97	95	32	95	
42		Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal barang (cargo)				-	-	96	96	-	-	-	-	-	-	
43		Rehabilitasi terminal kota				-	-	93	93	-	-	-	-	-	-	
44		Rehabilitasi terminal pinang				-	-	0	00	-	-	-	-	-	-	
45		Rehabilitasi pemeliharaan terminal dalam kota				-	-	-	-	92	92	-	-	-	-	



*Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021*

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian	Target Capaian	Rasio										Unit Penanggung Jawab
						2011		2012		2013		2014		2015		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
46		Penunjang kegiatan forum lalu lintas angkutan jalan				-	-	82	82	-	-	100	100		100	
47		Lomba WTN dan posko angkutan lebaran, adipura dan pelajar pelopor				-	-	93	95	-	-	-	-	-	-	
48		Perawatan dan perbaikan kapal				-	-	97	97	-	-	-	-	-	-	
49		Review DED terminal penumpang pelabuhan palaran samarinda				-	-	28	28	-	-	-	-	-	-	
50		Rehabilitasi dermaga pasar pagi				-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	
51		Rehabilitasi terminal dan pelabuhan dikota samarinda penunjang adipura				-	-	85	85	-	-	-	-	-	-	
52		Peningkatan pelayanan publik pada pelayanan proses perijinan angkutan				-	-	-	-	100	100	58	58	57	58	
53		Daftar ulang armada angkutan penumpang umum dalam wilayah kota				-	-	-	-	83	83	-	-	-	-	
54		Pengendalian dan operasional pengawasan lalu lintas angkutan jalan				-	-	-	-	91	91	-	-	-	-	
55		Pengendalian dan operasional pengawasan lalu lintas angkutan sungai				-	-	-	-	89	89	-	-	-	-	
56		Pengendalian dan operasional pengawasan fasilitas perhubungan				-	-	-	-	76	76	-	-	-	-	



*Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021*

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian	Target Capaian	Rasio										Unit Penanggung Jawab
						2011		2012		2013		2014		2015		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
57		Wahana tata nugraha (WTN)				-	-	-	-	18	40	87	87	28	87	
58		Pembangunan sisi darat terminal penumpang palaran				-	-	-	-	20	20	-	-	-	-	
59		Pembangunan sisi darat terminal penumpang palaran (realokasi kegiatan th. 2013)				-	-	-	-	-	-	20	20	-	20	
60		Pendataan potensi kebandarudaraan dan kelautan				-	-	-	-	-	-	98	98		98	
61		Peningkatan pengawasan dan pendataan fasilitas LLAJ dan LLAS Perhubungan				-	-	-	-	-	-	0	0	51	0	
62		Perencanaan pemindahan terminal pasar pagi dan penataan kantong parkir tepian mahakam tahap I (segmen masjid raya - kantor pos)				-	-	-	-	-	-	19	19		19	
63		Pembangunan terminal induk di ring road (bantuan keuangan provinsi 2008)(Lanjutan tahun 2008)(Realokasi th. 2012)				-	-	-	-	95	95	-	-	-	-	
64		Review DED terminal penumpang pelabuhan palaran (Realokasi kegiatan th. 2012 Samarinda)				-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	
65		Review DED terminal cargo kota samarinda				-	-			95	95	-	-	-	-	



No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian	Target Capaian	Rasio										Unit Penanggung Jawab
						2011		2012		2013		2014		2015		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
66		Penataan kantong parkir tepi mahakam (segmen masjid raya - kantor pos)				-	-	-	-	-	-	-	-	49	-	
67		DAK Perhubungan				-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	
68		Dana penunjang DAK				-	-	-	-	-	-	-	-	82	-	
69		Kampanye dan sar keselamatan pelayaran sungai				-	-	-	-	-	-	-	-	74	-	
70		Pengendalian dan operasional pengawasan lalu lintas angkutan sungai				-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	
VII		Program pembangunan sarana prasarana perhubungan														
71		Peningkatan sarana prasarana kedinasan				-	-	75	75	-	-	-	-	-	-	
VII I		Program pengendalian dan pengamanan lalu - lintas														
72		Pemeliharaan traffic light dan jaringan area traffic control system (ATCS)				-	-	-	-	87	87	93	95	49	95	
73		Pembangunan dan rehabilitasi halte angkutan umum				-	-	-	-	-	-	95	85	-	85	



*Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021*

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian	Target Capaian	Rasio										Unit Penanggung Jawab
						2011		2012		2013		2014		2015		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
74		Pemeliharaan traffic light				-	-	96	96	-	-	-	-	-	-	
75		Pengadaan fasilitas keselamatan jalan dan rambu				-	-	-	-	97	97	86	97		97	
76		Forum lalu lintas dan angkutan jalan				-	-	-	-	30	30	-	-	58	-	
77		Studi pembuatan master plan transportasi kota samarinda				-	-	-	-	-	-	0	0		0	
78		Tim gabungan penertiban mobil angkutan galian C/Material dan pengotoran jalan serta razia gabungan penegakan hukum terhadap perizinan persyaratan teknis dan laik jalan angkutan umum				-	-	-	-	-	-	93	93	-	93	
79		Tim gabungan penertiban dan penegakan hukum undang -undang lalu lintas angkutan				-	-	-	-	-	-	-	-	67	-	
80		Pengadaan rambu - rambu lalu lintas dan alat pengaman jalan (Realokasi kegiatan th. 2012)				-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
81		Zona aman lalu lintas sekolah				-	-	-	-	-	-	96	96		96	
82		Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan				-	-	-	-	-	-	99	99	39	99	



*Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021*

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian	Target Capaian	Rasio										Unit Penanggung Jawab
						2011		2012		2013		2014		2015		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
83		Penunjang operasional ruang kendali ATCS				-	-			95	95	96	96	16	96	
84		Pemeliharaan dan pengecatan marka jalan				-	-	8	8	95	95	98	91	96	91	
85		Pengadaan alat uji bermotor (Realokasi kegiatan th. 2012)				-	-	-	-	99	99	-	-	-	-	
86		Pemeliharaan dan pengecatan marka jalan (Realokasi kegiatan 2012)				-	-	-	-	98	98	-	-	-	-	
87		Pengadaan rambu lalu - lintas dan alat pengaman jalan				-	-	10	10	-	-	-	-	-	-	
88		Penyusunan program penetapan dan penyusunan pedoman penanggulangan SAR kelautan dan kebandarudaraan				-	-	96	99	-	-	-	-	-	-	
89		Pengadaan rambu lalu lintas dan alat pengaman jalan (Realokasi kegiatan th. 2012)				-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	
90		Pembangunan terminal kota tahap VII (terminal cargo) 2011				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
91		Program kegiatan dan fasilitas perhubungan				90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	
92		Sosialisasi pertanggung jawaban, pengelolaan keuangan dan fasilitas aparatur				96	96	-	-	-	-	-	-	-	-	



*Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021*

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian	Target Capaian	Rasio										Unit Penanggung Jawab
						2011		2012		2013		2014		2015		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
93		Penyelesaian dampak sosial pembangunan terminal penyangga pinang (Multiyears)				0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
94		Penunjang operasional ATCS				79	76	-	-	-	-	-	-	-	-	
95		Pemeliharaan Traffic Light				96	96	-	-	-	-	-	-	-	-	
IX		Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana fasilitas LLAJ														
96		Pembuatan marka dan rambu jalan kota samarinda (Bantuan keuangan propinsi tahun 2011)				0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
97		Penertiban terhadap angkutan pedagang kaki lima/PKL dengan patroli gabungan secara rutin oleh PPNS dan polisi				100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
X		Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor														
98		Lanjutan pembangunan gedung pengujian kendaraan bermotor jl. HM. Ardans				-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	
Jumlah						32	32	59	59	72	72	73	73	42	42	

Sumber: Database Sub Bagian Perencanaan Program Renstra Dishub Kota Samarinda Tahun 2011-2015



2.4.2 Hambatan dan Permasalahan Dinas Perhubungan

Seiring dengan penambahan jumlah penduduk Kota Samarinda yang mana membutuhkan peningkatan pelayanan di sektor perhubungan khususnya dibidang transportasi baik transportasi darat dan sungai, dalam upaya peningkatan pelayanan dibidang transportasi Dinas Perhubungan Kota Samarinda menghadapi hambatan dan permasalahan baik yang bersifat eksternal maupun internal, uraian hambatan dan permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

1. Hambatan dan Permasalahan Internal

Dalam upaya peningkatan pelayanan Dinas Perhubungan menghadapi beberapa hambatan dan permasalahan yang bersifat internal yang perlu diantisipasi, hambatan dan permasalahan internal yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Samarinda antara lain :

1. Gedung kantor yang kurang representatif sehingga menimbulkan permasalahan kurang tertatanya tempat kerja/ruang kerja yang baik dan nyaman, hal ini perlu adanya antisipasi dengan membangun / merehabilitasi gedung kantor;
2. Kurangnya tenaga-tenaga teknis, pada jabatan-jabatan teknis masih dijabat oleh aparatur yang tidak sesuai / belum memiliki kompetensi dibidangnya dan pemangku jabatan bukan berlatar belakang teknis yang sesuai dengan jabatan sehingga menimbulkan permasalahan kurangnya pemahaman pada bidang kerja sehingga menimbulkan hasil kinerja yang tidak maksimal;
3. Belum adanya jaminan kesehatan, kecelakaan dan lain-lain bagi petugas dilapangan khususnya yang berstatus honorer sehingga menimbulkan permasalahan kesejahteraan yang berdampak pada menurunnya kinerja petugas dilapangan;
4. Kurang tersedianya kendaraan operasional lapangan sehingga menimbulkan permasalahan kurang maksimalnya pengawasan dilapangan baik pengawasan parkir, pengawasan fasilitas LLAJ dan pengawasan lalu lintas di jalan dan disungai.

2. Hambatan dan Permasalahan Eksternal

Selain menghadapi hambatan dan permasalahan internal Dinas Perhubungan Kota Samarinda juga menghadapi hambatan dan permasalahan yang bersifat eksternal yang tentunya perlu diantisipasi, hambatan dan permasalahan eksternal Dinas Perhubungan Samarinda antara lain :

1. Kondisi perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat Samarinda yang baik, dengan indikator kepemilikan kendaraan pribadi yang meningkat baik roda dua maupun roda empat, berimbas pada minat penggunaan Jasa Angkutan Umum kota



yang menurun sehingga para pengusaha atau pemilik angkutan kota tidak dapat mencapai kondisi ideal secara ekonomi dalam usahanya sehingga tidak mampu untuk melakukan penggantian atau peremajaan armadanya;

2. Tidak seimbang pertumbuhan jumlah kendaraan dengan pertumbuhan infrastruktur jaringan jalan sehingga perbandingan *volume* dan kapasitas jalan (V/C Ratio) berdampak pada penundaan dan berpotensi terjadinya kemacetan lalu lintas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.20 Pertumbuhan Jumlah Kendaraan Tahun 2012-2015

No	Jenis Kendaraan	Jumlah Unit			
		2012	2013	2014	2015
1	Mobil Penumpang	42.870	45.496	160.684	177.134
2	Mobil Bus	780	746	2.620	3.377
3	Mobil Barang	27.625	28.112	99.803	104.226
4	Alat Berat	-	-	9.040	5.878
5	Sepeda Motor	295.130	300.357	1.121.539	1.098.328
	Total	366.405	374.711	1.393.686	1.388.943

Sumber : Database DISPENDA Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2015

Tabel 2.21 Infrastruktur Jaringan Jalan Tahun 2012-2014

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km)		
		2012	2013	2014
1	Kondisi Baik	450,50	351,89	159,63
2	Kondisi Sedang	81,25	444,79	247,34
3	Kondisi Rusak	184,15	74,55	152,07
4	Jalan Secara Keseluruhan (nasional, provinsi, dan kota)	883,99	871,34	651,342
	Total	1,599.89	1,742.57	1,210.382

Sumber : Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda, Tahun 2015



3. Belum tersedianya kantong-kantong parkir yang belum memadai sehingga berdampak pada aktifitas parkir tepi jalan yang tidak sesuai dengan fungsinya sehingga berpotensi terhadap ketidak disiplin berlalu lintas, kesemrautan berlalu lintas dan mengurangi kapasitas jalan, hal ini dapat diantisipasi dengan membangun kantong-kantong parkir dilahan terbuka atau membangun gedung parkir;
4. Fasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan dalam bentuk ZOSS, marka, rambu, RPPJ, Alat Pemberi Isarat Lalu Lintas (APILL) dan paku jalan serta pagar pengaman jalan (*guardrill*) belum sebanding dengan kebutuhan jaringan jalan yang terbangun, sehingga kondisi ini terkesan kurang optimalnya dalam memberikan informasi yang baik kepada masyarakat dalam berlalu lintas, hal ini dapat didukung dengan penganggaran yang proporsional;
5. Kurangnya partisipasi pengusaha angkutan sungai dan pengetahuan pemilik kapal di bidang pelayanan jasa angkutan sehingga tingkat kinerja pelayanan angkutan sungai sangat rendah dan kurang diminati masyarakat;
6. Seluruh pemilik kapal sungai sangat sulit diberikan pemahaman dikarenakan latar belakang pendidikan formal yang mereka miliki.

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

1. Tantangan Dalam Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

- a. Pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan tingkat pendidikan dan pendapatan
- b. Makin meningkatnya kemauan masyarakat akan pelayanan jasa transportasi yang handal, nyaman dan terjangkau
- c. Kebijakan yang tidak seiring dengan teori transportasi angkutan missal
- d. Pertumbuhan jenis kendaraan yang semakin meningkat, yang tidak seiring dengan ketersediaan lahan
- e. Pembebasan lahan
- f. Percepatan pembangunan ekonomi
- g. Munculnya kawasan-kawasan baru yang berbasis profit komersil
- h. Meningkatnya angka kecelakaan (khusus transportasi darat)
- i. Belum optimalnya pelayanan angkutan umum sehingga memberi dampak tingginya pengguna kendaraan pribadi.
- j. Kondisi tata ruang kota yang telah terbangun dengan dimensi dengan jalan yang sudah tidak sesuai dengan volume kendaraan yang terus meningkat



- k. Telah terbentuknya pola pikir masyarakat bahwa menggunakan kendaraan pribadi lebih efisien dari ada kendaraan umum
- l. Jaringan transportasi jalan yang ada telah di kelilingi kawasan pemukiman masyarakat sehingga terkendala dalam pembebasan lahan
- m. Berkurangnya kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah berdasarkan undang-undang No 23 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Perhubungan No 52 Tahun 2011 tentang alur pelayaran sungai
- n. Belum ditetapkannya dokumen tata ruang kota sebagai acuan atau pedoman perencanaan pembangunan daerah
- o. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak memadai.

2. Peluang dalam Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

- a. Dukungan kebijakan maupun pendanaan kegiatan dari pemerintah (walau masih terbatas) baik sumber dana APBN, Provinsi maupun APBD Kota sebagai faktor pendukung keberhasilan operasional pelayanan sektor transportasi
- b. Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima terhadap layanan publik perhubungan mendorong untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dan melakukan inovasi pelayanan
- c. Kebutuhan dasar dibidang infrastruktur perhubungan dalam upaya peningkatan layanan kepada masyarakat pengguna dan pemakai jasa perhubungan
- d. Masyarakat sangat mendambakan terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai, aman dan nyaman, sehingga layanan perhubungan mendapat perhatian dan penanganan yang optimal
- e. Kuantitas personil yang memadai
- f. Adanya kemauan para pemangku kepentingan dan stakeholder serta masyarakat, untuk dapat bertransportasi yang aman dan lancar
- g. Kondisi geografis yang masih belum padat penduduk dan atau terpakai secara utuh, masih memungkinkan untuk pengembangan kawasan transportasi
- h. Visi dan misi Walikota terpilih yang menempatkan peningkatan infrastruktur sebagai program prioritas.



BAB III

ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan

3.1.1 Permasalahan Sekretariat

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat, antara lain :

1. Kurangnya kompetensi dan jumlah Aparatur untuk mendukung kinerja pelayanan SKPD
2. Gedung kantor yang ada kurang representatif untuk mendukung pelayanan SKPD, suasana kerja dan tata ruang kantor kurang mendukung aparatur untuk bekerja maksimal
3. Sarana dan Prasarana Peralatan dan Pendukung Kantor, dan Sarana dan Prasarana Operasional yang ada kurang memadai baik secara kualitas dan kuantitas.

3.1.2 Permasalahan Bidang Lalu Lintas Jalan

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bidang Lalu Lintas Jalan, antara lain :

1. Belum adanya langkah konkrit terhadap pengendalian lalu lintas angkutan barang yang melebihi muatan sumbu terberat (MST) yang diijinkan
2. Fungsi ruas jalan yang berstatus jalan Nasional dan jalan Provinsi yang belum tertata sesuai fungsi dan peruntukannya, terkait rekayasa dan management lalu lintas
3. Masih banyaknya pemanfaatan ruang manfaat jalan (RUMAJA) dan ruang milik jalan (RUMIJA) yang dipergunakan tidak sesuai dengan fungsinya sehingga mengurangi kinerja jalan
4. Belum optimalnya penegakan atas aturan atau regulasi terhadap pergerakan lalu lintas angkutan jalan pada ruas jalan pada wilayah kota
5. Terbatasnya jumlah petugas penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) sehingga belum dapat optimal dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian baik di bidang lalu lintas angkutan jalan dan bidang lalu lintas angkutan sungai
6. Tingginya kasus pelanggaran lalu lintas sehingga perlu dilakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penindakan terhadap pelanggar ketentuan dalam berlalu lintas secara bersama-sama dengan instansi terkait



7. Belum optimalnya pelaksanaan tugas yang disebabkan terbatasnya sarana utama dalam pelaksanaan tugas dalam bentuk kendaraan operasional serta peralatan dan perlengkapan pendukung lainnya
8. Belum optimalnya koordinasi dalam hal penyeragaman tugas dan tanggung jawab serta kewenangan dengan instansi lainnya dalam pelaksanaan tugas di lapangan
9. Guna memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, Seksi Perparkiran memiliki beberapa permasalahan antara lain :
 - a. Belum optimalnya pembinaan terhadap para juru parkir sehingga sisi pelayanan dan pendapatan asli daerah belum mendapat hasil yang diharapkan, hal ini perlu dilakukan upaya pembekalan dan pembinaan sikap dan mental, serta teknis pelaksanaan tugas
 - b. Perbandingan petugas juru parkir dengan wilayah yang dilayani tidak sebanding sehingga diperlukan penambahan petugas sebagai juru parkir
 - c. Kurangnya ketersediaan pembangunan kantong parkir dan gedung parkir serta penerapan teknologi tepat guna yang dapat menampung sejumlah kendaraan sehingga aktifitas parkir tepi jalan dapat dikurangi secara drastis atau dihilangkan sama sekali
 - d. Kurangnya kendaraan operasional sehingga kinerja petugas tidak dapat optimal dan baik
 - e. Belum optimalnya peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait guna pembinaan dan peningkatan kinerja.

3.1.3 Permasalahan Bidang Prasarana

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bidang Prasarana, antara lain :

1. Belum optimalnya penyediaan fasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan sesuai dengan kebutuhan sehingga belum bisa memberikan kepastian dan keamanan serta informasi berlalu lintas secara baik dan optimal kepada masyarakat
2. Belum tersedianya rencana induk pengembangan transportasi sungai
3. Masih banyak terminal angkutan sungai yang belum memiliki studi lingkungan
4. Kurang tersedianya fasilitas penunjang berupa rambu-rambu navigasi, halte dan fasilitas lainnya untuk alur pelayaran
5. Adanya pemahaman yang berbeda antara Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dengan KM Perhubungan Nomor 58 Tahun 2007 terhadap penanganan kapal-kapal yang berlayar di perairan daratan



6. Belum adanya kepastian informasi berkaitan penanganan kerjasama dengan Pelindo dan KSOP untuk Terminal Peti Kemas Palaran dan Terminal Penumpang Umum
7. Belum terdatanya Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan galangan – galangan kapal yang berada dalam wilayah DLKp dan DLKr Pelabuhan Laut Samarinda
8. Belum optimalnya kegiatan pendataan dan inventrisasi terhadap fasilitas keselamatan dan keamanan di sektor perhubungan secara baik sehingga akan berdampak pada kurang optimalnya kinerja sektor perhubungan
9. Guna memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa angkutan umum di terminal, UPTD Terminal selaku pengelola terminal memiliki beberapa permasalahan antara lain :
 - a. Kurangnya kompetensi petugas terminal dalam pelaksanaan tugas
 - b. Kurangnya jumlah personi terminal yang proporsional
 - c. Belum memadainya fisik fasilitas utama dan pendukung terminal sehingga fungsi pelayanan kepada masyarakat dan penyedia jasa angkutan belum optimal.

3.1.4 Permasalahan Bidang Keselamatan

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bidang Keselamatan, antara lain :

1. Kurangnya kesadaran dan Kedisiplinan Masyarakat dalam berlalu lintas perlu ditingkatkan
2. Tingginya jumlah angka kecelakaan Lalu Lintas di jalan raya
3. Kondisi permukaan jalan yang memiliki kinerja kurang baik untuk digunakan untuk lalu lintas angkutan jalan dan kendaraan lainnya karena adanya kerusakan jalan dengan tingkat ringan, sedang hingga berat yang belum segera dilakukan perbaikan
4. Minimnya fasilitas keselamatan pelayaran transportasi sungai
5. Pendangkalan alur pelayaran transportasi sungai di beberapa titik (spot) sepanjang sungai
6. Sangat terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi keahlian di bidang sungai
7. Manajemen perusahaan angkutan umum yang masih konvensional atau tradisional
8. Belum dilaksanakannya investigasi dan audit pelayanan transportasi sungai
9. Belum terbentuknya Dewan Maritim Kota



10. Perlunya pemisahan kewenangan penanganan kapal – kapal GT 7 ke bawah dan GT 7 ke atas.
11. Untuk memberikan jaminan atas kelaikan kendaraan angkutan penumpang umum dan kendaraan barang yang beroperasi di jalan, Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor memiliki permasalahan dalam pelaksanaan tugas antara lain :
 - a. Sumber daya manusia berkualifikasi penguji dengan berbagai tingkatannya sesuai dengan kompetensinya sangat terbatas dan perlu dilakukan penambahan dengan cara penerimaan pegawai baru sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi dan / atau mengirimkan pegawai untuk mengikuti pendidikan kompetensi dimaksud
 - b. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas sehingga kecermatan dan keakuratan terhadap hasil pengujian kendaraan bermotor dapat tercapai
 - c. Belum optimalnya kecepatan dan efisiensi waktu serta keakuratan hasil pengujian pada pengujian kendaraan bermotor yang harus didukung dengan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

3.1.5 Permasalahan Bidang Angkutan

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bidang Angkutan, antara lain :

1. Berkurangnya minat masyarakat terhadap penggunaan jasa angkutan umum
2. Perlunya peningkatan dan pembinaan kepada para pemilik pengusaha serta operator lapangan dalam peningkatan kualitas pelayanan bagi angkutan umum agar dapat berkompetisi dalam persaingan pasar yang sehat
3. Koneksitas terhadap jaringan pelayanan angkutan umum yang belum terintegrasi dengan moda transportasi lainnya dengan baik sehingga berdampak pada pemborosan waktu biaya dan kondisi lainnya.
4. Kinerja pelayanan angkutan sungai yang masih rendah
5. Rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan jasa angkutan sungai
6. Belum terciptanya pelaporan angkutan sungai baik penumpang dan atau barang secara periodik
7. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam hal pengawasan teknis baik di transportasi jalan raya maupun transportasi sungai
8. Pengawasan dan pengendalian bagi kapal pada lalu lintas angkutan sungai belum optimal karena keterbatasan sarana dan fasilitas utama berupa kapal cepat dan kapal patrol.



3.2 Telaahan Visi dan Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pada dasarnya dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan penjabaran secara terperinci dari perencanaan pembangunan daerah Kota Samarinda, dengan demikian setiap tahapan-tahapan yang disusun dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Samarinda harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2016-2021.

Adapun Visi Kota Samarinda, yakni ***“TERWUJUDNYA KOTA SAMARINDA SEBAGAI KOTA METROPOLITAN YANG BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN”***.

Mengacu pada Visi Kota Samarinda tersebut, kemudian ditetapkan 6 (enam) Misi pembangunan Kota Samarinda Tahun 2016-2021 sebagai bentuk upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi tersebut. Adapun Misi Kota Samarinda, yakni :

1. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, bebas korupsi, ditunjang aparaturnya yang berintegritas tinggi, profesional dan inovatif;
2. Memantapkan kapasitas pengelolaan keuangan Kota Samarinda yang akuntabel dalam menunjang pembiayaan pembangunan;
3. Mewujudkan ruang kota yang layak huni;
4. Memantapkan sektor jasa dan perdagangan sebagai sektor unggulan;
5. Mewujudkan masyarakat Kota Samarinda yang berkarakter, sehat, cerdas, serta berdaya saing nasional dan internasional;
6. Mewujudkan iklim kehidupan masyarakat Kota Samarinda yang harmoni, berbudaya dan religious.

Apabila mengacu pada Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Samarinda periode Tahun 2016-2021, maka Dinas Perhubungan memiliki tugas pokok untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi daerah. Tugas pokok ini mencerminkan Misi ke 3 (tiga), yakni ***“Mewujudkan Ruang Kota yang Layak Huni”***. Salah satu agenda prioritas yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan masuk di agenda prioritas 4 (empat) Kepala Daerah, yaitu ***“Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur, Fasilitas Perkotaan dan Utilitas Penunjang Sektor Unggulan yang Berdaya Saing dan Berwawasan lingkungan”***. Dengan demikian tugas pokok Dinas Perhubungan dalam mendukung dan melaksanakan agenda prioritas 4 (empat) tersebut, yaitu ***“Meningkatnya Infrastruktur, Fasilitas Perkotaan dan Utilitas Kota”***. Sedangkan target RPJMD untuk mendukung meningkatnya infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas kota, yaitu :

1. Meningkatkan prasarana dan sarana darat, laut dan udara;



2. Berkurangnya titik kemacetan = turun 60%.

Dalam mewujudkan Misi ke 3 (tiga) Walikota dan Wakil Walikota, Dinas Perhubungan Kota Samarinda memiliki fungsi, yakni :

1. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas angkutan jalan, sungai dan penyeberangan serta rencana pelayanan sistem (jaringan) jalur perkeretaapian dan pengelolaannya, sarana prasarana kepelabuhan, keselamatan, pelayaran sungai dan laut, kebandarudaraan, pengendalian dan operasional transportasi umum baik keluar;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas angkutan jalan, sungai dan penyeberangan serta rencana pelayanan sistem (jaringan) jalur perkeretaapian dan pengelolaannya, sarana prasarana kepelabuhan, keselamatan, pelayaran sungai dan laut, kebandarudaraan, pengendalian dan operasional transportasi umum baik keluar;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Lingkungan Dinas Perhubungan;
4. Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan;
5. Pengawasan dan pengendalian bidang perhubungan;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
7. Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan;
8. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan

Agar terjadi sinkronisasi antara pembangunan perhubungan di Kota Samarinda dengan pembangunan perhubungan di tingkat provinsi dan Renstra Kementerian. Renstra Kementerian Perhubungan tahun 2015-2019 menyebutkan bahwa : Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dalam pembangunan sektor transportasi merujuk pada arah kebijakan pembangunan transportasi nasional yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Kebijakan dan strategi tersebut juga disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025 yang menjadi salah satu alur logis perencanaan pembangunan sektor transportasi berkelanjutan.



Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dikelompokkan menjadi 3 aspek, meliputi keselamatan dan keamanan, pelayanan serta kapasitas transportasi.

1. Keselamatan dan Keamanan

Keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi ditujukan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman pengguna transportasi serta menurunkan jumlah dan tingkat kecelakaan transportasi yang meliputi transportasi jalan, kereta api, pelayaran, dan penerbangan. Tingkat keselamatan dan keamanan transportasi diwujudkan melalui dua sasaran yaitu menurunnya angka kecelakaan transportasi, dan menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi.

1. Sasaran menurunnya angka kecelakaan transportasi dengan arah kebijakan meningkatkan keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi, melalui strategi:

a. Penguatan kelembagaan dalam peningkatan keselamatan transportasi

Keselamatan transportasi merupakan tanggung jawab berbagai pihak, baik pemerintah sebagai regulator maupun pelaku usaha sebagai operator. Saat ini fungsi pengawasan dan pembinaan keselamatan transportasi telah dilakukan pemerintah melalui kegiatan dan program peningkatan keselamatan, diharapkan fungsi pengawas keselamatan juga dilakukan di dunia usaha melalui pembentukan unit khusus yang menangani fungsi pengawas keselamatan;

b. Peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha di bidang keselamatan transportasi. Keselamatan transportasi merupakan keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan transportasi yang lancar sesuai dengan prosedur operasi dan persyaratan kelaikan teknis terhadap sarana dan prasarana beserta penunjangnya. Upaya peningkatan keselamatan transportasi telah dan akan terus dilakukan pemerintah melalui penyediaan sarana dan prasarana keselamatan serta sosialisasi keselamatan kepada masyarakat dan badan usaha. Peran serta masyarakat dan badan usaha dalam peningkatan keselamatan transportasi diwujudkan dalam peningkatan kepatuhan untuk mematuhi standar operasi dan prosedur penggunaan dan penyediaan sarana transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara;

c. Pendidikan dan peningkatan kesadaran penyelenggaraan transportasi yang berkeselamatan sejak usia dini. Pendidikan keselamatan transportasi secara dini dengan menfokuskan pada penanaman pengetahuan tentang tata cara transportasi yang berkeselamatan (*transfer of knowledge*) dan menanamkan nilai-nilai (*transform of values*) etika dan budaya tertib dan membangun



- perilaku pada generasi muda. Pribadi yang beretika mempunyai kecerdasan sosial yang tinggi dan kepekaan dalam bertansportasi, selain itu, juga akan mengerti pentingnya penggunaan peralatan dan prasarana keselamatan serta peraturan keselamatan;
- d. Peningkatan/pembaharuan regulasi terkini sesuai dengan standar keselamatan. Untuk memenuhi tuntutan perkembangan teknologi keselamatan transportasi diperlukan pembaharuan regulasi keselamatan yang mencakup norma, standar, prosedur dan kriteria;
 - e. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keselamatan transportasi sesuai dengan perkembangan teknologi. Upaya peningkatan keselamatan transportasi selain pengurangan tingkat kecelakaan yang disebabkan kesalahan manusia (*human error*) dilakukan juga strategi melalui pemenuhan kuantitas dan tingkat kehandalan sarana dan prasarana keselamatan transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara;
 - f. Pemenuhan standar keselamatan transportasi berupa perlengkapan keselamatan transportasi jalan dan perkeretaapian maupun perlengkapan navigasi pelayaran dan penerbangan. Selain upaya pemenuhan kualitas dan kuantitas keselamatan transportasi, penurunan tingkat kecelakaan juga dilakukan melalui strategi ketentuan pemenuhan standar keselamatan pada sarana dan prasarana transportasi sesuai standar nasional dan internasional.;
 - g. Peningkatan efektivitas pengendalian, pengaturan dan pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan transportasi. Dalam upaya pemenuhan standar keselamatan transportasi dilakukan melalui pemeriksaan atau audit secara berkala dan pelaksanaan random check yang meliputi standar keselamatan bidang prasarana, sarana, tata cara pengangkutan serta sumber daya manusia transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap peraturan standar keselamatan;
 - h. Peningkatan keandalan/kelaikan sarana dan prasarana transportasi melalui program pengujian dan sertifikasi sarana, prasarana termasuk fasilitas pendukung lainnya. Pengujian kehandalan/kelaikan sarana prasarana transportasi dilakukan secara berkala untuk menjamin tingkat kehandalan dan kecukupan peralatan keselamatan yang diikuti melalui penerbitan sertifikasi sarana dan prasarana termasuk fasilitas pendukung lainnya;
 - i. Peningkatan koordinasi pelaksanaan Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan (RUNK) serta Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan baik di tingkat nasional maupun daerah. RUNK adalah rencana keselamatan jalan jangka panjang yang diilhami oleh semangat *Decade of Action for Road Safety 2011-*



2020 Perserikatan Bangsa Bangsa yang dideklarasikan pada Maret 2010. Untuk itu maka 10 tahun pertama dari RUNK telah ditetapkan menjadi Dekade Aksi Keselamatan Jalan 2011-2020 dengan Instruksi Presiden No. 4/2013 tertanggal 11 April 2013. Dalam Inpres tersebut, disebutkan 5 Pilar Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan yang meliputi:

- a. Manajemen keselamatan jalan, dikoordinasikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas. Tanggung jawabnya adalah mendorong terselenggaranya koordinasi antar pemangku kepentingan dan terciptanya kemitraan sektoral;
- b. Jalan yang berkeselamatan, dikoordinasikan oleh Menteri Pekerjaan Umum;
- c. Kendaraan yang berkeselamatan, dikoordinasikan oleh Menteri Perhubungan;
- d. Perilaku pengguna yang berkeselamatan, dikoordinasikan oleh Kepala Kepolisian RI;
- e. Penanganan pra dan pasca kecelakaan, dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan.

Gerakan penurunan jumlah dan kualitas kecelakaan lalu-lintas di jalan melalui *Decade of Action* memiliki potensi mencapai sukses jika didorong oleh seluruh komponen masyarakat, industri, jalan dan transportasi secara terpadu.

- j. Koordinasi peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan. Perlintasan sebidang merupakan faktor kritis dalam penyelenggaraan kereta api mengingat banyaknya kejadian kecelakaan yang diterjadi di lokasi perlintasan. Berdasarkan pada amanat UU 23/2007, setiap perlintasan/perpotongan antara jalur kereta api dan jalan dibuat tidak sebidang. Pengecualian untuk pembangunan perlintasan tidak sebidang hanya dapat dilakukan dengan tetap menjamin keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api dan lalu lintas jalan dengan mengikuti ketentuan yang diatur pada Permenhub No. 36/2011, sehingga diperlukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah maupun operator perkeretaapian dalam penanganan perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan.
2. Sasaran menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi, melalui strategi antara lain :
- a. Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keamanan transportasi. Dalam upaya pemenuhan standar keamanan transportasi dilakukan melalui pemeriksaan atau audit secara berkala dan pelaksanaan random check yang meliputi standar keamanan bidang prasarana, sarana, tata cara pengangkutan serta sumber daya manusia transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap peraturan standar keamanan, serta



- pemberian sanksi kepada aparat pemerintah atau operator sarana/prasarana transportasi yang lalai dalam melaksanakan tugas;
- b. Pemenuhan standar keamanan transportasi berupa perlengkapan keamanan transportasi. Keamanan transportasi adalah keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan transportasi yang bebas dari gangguan dan/atau tindakan yang melawan hukum, langkah untuk mewujudkan keamanan transportasi melalui pemenuhan peralatan keamanan yang berupa alat pemidai barang-barang berbahaya dan alat pemidai jarak jauh dengan sistem terkoordinasi;
 - c. Pencegahan terhadap penyusupan barang-barang yang mengancam keamanan penumpang. Pelaksanaan pencegahan terhadap penyusupan barang yang mengancam keamanan penumpang selain dilakukan melalui pemenuhan peralatan keamanan juga didukung dengan kualitas SDM yang tersertifikasi dan diaudit secara berkala oleh aparat pengawas keamanan transportasi.

2. Pelayanan Transportasi

Dalam rangka meningkatkan pelayanan transportasi ditetapkan 7 sasaran, yaitu antara lain :

1. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi;
2. Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan;
3. Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan;
4. Meningkatnya kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance;
5. Meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan;
6. Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi;
7. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan clean governance. Masing-masing sasaran tersebut ditempuh melalui upaya strategi sebagai berikut :
 1. Sasaran meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi, dengan arah kebijakan meningkatkan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi, melalui strategi antara lain :
 - a. Peningkatan kehandalan sarana dan prasarana transportasi serta penataan jaringan/rute. Kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi dilakukan melalui rehabilitasi, pembangunan dan pengembangan prasarana perhubungan meliputi pembangunan terminal bus type A, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut, bandar udara dan jaringan jalan kereta api,



sedangkan kondisi sarana transportasi terus didorong untuk ditingkatkan kehandalannya antara lain peremajaan angkutan kota yang berbasis angkutan massal, peremajaan sarana kereta api, pembatasan usia kapal. Dalam rangka mewujudkan kinerja pelayanan juga dilakukan penataan rute pada angkutan laut untuk menjamin kepastian muatan dan kontinuitas angkutan laut antara wilayah barat Indonesia menuju wilayah timur Indonesia;

- b. Penyusunan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi. Standar pelayanan merupakan ukuran pelayanan yang harus dipenuhi oleh penyedia layanan dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa yang dilengkapi dengan tolok ukur sebagai acuan penilaian kualitas yang merupakan kewajiban dan janji penyedia layanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur;
 - c. Implementasi standar pelayanan publik pada sarana dan prasarana transportasi, termasuk penyediaan fasilitas bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus dan fasilitas yang responsif gender. Penyediaan layanan dan sarana transportasi yang berperspektif gender juga berarti mempertimbangkan dan mengakomodir permasalahan orang-orang atau kelompok masyarakat yang berkebutuhan khusus. Termasuk dalam hal ini adalah kebijakan perlindungan dan layanan transportasi bagi lansia, penyandang cacat, perempuan khususnya perempuan hamil dan balita. Penyediaan layanan dan sarana tersebut mempertimbangkan beberapa aspek yaitu aspek aksesibilitas, kenyamanan, keselamatan, keamanan dan keterjangkauan. Aspek keamanan sering menjadi persoalan bagi perempuan, anak-anak, lansia bahkan penyandang cacat. Layanan dan sarana transportasi seyogyanya dapat diakses secara aman oleh mereka termasuk aman dari segala tindak kriminalitas dan kekerasan seksual;
 - d. Konsistensi penerapan reward dan punishment terhadap ketepatan pelayanan. Pelayanan jasa transportasi selain mengutamakan keamanan dan keselamatan layanan, juga dituntut untuk tepat waktu dalam layanan yang dijanjikan. Untuk meningkatkan layanan transportasi diupayakan melalui penerapan sanksi berupa kewajiban yang harus dipenuhi setiap waktu keterlambatan dan apresiasi masyarakat terhadap layanan yang memenuhi standar pelayanan.
2. Sasaran terpenuhinya Sumber Daya Manusia transportasi dalam jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan, dengan arah kebijakan memenuhi sdm



transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan, ditempuh melalui strategi antara lain :

- a. Menyusun *Man Power Planning* Sumber Daya Manusia transportasi. Dalam rangka mencukupi sumber daya manusia (SDM) transportasi dalam jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dicapai melalui perencanaan tenaga kerja untuk mendapat tenaga kerja ahli yang kompeten di masa yang akan datang. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang jumlah dan kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia Perhubungan baik sumber daya manusia aparatur maupun non aparatur (masyarakat) yang akan digunakan sebagai data utama dalam penyelenggaraan berbagai program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan guna menyediakan dan mengembangkan sumber daya manusia Perhubungan sesuai dengan kebutuhan;
- b. Menyusun *Training Needs Analysis* (TNA) Sumber Daya Manusia transportasi. Dalam rangka mencukupi Sumber Daya Manusia (SDM) transportasi dalam jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dicapai melalui *Training Needs Analysis* (TNA) Sumber Daya Manusia transportasi agar pelaksanaan pelatihan dapat tepat sasaran, bukan hanya pelatihan yang sifatnya hanya untuk menggugurkan kewajiban ataupun instruksi yang kurang mendasar.

Diklat transportasi yang selama ini dilaksanakan masih belum sepenuhnya terkoordinasi dengan subsektor khususnya dalam menggali kebutuhan Sumber Daya Manusia baik kompetensi maupun kuantitas yang dibutuhkan, sehingga penyelenggaraan diklat yang dilaksanakan masih belum efektif, efisien dan tepat sasaran. Untuk kedepannya BPSDMP mengharapkan program diklat menjadi salah satu komponen utama dalam penentuan *man power planning* Sumber Daya Manusia Perhubungan, untuk itulah dibutuhkan penyusunan *Training Needs Analysis* (TNA);

- c. Mengembangkan kapasitas diklat Sumber Daya Manusia transportasi. Dalam upaya pengembangan kapasitas diklat dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana diklat melalui perbaikan, pembangunan, modernisasi dan optimalisasi sarana dan prasarana diklat. Perbaikan dan/atau pembangunan prasarana di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dapat dilakukan secara sistematis, terencana, terukur dan berkelanjutan, dengan indikator terpenuhinya standar sarana prasarana sesuai konvensi nasional dan internasional.



Strategi pembangunan sarana dan prasarana diklat dilakukan berdasarkan pertimbangan akan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan di wilayah NKRI baik untuk diklat transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian. Selain pembangunan kampus baru juga dilakukan pembangunan berupa pengembangan kampus di lingkungan UPT Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan guna meningkatkan kapasitas dalam pencapaian target pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia Transportasi. Untuk menunjang terselenggaranya diklat tersebut, BPSDM Perhubungan melakukan pengadaan, peningkatan dan rehabilitasi sarana diklat seperti alat praktek, simulator dan sarana penunjang lainnya yang berbasis IT khususnya elektronika seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tenaga pengajar dan metode diklat merupakan faktor penting lainnya dalam rangka pengembangan kapasitas diklat Sumber Daya Manusia transportasi. Tenaga pengajar di lingkungan BPSDM Perhubungan yang terdiri dari Dosen, Widyaiswara dan Instruktur perlu dilakukan *upgrading* skill dan kompetensi secara berkala guna mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan isu-isu transportasi dunia sehingga kualitas lulusan yang dihasilkan sesuai dengan harapan dan perkembangan dunia transportasi.

Selain itu, update metode diklat, baik kurikulum dan silabus perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi transportasi;

- d. Menata regulasi penyelenggaraan diklat Sumber Daya Manusia transportasi. Bentuk, struktur, sistem dan organisasi harus senantiasa menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi. Salah satu upaya penunjang untuk mengembangkan SDM Transportasi yaitu Restrukturisasi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan yang disertai dengan penyiapan regulasi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Sumber Daya Manusia transportasi;
- e. Meningkatkan tata kelola diklat dan kualitas lulusan. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan merupakan suatu organisasi yang bersifat dinamis, sehingga diperlukan upaya yang senantiasa memperhatikan dan menganalisis dinamika lingkungan strategis yang ada, baik isu strategis nasional dan isu strategis internasional.



Salah satu upaya penunjang untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia transportasi yaitu Restrukturisasi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang disertai dengan penyiapan regulasi. Restrukturisasi kelembagaan mencakup peningkatan status lembaga pendidikan serta pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) di seluruh UPT Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, peningkatan Balai Pendidikan dan Pelatihan menjadi Pendidikan Tinggi (Politeknik/Akademi), dan Eselonisasi atau penyempurnaan eselon (peningkatan eselon) untuk beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT), penyempurnaan organisasi Sekolah Tinggi menjadi Institut dan juga harus terbuka terhadap organisasi multimoda transportasi dalam rangka ikut mendukung sistem logistik nasional serta pembentukan unit dalam organisasi yang secara khusus menangani dan mengelola kinerja pegawai BPSDM Perhubungan;

- f. Meningkatkan penyerapan lulusan diklat transportasi. Peningkatan penyerapan lulusan diklat dapat dilakukan dengan melakukan inventarisasi data lulusan diklat transportasi melalui penyusunan database lulusan diklat di lingkungan BPSDM Perhubungan, serta upaya promosi dan sosialisasi secara optimal dalam skala yang lebih luas. Komitmen bersama dan kerjasama dengan stakeholder, baik dalam skala nasional maupun internasional perlu dilakukan sebagai salah satu upaya percepatan penyerapan lulusan diklat transportasi.

Berdasarkan kutipan arah kebijakan dan strategi pada Renstra Kementerian Perhubungan tahun 2014-2019, dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Samarinda memperhatikan 3 (tiga) aspek yaitu keselamatan dan keamanan, pelayanan, serta kapasitas transportasi. Selain itu pembangunan sarana dan prasarana harus memperhatikan masyarakat difabel dan kesetaraan gender.

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

Kebijakan Renstra Dinas perhubungan ditetapkan, secara cermat telah ditetapkan tujuan dan targettarget/sasaran pembangunan di setiap bidang/sector pembangunan. Merujuk kepada RPJPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2005-2025, sasaran pokok yang telah ditetapkan dalam kerangka pembangunan jangka panjang dibedah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia;



2. Terwujudnya struktur ekonomi yang handal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya;
3. Terwujudnya pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
4. Terwujudnya efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum;
5. Terwujudnya pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Apabila mengacu pada Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur periode 2013-2018, adapun Visi Provinsi Kalimantan Timur, yakni : ***“MEWUJUDKAN KALIMANTAN TIMUR SEJAHTERA YANG MERATA DAN BERKEADILAN BERBASIS AGRO INDUSTRI DAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN”***.

Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, termasuk politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander, 1994). Pembangunan juga dapat dipandang sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya (Portes, 1976). Ini berarti bahwa pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dipandang sebagai proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

Kesejahteraan sosial dan ekonomi merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spiritual yang memungkinkan bagi setiap masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur untuk memenuhi beberapa kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang baik bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, kesejahteraan tidak hanya dikaitkan pada konsep lahiriah saja, akan tetapi juga menjangkau sisi rohani seperti rasa aman, sentosa, makmur, sehat, dan selamat.

Elemen Visi Kaltim Sejahtera yang Merata dan Berkeadilan memandang lebih jauh dibanding aspek kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Melalui elemen visi ini, pemerintah ingin mencapai adanya keseimbangan antara kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keharmonisan antara pembangunan sosial - ekonomi dengan aspek lingkungan hidup yang kesemuanya diketahui saling mempengaruhi. Hal ini penting dilakukan karena pembangunan yang hanya berdasarkan pada pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan kesenjangan dalam masyarakat yang berakibat munculnya berbagai ketimpangan sosial seperti kemiskinan dan kerusakan lingkungan hidup yang merupakan dampak dari pembangunan ekonomi. Untuk mengatasi permasalahan ketimpangan tersebut, pembangunan daerah dengan pondasi ekonomi perlu diselaraskan dengan pembangunan sosial dan lingkungan hidup.



Pembangunan sosial sebagai suatu pendekatan pembangunan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara utuh dengan memenuhi kebutuhan fisik dan sosial. Pembangunan sosial juga lebih diarahkan kepada peningkatan keadilan bagi seluruh masyarakat. Jadi, pembangunan sosial Provinsi Kalimantan Timur dipandang sebagai proses pembangunan yang terencana dan selaras dengan pembangunan ekonomi yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang merata dan berkeadilan.

Elemen Visi Kaltim Sejahtera Yang Merata dan Berkeadilan pada intinya adalah pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat ini maupun masa datang melalui pemerataan pembangunan ekonomi yang bertumpu pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sedangkan berdasarkan data riil, kualitas sumber daya manusia Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan dimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2008 sebesar 74,52 dan meningkat menjadi 76,71 pada tahun 2012.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peran perencanaan sangat penting dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Perencanaan yang tepat akan mewujudkan Kota Samarinda menjadi kota tepian yang berbasis perdagangan, jasa dan industri yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu dalam penyusunan dokumen perencanaan sangat penting melihat aspek penataan ruang daerah secara komprehensif agar pelaksanaan pembangunan daerah tetap berada pada batas-batas kewajaran.

Dalam penyusunan dokumen perencanaan perlu diupayakan sebuah sinkronisasi terhadap pembinaan dan pengendalian pengembangan wilayah secara terpadu dan terintegrasi. Hal ini sesuai dengan upaya pemerintah daerah untuk mengubah struktur perekonomian Kota Samarinda. Salah satu perwujudan hal tersebut adalah dengan memformulasikan tujuan penataan ruang daerah sebagai acuan dalam setiap aspek perencanaan seperti penataan ruang yang mendukung Kota Samarinda sebagai menjadi kota tepian yang berbasis perdagangan, jasa dan industri yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda periode 2014-2034, Kota Samarinda mempunyai



tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan Kota Samarinda menjadi Kota Tepian yang berbasis perdagangan, jasa dan industri yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun konsep Kota Tepian yang dimaksudkan adalah kata Tepian yang tidak hanya menjadi Semboyan Kota Samarinda yang merupakan akronim dari Teduh, Rapi, Aman dan Nyaman tetapi juga cerminan dari Kota Samarinda yang terletak di daerah tepi sungai, yaitu bagian yang berbatasan langsung dengan air. Daya tarik Kota Samarinda sebagai Ibu kota Provinsi Kalimantan Timur mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya. Dengan prediksi Kota Samarinda akan berjumlah penduduk 1.057.671 jiwa (menjadi Kota Metropolitan karena diatas 1 juta penduduk) di tahun 2017 dan 1.388.466 jiwa di tahun 2023, membawa tantangan yang besar dalam pemenuhan kebutuhan penduduk akan lahan yang hanya tersedia 718 Km². Hal ini, sangat penting dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang kedepan sesuai dengan RTRW Kota Samarinda.

Tabel 3.1 Distribusi Penduduk Wilayah Kota Samarinda Tahun 2013 - 2033

No	Kecamatan	Jumlah	Rencana Distribusi Penduduk	
		2013	2017	2033
1	Palaran	54.353	71.352	93.668
2	Samarinda ilir	73.383	96.334	126.463
3	Sambutan	48.342	63.461	83.309
4	Samarinda Kota	36.604	48.052	63.081
5	Samarinda Seberang	63.715	83.642	109.802
6	Loa Janan Ilir	62.740	82.362	108.122
7	Sungai Kunjang	126.302	165.804	217.660
8	Samarinda Ulu	134.659	176.775	232.062
9	Sungai Pinang	105.695	138.752	182.148
10	Samarinda Utara	99.894	131.137	172.150
	Jumlah	805.687	1.057.671	1.388.466

Sumber: Revisi Materi Teknis dan Album Peta RTRW Kota Samarinda Tahun 2014-2034

Untuk merealisasikan program-program perencanaan pembangunan daerah serta keterpaduan antara program/kegiatan dan sasaran pembangunan berbasis kewilayahan maka perlu mempertimbangkan strategi arah kebijakan penataan ruang Kota Samarinda sebagai berikut :

- Meningkatkan akses pelayanan regional dan internasional sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang merupakan bagian dari kawasan perkotaan Balikpapan - Tenggarong - Samarinda - Bontang dan sebagai bagian dari Kapet Sasamba;
- Perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang bersinergi, efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi daerah sebagai kota tepian;
- Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kota;



- d. Peningkatan peran kota tepian yang ditunjang oleh kegiatan industri, pertanian, perikanan, perdagangan/jasa dan pariwisata;
- e. Pemantapan kelestarian kawasan lindung untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan;
- f. Pengembangan kegiatan budidaya untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan hijau serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- g. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Samarinda juga harus mengacu pada RTRW Provinsi Kalimantan Timur. Rencana jaringan prasarana berdasarkan Raperda RTRW Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Sistem Jaringan Prasarana Utama

Sistem Jaringan Prasarana Utama diarahkan untuk menunjang kegiatan ekonomi dan sosial-budaya penduduk, yang dikembangkan berdasarkan pada struktur kota yang akan dibentuk serta untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten/kota dengan kabupaten/kota di sekitarnya. Sistem jaringan prasarana utama terdiri atas:

• Sistem Jaringan Transportasi Darat

Sistem jaringan transportasi darat meliputi: 1) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; dan 2) Jaringan transportasi sungai, danau dan penyebrangan.

Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan terbagi menjadi: 1) Jaringan Jalan; dan 2) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Jaringan jalan meliputi: 1) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan arteri primer; 2) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan kolektor primer 1 (K-1); 3) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan kolektor primer 2 (K-2); 4) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan kolektor primer 3 (K-3); dan 5) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan bebas hambatan. Sedangkan Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan terdiri atas: 1) Pembangunan dan pemeliharaan terminal penumpang tipe A; dan 2) Pembangunan dan pemeliharaan terminal penumpang tipe B.

Sistem jaringan transportasi sungai, danau dan penyebrangan, meliputi: 1) Pemeliharaan pelabuhan dan alur pelayaran angkutan sungai dan danau; 2) Pemeliharaan pelabuhan dan alur pelayaran lintas penyebrangan; dan 3) Pembangunan dermaga sebagai pusat-pusat pergantian antar moda untuk mengintegrasikan jalur transportasi angkutan sungai dengan angkutan jalan serta angkutan sungai dengan angkutan laut.

• Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian



Sistem jaringan transportasi perkeretaapian meliputi 1) Jaringan dan layanan kereta api; 2) Stasiun kereta api; dan 3) Sistem persinyalan, telekomunikasi dan kelistrikan.

Jaringan dan Layanan Kereta Api meliputi: 1) Pembangunan jaringan dan layanan kereta api lintas utama antarkota dengan prioritas tinggi; 2) Pembangunan jaringan dan layanan kereta api yang menghubungkan wilayah sumberdaya alam atau kawasan produksi dengan pelabuhan; 3) Pembangunan jaringan dan layanan kereta api lintas antar-kota yang menghubungkan dengan potensi batubara, dan 4) Pengembangan jaringan dan layanan kereta api perintis.

Stasiun Kereta Api meliputi: 1) Pembangunan dan pemeliharaan stasiun kereta api kelas besar; 2) Pembangunan dan pemeliharaan stasiun kereta api kelas sedang; dan 3) Pembangunan dan pemeliharaan stasiun kereta api kelas kecil.

- **Sistem Jaringan Transportasi Laut**

Sistem jaringan transportasi laut terdiri atas: 1) Tatanan kepelabuhanan; dan 2) Alur pelayaran.

Tatanan Kepelabuhanan terdiri atas pelabuhan umum. Pelabuhan umum terdiri atas: 1) Pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan utama; 2) Pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan pengumpul; dan 3) Pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan.

Alur Pelayaran meliputi: 1) Pemeliharaan alur pelayanan kapal barang; dan 2) Pemeliharaan alur pelayaran kapal penumpang.

- **Sistem Jaringan Transportasi Udara**

Sistem jaringan transportasi laut terdiri atas tatanan kebandarudaraan. Tatanan kebandarudaraan terdiri atas: 1) Pembangunan dan pemeliharaan bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer; 2) Pembangunan dan pemeliharaan bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder; 3) Pembangunan dan pemeliharaan bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier; 4) Pembangunan dan pemeliharaan bandar udara pengumpan.

2. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

- **Sistem Jaringan Energi**

Sistem jaringan energi. Sistem ini dimaksudkan untuk menunjang penyediaan energy listrik dan pemenuhan energi lainnya. Sistem jaringan energi terdiri dari: 1) Pembangkit tenaga listrik; 2) Gardu Induk; 3) Jaringan transmisi tenaga listrik; dan 4) Jaringan pipa minyak dan gas bumi.



Pembangkit Tenaga Listrik terdiri atas: 1) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan pembangkit listrik; 2) Pembangunan PLTA di berbagai lokasi sungai potensial; dan 3) pengembangan listrik pedesaan.

Gardu Induk terdiri atas: 1) Pemeliharaan; dan 2) Pengembangan listrik pedesaan.

Jaringan Transmisi Tenaga Listrik terdiri atas: 1) Pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik yang menghubungkan sistem Samarinda-Balikpapan; dan 2) Pengembangan jaringan Saluran Udara tegangan Tinggi (SUTT) 150kV.

Jaringan Pipa Minyak dan Gas Bumi terdiri atas: 1) Pengembangan dan pemeliharaan jaringan pipa gas bumi nasional; dan 2) Pengembangan jaringan pipa gas di daratan dan perairan yang menghubungkan sumur-sumur migas ke unit pengolahan, penyimpanan, pemanfaatan, termasuk jaringan gas kota dari sumur gas ke pemukiman penduduk.

- **Sistem Jaringan Telekomunikasi**

Sistem ini adalah perangkat komunikasi dan pertukaran informasi yang dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengambilan keputusan dan peningkatan kualitas pelayanan publik ataupun privat. Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi terdiri atas: 1) Jaringan terrestrial; 2) Jaringan nirkabel; dan 3) Jaringan satelit.

Diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan kemudahan akses yang diharapkan menjangkau wilayah pelosok pedesaan melalui desa berdering (*ringing village*) dan desa pintar (*smart village*), pengembangan tower BTS (*Base transceiver Station*) secara bersama-sama, dan pengembangan dan kemudahan jaringan telematika di daerah terpencil. Peningkatan pelayanan telekomunikasi dengan sistem jaringan satelit perlu direncanakan penataan lokasi BTS yang diatur dalam peraturan tersendiri.

- **Sistem Jaringan Sumber Daya Air**

Sistem jaringan sumber daya air meliputi: 1) Pengelolaan daerah aliran sungai, konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air berdasarkan pembagian kewenangan wilayah sungai; 2) Pengembangan dan pengelolaan daerah irigasi yang di prioritaskan; 3) Pengembangan dan pengelolaan daerah rawa dan tambak nasional yang diprioritaskan; 4) Pengembangan dan pengelolaan daerah rawa dan tambak provinsi yang diprioritaskan; dan 5) Pengembangan dan pengelolaan bangunan penyedia air baku, bangunan pengendali banjir, bangunan konservasi, dan PLTA/PLTMH.



Untuk mencapai Tujuan Penataan Ruang 20 tahun mendatang, terdapat kebijakan penataan ruang dan rencana sistem pusat pelayanan kota. 7 (Tujuh) Kebijakan penataan ruang yang dimaksud yaitu:

1. Meningkatkan akses pelayanan regional dan internasional sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang merupakan bagian dari kawasan perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang dan sebagai bagian dari Kapet Sasamba;
2. Perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang bersinergi, efektif, dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi daerah sebagai Kota Tepian;
3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kota;
4. Peningkatan peran kota tepian yang ditunjang oleh kegiatan industri, pertanian, perikanan, perdagangan/jasa, dan pariwisata;
5. Pemantapan kelestarian kawasan lindung untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan;
6. Pengembangan kegiatan budidaya untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
7. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Kebijakan penataan ruang, di dukung oleh adanya program yang mendukung kebijakan itu terlaksana. Berikut ini adalah tabel indikasi program RTRW Kota Samarinda disertai besaran dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan waktu pelaksanaan program.

Tabel 3.2 Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota

Pusat Pelayanan Kota (PPK)	Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK)	Pusat Lingkungan (PL)
1. Sebagian Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis; 2. Sebagian Kecamatan Samarinda Ulu, di Kelurahan Sidodadi.	1. Sub pusat pelayanan kota I berfungsi sebagai perdagangan dan jasa skala kota di Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran dan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir; 2. Sub pusat pelayanan kota II berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan, di Kecamatan Palaran,	1. Pusat Lingkungan I di Kelurahan Sempaja Utara dan sebagian Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara; 2. Pusat Lingkungan IIdi Kelurahan Temindung Permai, Kelurahan Bandara dan sebagian Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang; 3. Pusat Lingkungan III di Kelurahan Sidodadi,



Pusat Pelayanan Kota (PPK)	Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK)	Pusat Lingkungan (PL)
	<p>Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Loa Janan Iilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Samarinda Iilir, Kecamatan Sambutan, Kecamatan Sungai Kunjang, Kecamatan Sungai Pinang dan Kecamatan Samarinda Utara.</p>	<p>Kelurahan Gunung Kelua, Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Air Putih, Kelurahan Teluk Lerong Iilir, dan sebagian Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu;</p> <p>4. Pusat Lingkungan IV di Kelurahan Karang Mumus, Kelurahan Pelabuhan, Kelurahan Pasar Pagi, Kelurahan Bugis, Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota;</p> <p>5. Pusat Lingkungan V di Kelurahan Pelita, Kelurahan Sungai Dama, dan sebagian Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Iilir;</p> <p>6. Pusat Lingkungan VI di Kelurahan Sambutan dan sebagian Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan;</p> <p>7. Pusat Lingkungan VII di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kelurahan Karang Asam Iilir, Kelurahan Loa Bakung dan sebagian Kelurahan Loa Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;</p> <p>8. Pusat Lingkungan VIII di Kelurahan Sengkotek dan sebagian Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Iilir;</p> <p>9. Pusat Lingkungan IX di Kelurahan Mesjid, Kelurahan Sungai Keledang, Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang;</p> <p>10. Pusat Lingkungan X di</p>



Pusat Pelayanan Kota (PPK)	Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK)	Pusat Lingkungan (PL)
		Kelurahan Rawa Makmur, Kelurahan Bukuan, dan sebagian Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran.
Sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala regional	Sub Pusat Pelayanan Kota dilengkapi dengan sarana lingkungan perkotaan skala pelayanan kota yaitu sarana perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, peribdatan dan sarana pelayanan umum.	Pusat lingkungan kota dilengkapi sarana lingkungan perkotaan skala pelayanan lingkungan.

Sumber: Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 2 Tahun 2014 tentang RTRW Kota Samarinda Tahun 2014-2034

Pengembangan sistem kota-kota secara umum diarahkan untuk mencapai keseimbangan perkembangan ruang antar pusat-pusat permukiman atau pusat pertumbuhan. Adanya peningkatan hierarki serta pengembangan fungsi memberikan implikasi terhadap kebutuhan sarana dan prasarana perkotaan untuk mendukungnya. Untuk mengembangkan kota-kota di Kota Samarinda baik hierarki maupun fungsinya, maka diperlukan kebijaksanaan pengembangan menurut potensi per kecamatan seperti di tabel dibawah ini :



Tabel 3.3 Potensi Pengembangan Wilayah Per Kecamatan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda

No.	Kecamatan	Rencana Pengembangan Wilayah	
		Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
1.	Samarinda Ulu	a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota	<p>a) Pusat Pelayanan Kota (PPK) Sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala regional di sebagian Kecamatan Samarinda Ulu, di Kelurahan Sidodadi.</p> <p>b) Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan.</p> <p>c) Pusat Lingkungan III Berada di Kelurahan Sidodadi, Gunung Kelua, Air Hitam, Air Putih, Telok Lerong Ilir, dan sebagian Kelurahan Jawa.</p>
		b. Rencana Struktur Ruang Wilayah	<p>a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Rencana sistem jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, dan sistem jaringan perkereta apian.</p> <p>b) Rencana Sistem Jaringan Prasarana lainnya Sistem jaringan energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi banjir, jalur evakuasi longsor, jalur evakuasi kebakaran).</p>
		c. Rencana Pola Ruang Wilayah	<p>a) Kawasan Lindung Ruang Terbuka Hijau Publik, Ruang Terbuka Hijau Privat, Kawasan Rawan Banjir dan Kawasan Longsor.</p> <p>b) Kawasan Budidaya Kawasan perumahan kepadatan sedang, perdagangan dan jasa skala (regional dan kota, kawasan, pada pusat-pusat lingkungan), kawasan perkantoran swasta, pariwisata buatan, industri kecil dan makro, kawasan Ruang Terbuka Non Hijau, Kawasan Peruntukan Ruang Evakuasi (banjir dan longsor), kawasan pengolahan ikan, Kawasan peruntukan lainnya (pertambangan, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota di kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda).</p>



No.	Kecamatan	Rencana Pengembangan Wilayah	
		Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
2.	Samarinda Ilir	a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota	<p>a) Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan.</p> <p>b) Pusat Lingkungan V Berada di Kel. Pelita, Sungai Dama, dan sebagian Kel. Selili</p>
		b. Rencana Struktur Ruang Wilayah	<p>a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan.</p> <p>b) Sistem Jaringan Prasarana Lainnya Energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi banjir, jalur evakuasi longsor, jalur evakuasi kebakaran).</p>
		c. Rencana Pola Ruang Wilayah	<p>a) Kawasan Lindung Kawasan perlindungan setempat, (sempadan sungai), RTH (Publik danPrivat), kawasan rawan bencana alam (longsor)</p> <p>b) Kawasan Budidaya Kawasan perumahan kepadatan rendah, perdagangan dan jasa pada pusat-pusat lingkungan, kawasan perkantoran swasta, pariwisata buatan, industri (kecil dan makro, sedang dan menengah, dan industri besar), kawasan Ruang Terbuka Non Hijau, Kawasan Peruntukan Ruang Evakuasi (banjirdan longsor), Kawasan peruntukan lainnya (pertambangan, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota di kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda)</p>



No.	Kecamatan	Rencana Pengembangan Wilayah	
		Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
3.	Samarinda Kota	a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota	<p>a) Pusat Pelayanan Kota (PPK) Sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala regional di sebagian Kecamatan Samarinda Kota , Kelurahan Bugis.</p> <p>b) Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan.</p> <p>c) Pusat Lingkungan IV Berada di Kelurahan Karang Mumus, Pelabuhan, Pasar Pagi, Bugis, dan Sungai Pinang Luar.</p>
		b. Rencana Struktur Ruang Wilayah	<p>a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan.</p> <p>b) Sistem Jaringan Prasarana Lainnya Sistem jaringan energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi banjir, jalur evakuasi kebakaran)</p>
		c. Rencana Pola Ruang Wilayah	<p>a) Kawasan Lindung Kawasan perlindungan setempat (sempadan sungai), RTH (Publik dan Privat)</p> <p>b) Kawasan Budidaya Kawasan perumahan kepadatan rendah, perdagangan dan jasa skala (regional dan kota, kawasan, pada pusat-pusat lingkungan), kawasan perkantoran swasta, pariwisata buatan, industri kecil dan makro, kawasan Ruang Terbuka Non Hijau, Kawasan Peruntukan Ruang Sektor Informal, Kawasan Peruntukan Ruang Evakuasi Bencana (Banjir), Kawasan peruntukan lainnya (hankam, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota di kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda dan kawasan perdagangan Citra Niaga.</p>



No.	Kecamatan	Rencana Pengembangan Wilayah	
		Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
4.	Samarinda Seberang	a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota	<p>a) Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan.</p> <p>b) Pusat Lingkungan IX Berada di Kelurahan Masjid, Sungai Keledang, Baqa.</p>
		b. Rencana Struktur Ruang Wilayah	<p>a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan.</p> <p>b) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya Energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi banjir, jalur evakuasi kebakaran)</p>
		c. Rencana Pola Ruang Wilayah	<p>a) Kawasan Lindung Kawasan perlindungan setempat, (sempadan sungai), RTH (Publik dan Privat).</p> <p>b) Kawasan Budidaya Kawasan perumahan kepadatan tinggi, perdagangan dan jasa berskala kawasan, kawasan perkantoran (pemerintah dan swasta), pariwisata (sejarah budaya dan buatan), industri (sedang dan menengah, dan industri besar), Kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana (banjir), Kawasan peruntukan lainnya (perikanan, pertambangan, hankam, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota dari sudut pandang lingkungan (kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda) dan sosial budaya (kawasan Kota Lama di Kec. Samarinda Seberang).</p>



No.	Kecamatan	Rencana Pengembangan Wilayah	
		Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
5.	Samarinda Utara	a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota	<p>a) Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan.</p> <p>b) Pusat Lingkungan I Berada di Kelurahan Sempaja Utara, dan sebagian Kelurahan Sempaja Selatan.</p>
		b. Rencana Struktur Ruang Wilayah	<p>a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan, Sistem jaringan perkereta-apian, sistem jaringan transportasi udara.</p> <p>b) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya Energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi banjir).</p>
		c. Rencana Pola Ruang Wilayah	<p>a) Kawasan Lindung Kawasan perlindungan pada kawasan di bawahnya (kawasan resapan air), Kawasan perlindungan setempat (embung), Kawasan Cagar Alam (KRUS Unmul), RTH (Publik dan Privat).</p> <p>b) Kawasan Budidaya Kawasan perumahan kepadatan sedang, perdagangan dan jasa pada pusat-pusat lingkungan, pariwisata (alam, sejarah budaya dan buatan), industri (kecil dan mikro), RTNH, Kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana (banjir), Kawasan peruntukan lainnya (pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, hankam, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota dari sudut pandang lingkungan (KRUS dan kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda) dan sosial budaya (kawasan pariwisata Budaya Desa Pampang).</p>



No.	Kecamatan	Rencana Pengembangan Wilayah	
		Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
6.	Sungai Kunjang	a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota	<p>a) Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan.</p> <p>b) Pusat Lingkungan I Berada di Kelurahan Telok Lerong Ilir, Karang Asam Ulu, Karang Asam Ilir, Loa Bakung dan sebagian Kelurahan Loa Bahu.</p>
		b. Rencana Struktur Ruang Wilayah	<p>a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan, Sistem jaringan perkereta-apian.</p> <p>b) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya Energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi banjir).</p>
		c. Rencana Pola Ruang Wilayah	<p>a) Kawasan Lindung Kawasan perlindungan setempat (sempadan sungai), RTH (Publik dan Privat).</p> <p>b) Kawasan Budidaya Kawasan perumahan kepadatan sedang, perdagangan dan jasa berskala (kawasan dan pusat-pusat lingkungan), perkantoran pemerintah, pariwisata (sejarah budaya dan buatan), industri (kecil dan mikro; sedang –menengah, besar), RTNH, Kawasan peruntukan lainnya (pertanian, perikanan, pertambangan, hankam, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota dari sudut pandang lingkungan (kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda).</p>



No.	Kecamatan	Rencana Pengembangan Wilayah	
		Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
7.	Sungai Pinang	a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota	<p>a) Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan.</p> <p>b) Pusat Lingkungan II Berada di Kelurahan Temindung Permai, Bandara, dan sebagian Kelurahan Sungai Pinang Dalam.</p>
		b. Rencana Struktur Ruang Wilayah	<p>a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan).</p> <p>b) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya Energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi banjir).</p>
		c. Rencana Pola Ruang Wilayah	<p>a) Kawasan Lindung RTH (Publik dan Privat), Kawasan Rawan Bencana Alam (Banjir).</p> <p>b) Kawasan Budidaya Kawasan perumahan kepadatan sedang, perdagangan dan jasa pada pusat-pusat lingkungan, pariwisata buatan, RTNH, Kawasan Peruntukkan Ruang Evakuasi Bencana, Kawasan peruntukkan lainnya (perikanan, pertambangan, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota dari sudut pandang lingkungan (kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda).</p>
8.	Sambutan	a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota	<p>a) Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan.</p> <p>b) Pusat Lingkungan VI Berada di Kelurahan Sambutan dan sebagian Kelurahan Makroman.</p>



No.	Kecamatan	Rencana Pengembangan Wilayah	
		Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
		<p>b. Rencana Struktur Ruang Wilayah</p>	<p>a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan.</p> <p>b) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya Energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi banjir).</p>
		<p>d. Rencana Pola Ruang Wilayah</p>	<p>a) Kawasan Lindung Kawasan Perlindungan Setempat (sempadan sungai), RTH (Publik danPrivat), Kawasan Rawan Bencana Alam (Banjir).</p> <p>b) Kawasan Budidaya Kawasan perumahan kepadatan tinggi, pariwisata buatan, (industri sedang-menengah dan besar), RTNH, Kawasan Peruntukkan Ruang Evakuasi Bencana (Banjir), Kawasan peruntukan lainnya (pertanian, peternakan,perikanan, pertambangan, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota dari sudut pandang lingkungan (kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda) dan Kawasan Strategis Kota dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi (Kawasan perdagangan dan jasa berskala kota di Kec. Sambutan).</p>
9.	Palaran	<p>a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota</p>	<p>a) Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Sub PPK I berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala kota di Kelurahan Rawa Makmur. Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan.</p> <p>b) Pusat Lingkungan X Berada di Kelurahan Rawa Makmur, Bukuan, dan sebagian Kelurahan Simpang Pasir.</p>



No.	Kecamatan	Rencana Pengembangan Wilayah	
		Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
		<p>b. Rencana Struktur Ruang Wilayah</p>	<p>a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan, Sistem Jaringan Transportasi Laut.</p> <p>b) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya Energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran).</p>
		<p>c. Rencana Pola Ruang Wilayah</p>	<p>a) Kawasan Lindung Kawasan Perlindungan Setempat (sempadan sungai), RTH (Publik dan Privat), Kawasan Rawan Bencana Alam (Banjir).</p> <p>b) Kawasan Budidaya Kawasan perumahan kepadatan tinggi, pariwisata alam dan buatan, (industri kecil - mikro dan besar), Kawasan peruntukan lainnya (pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, hankam, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota dari sudut pandang lingkungan (kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda) dan Kawasan Strategis Kota dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi (Kawasan industri di Kec. Palaran).</p>
10.	Loa Janan Ilir	<p>a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota</p>	<p>a) Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Sub PPK I berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala kota di Kelurahan Simpang Tiga. Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan.</p> <p>b) Pusat Lingkungan VIII Berada di Kelurahan Sengkotek dan sebagian Kelurahan Simpang Tiga.</p>



No.	Kecamatan	Rencana Pengembangan Wilayah	
		Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
		b. Rencana Struktur Ruang Wilayah	<p>a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan, Sistem Perkereta-apian.</p> <p>b) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya Energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran).</p>
		c. Rencana Pola Ruang Wilayah	<p>a) Kawasan Lindung RTH (Publik dan Privat) dan Kawasan Rawan Bencana Alam (Banjir).</p> <p>b) Kawasan Budidaya Kawasan perumahan kepadatan tinggi, perdagangan dan jasa pada pusat-pusat pelayanan lingkungan, pariwisata buatan, (sedang-menengah dan besar), Kawasan peruntukan lainnya (pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, hankam, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota dari sudut pandang lingkungan (kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda).</p>



Potensi Pengembangan Kota Samarinda berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda untuk 20 (dua puluh) tahun mendatang yaitu untuk perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, pariwisata, industri, ruang bagi sektor informal, pertambangan, pertahanan dan keamanan dan kawasan strategis kota seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4 Potensi Pengembangan Kota Samarinda

No	Arahan RTRW Kota	Rencana Pengembangan Wilayah
(1)	(2)	(3)
1.	Kawasan Peruntukan Perumahan	a. Kawasan peruntukan perumahan meliputi: a. kawasan perumahan kepadatan tinggi dengan luas kapling 200 M ² per unit; b. kawasan perumahan kepadatan sedang dengan luas kapling 300 M ² per unit; dan c. kawasan perumahan kepadatan rendah dengan luas kapling 500 M ² per unit. b. Kawasan perumahan kepadatan tinggi ditetapkan di Kecamatan Palaran, Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Loa Janan Ilir dan Kecamatan Sambutan, dengan luas 4.000 Ha. c. Kawasan perumahan kepadatan sedang ditetapkan di Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang dan Kecamatan Sungai Pinang, dengan luas 3.000 Ha. d. Kawasan perumahan kepadatan rendah ditetapkan di Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Samarinda Ilir dan Kecamatan Samarinda Utara, dengan luas 2.000 Ha.
2.	Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa	a. Pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa berskala regional dan kota di Kecamatan Samarinda Kota dan Kecamatan Samarinda Ulu. b. Pengembangan Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa berskala kawasan di Kelurahan Bugis, Kelurahan Sidodadi, Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Air Putih, Kelurahan Karang Asam Ilir, dan Kelurahan Baqa. c. Pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa pada pusat-pusat pelayanan lingkungan di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kelurahan Gunung Lingai, Kelurahan Temindung Permai, Kelurahan Sempaja Selatan, Kelurahan Sungai Dama, Kelurahan Karang Mumus, Kelurahan Sidomulyo, Kelurahan Pelabuhan, Kelurahan Pasar Pagi, Kelurahan Gunung Kelua, Kelurahan Karang Anyar, dan Kelurahan Sengkotek.
3.	Kawasan Peruntukan Perkantoran	a. Kawasan perkantoran pemerintahan terdapat di Kecamatan Sungai Kunjang dan Kecamatan Samarinda Seberang; b. Kawasan perkantoran swasta terletak menyatu dan/atau bercampur di antara kawasan perdagangan dan jasa yang berada di tiap-tiap sub pusat pelayanan kota di Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Kota, Samarinda Ilir dan Kecamatan Samarinda Seberang.
4.	Kawasan Peruntukan Pariwisata	a. Kawasan pariwisata alam meliputi: a. Lembah Hijau (Camping Ground Area) di Kecamatan Samarinda Utara; b. Kawasan Kebun Raya Unmul Samarinda di Kecamatan Samarinda Utara; c. Air Terjun Tanah Merah di



No	Arahan RTRW Kota	Rencana Pengembangan Wilayah
(1)	(2)	(3)
		<p>Kecamatan Samarinda Utara; d. Telaga Permai Batu Besaung di Kecamatan Samarinda Utara; e. Wisata Geologi di Kecamatan Palaran; f. Air Terjun Lubang Muda Pampang di Kecamatan Samarinda Utara; dan g. Waduk Jala Tunda di Kecamatan Samarinda Utara.</p> <p>b. Kawasan pariwisata sejarah budaya meliputi: Desa Wisata Pampang di Kecamatan Samarinda Utara; b. Pusat Pembuatan Tenun Sarung Samarinda di Kecamatan Samarinda Seberang; c. Makam Lamohang Daeng Mangkona bergelar Puo Ado di Kecamatan Samarinda Seberang; d. Tugu Makam Tentara Jepang Loa Buah di Kecamatan Sungai Kunjang; dan e. Tugu Makam Tentara Belanda Loa Buah di Kecamatan Sungai Kunjang.</p> <p>c. Kawasan pariwisata buatan meliputi: a. Islamic Centre di Kecamatan Sungai Kunjang; b. Masjid Kayu Tua di Kecamatan Samarinda Seberang; c. Wisata sungai di Sungai Mahakam dan Sungai Karang Mumus; d. Penangkaran Buaya Makroman di Kecamatan Sambutan; e. Kebun Binatang dan Taman Buru di Kecamatan Samarinda Utara; f. Pusat Cinderamata Citra Niaga di Kecamatan Samarinda Kota; g. Museum Geologi di Kecamatan Samarinda Utara; h. Kolam Renang/Water Boom Jessica Park di Kecamatan Samarinda Seberang; i. Kolam Renang Citraland di Kecamatan Samarinda Utara; j. Kolam Renang/Water Boom Alaya di Kecamatan Sungai Pinang; dan k. Kolam Pemancingan Tjiu Palace di Kecamatan Sambutan.</p>
5.	Kawasan Peruntukan Industri	<p>a. Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro meliputi: industri tahu tempe Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Ilir; industri gula semut di Kecamatan Samarinda Utara; industri amplang/pengolahan hasil perikanan di Kecamatan Sungai Kunjang, Palaran dan Samarinda Ilir; kerajinan manik di Kecamatan Sungai Kunjang, industri sapu ijuk di Kecamatan Sungai Kunjang.</p> <p>b. Kawasan peruntukan industri sedang dan menengah meliputi industri sarung tenun di Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Samarinda Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang dan Kecamatan Loa Janan Ilir; industri perkapalan kayu di Kecamatan Sambutan, Kecamatan Samarinda Ilir dan Kecamatan Sungai Kunjang, industri pengolahan hasil hutan di Kecamatan Loa Janan Ilir; industri kayu dan pengolahan hasil hutan di Kecamatan Loa Janan Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kecamatan Samarinda Ilir.</p> <p>c. Kawasan peruntukan industri besar berupa kawasan Industri Perkapalan Baja di Kecamatan Samarinda Ilir, Sambutan, Samarinda Seberang dan Palaran. Industri kayu dan pengolahan hasil hutan di Kecamatan Loa Janan Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kecamatan Samarinda Ilir dan Palaran.</p>



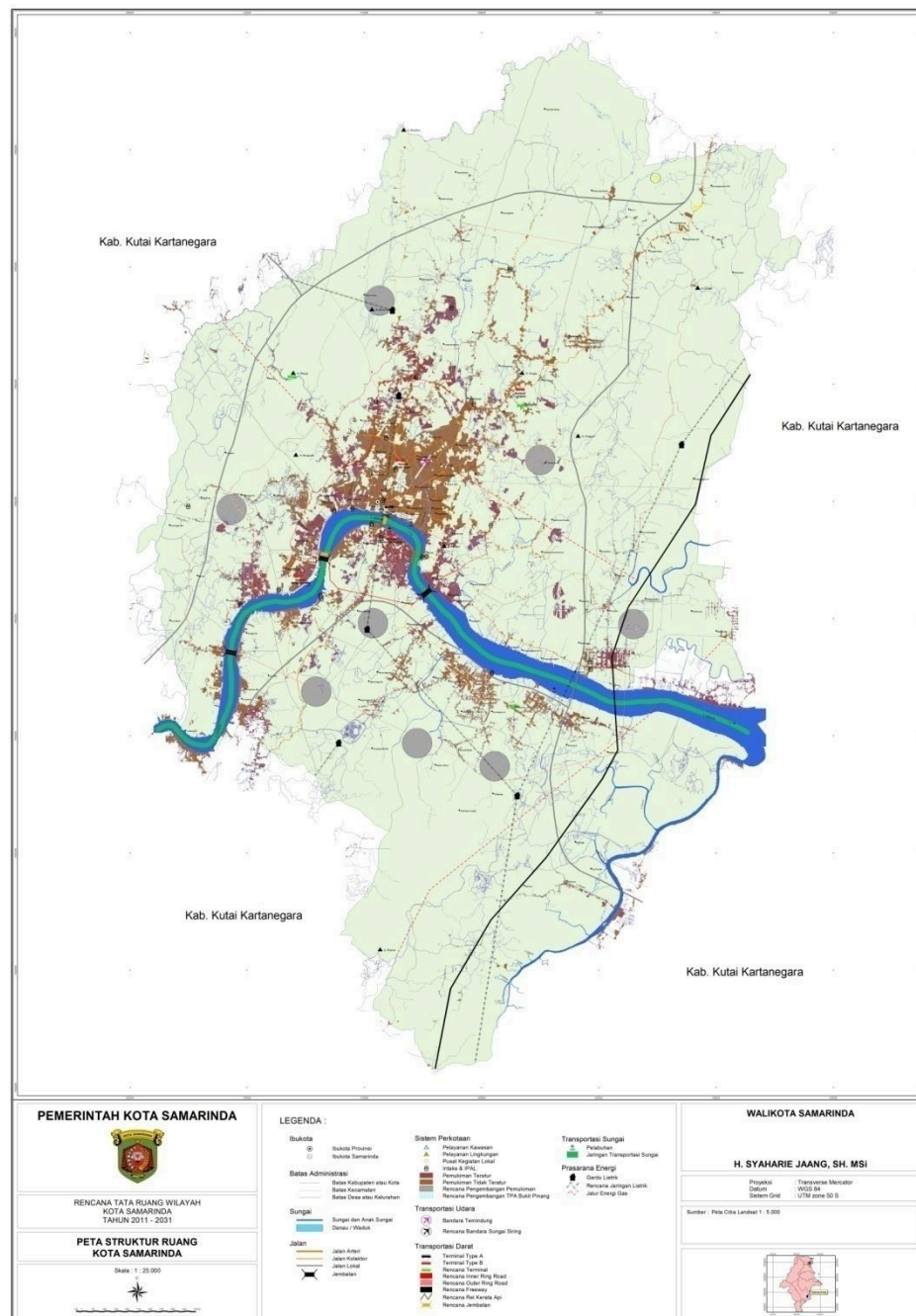
No	Arahan RTRW Kota	Rencana Pengembangan Wilayah
(1)	(2)	(3)
6.	Kawasan Peruntukan Ruang bagi Sektor Informal	Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal meliputi: Kawasan Citra Niaga di Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota.
7.	Kawasan Peruntukan Pertambangan	<p>a. Kawasan pertambangan kelompok batuan yang meliputi: 1. batu gunung yang terletak di Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Ilir dan Samarinda Utara; 2. tanah urug yang terletak di kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Ilir dan Samarinda Utara; dan 3. pasir sungai yang terletak di Kecamatan Lojangan Ilir dan Sambutan.</p> <p>b. Kawasan pertambangan kelompok batubara yang meliputi: 1. batubara yang ijinnya dikeluarkan oleh Kementerian ESDM terletak di Kecamatan Sambutan, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Samarinda Utara, Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Palaran dan Kecamatan Samarinda Ilir; dan 2. batu bara yang ijinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Samarinda.</p>
8.	Kawasan Peruntukan Pertahanan Keamanan	<p>a. Kompleks Kepolisian di Kecamatan Samarinda Kota dengan luasan sekitar 1 (satu) hektar di Kecamatan Samarinda Kota dan seluas kurang lebih 0,5 (nol koma lima) hektar di Kecamatan Sungai Kunjang.</p> <p>b. Kompleks Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan Samarinda Kota seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar, seluas kurang lebih 5 (lima) hektar di Kecamatan Samarinda Seberang dan tempat latihan militer seluas kurang lebih 8 (delapan) hektar di Kecamatan Samarinda Utara.</p> <p>c. Kawasan pertahanan : 1. Korem 091/Aji Surya Natakusuma di Kecamatan Samarinda Kota; Kodim 0901/Samarinda di Kecamatan Samarinda Kota; 3. Denpom-1, Denbekang VI-44-01, Denzibang-1, Denpal 06-12-03, Kecamatan Samarinda Ulu; 4. Pekas Gabrah 54 Na.2.08.05 di Kecamatan Samarinda Kota; 5. Koramil 01 di Kecamatan Samarinda Ulu; 6. Koramil 02 di Kecamatan Samarinda Utara; 7. Koramil 03 di Kecamatan Samarinda Seberang; 8. Koramil 04 di Kecamatan Palaran; 9. Kipan A, Kipan C Yonif 611/AWL di Kecamatan Loa Janan Ilir.</p>
9.	Kawasan Strategis Kota	<p>a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi: 1. Kawasan industri di Kecamatan Palaran. 2. Kawasan perdagangan Citra Niaga di Kecamatan Samarinda Kota; 3. Kawasan perdagangan dan jasa skala kota di Kecamatan Sambutan.</p> <p>b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi : 1. Kawasan Pariwisata Budaya Desa Pampang terletak di Kecamatan Samarinda Utara; 2. Kawasan Kota Lama di Kecamatan Samarinda Seberang.</p> <p>c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan meliputi: 1. Kawasan Kebun Raya Samarinda terletak di</p>



No	Arahan RTRW Kota	Rencana Pengembangan Wilayah
(1)	(2)	(3)
		<p>Kecamatan Samarinda Utara; 2. Kawasan Tepian Sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda.</p> <p>d. Kawasan Strategis dari sudut aksesibilitas tinggi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Industri Palaran; 2. Kotabaru berbasis industri Palaran; 3. Kota Baru Bekas Bandara Termindung; 4. Kawasan CBD di Pusat Kota; 5. Pusat Pemerintahan di Makroman; 6. Kawasan Wisata Lempake; 7. Kawasan Tepian Mahakam; 8. Kawasan Bandar Udara Sei Siring; 9. Pusat Pengembangan Samarinda Seberang.

Sumber: Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 2 Tahun 2014 tentang RTRW Kota Samarinda Tahun 2014-2034

Gambar 3.1 Peta Struktur Ruang Kota Samarinda





Tabel 3.5 Indikasi Program RTRW Kota Samarinda Tahun 2015-2025

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN (Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
						2015	2016	2017	2018	2019	2020 - 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Perwujudan Struktur Ruang										
1	Perwujudan Pusat Kegiatan										
1.1	Pusat Pelayanan Kota (PPK)	Kec. Samarinda Kota									
1.1.1	Penyusunan RDTR Kota Samarinda.	Wilayah Fungsional Kota Samarinda	900,000,000	APBD Kota Samarinda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
1.1.2	Penyediaan prasarana dan sarana perkotaan sesuai hirarki sehingga Pusat Kegiatan Permukiman (PKL, PPK, PPL) mampu berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya,			APBD Kota Samarinda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
1)	Penyusunan Masterplan Terminal	Kota Samarinda	600,000,000	APBD Kota Samarinda	Dinas Perhubungan						
2)	Penyusunan Manajemen Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan (Management Site Plan)	Kecamatan Samarinda Ulu	800,000,000	APBD Provinsi Kalimantan Timur	Dinas Tata Ruang dan Permukiman						
3)	Perluasan Pembebasan Lahan Pasar dan Terminal	Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Ilir dan Kecamatan Sungai Kunjang		APBD Kota Samarinda	Dinas Perhubungan dan Bagian Pemerintahan Umum						
4)	Penyusunan DED Pasar dan Terminal	Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Ilir dan Kecamatan Sungai Kunjang	500,000,000	APBD Kota Samarinda	Dinas Koperindag, Dishub, dan Distarkim						



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN (Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
						2015	2016	2017	2018	2019	2020 - 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5)	Penyusunan Masterplan Pengelolaan Sampah		750,000,000								
	DL L										
	1.2. Perwujudan Pusat Kegiatan Permukiman Perdesaan										
	1.2. 1. Penyusunan Masterplan Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D/DPP)	Tersebar di seluruh Kota Samarinda	1,500,000,000	APBD Kota Samarinda	Dinas Tata Ruang dan Permukiman						
	1.2. 2. Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D/DPP)	Tersebar di seluruh Kota Samarinda	2,500,000,000	APBD Kab. Tasikmalaya	Dinas Tata Ruang dan Permukiman						
	1.2. 3. Penyediaan prasarana dan sarana Desa Pusat Pertumbuhan sehingga Pusat Kegiatan Permukiman Perdesaan mampu berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya	Tersebar di seluruh Kota Samarinda	4,000,000,000	APBD Kota Samarinda	Dinas Tata Ruang dan Permukiman						
2	Perwujudan Sistem Prasarana Wilayah										
	2.1. Transportasi										
	a Peningkatan fungsi jalan	Tersebar di seluruh Kota Samarinda	100,000,000,000	APBD	Dinas Binamarga dan Pengairan						
	b Peningkatan/ Perbaikan jaringan Jalan Lokal	Kota Samarinda	70,000,000,000	APBD	Dinas Binamarga dan Pengairan						



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN (Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
						2015	2016	2017	2018	2019	2020 - 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	c Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Kota Samarinda	5,000,000,000	APBD Kota Samarinda	Dinas Binamarga dan Pengairan						
	d Program Pengembangan Pelayanan Air Minum	Kota Samarinda		APBD Kota Samarinda	PDAM						
	1) Pengembangan dan Pengelolaan air minum Pendukung PAMSIMAS	Kota Samarinda	300,000,000	APBD Kota Samarinda	PDAM						
	2) Pembangunan Prasarana DAN Sarana Air Bersih Perkotaan	Kota Samarinda	1,500,000,000	APBD Kota Samarinda	PDAM						
	2.2. Pembangunan Jaringan Telepon, Listrik	Kota Samarinda	7,000,000,000	APBD Kota Samarinda	PT. Telekomunikasi, PLN, Dinas Pertambangan						
	2.3. Penyusunan Masterpaln Telematika Penyediaan tower BTS (<i>Base Transceiver Station</i>) secara bersama	Kota Samarinda	900,000,000	APBD Kota Samarinda	Dinas Perhubungan						
B	Perwujudan Pola Ruang										
1	Perwujudan Kawasan Lindung										
	1.1. Sosialisai RTRW di lingkungan Eksekutif, Legislatif, dan Masyarakat	Kota Samarinda	300,000,000	APBD Kota Samarinda	Bappeda, Distarkim						
	1.2. Pemetaan Kondisi Kawasan Lindung, Lahan Kritis secara rinci/detail	Kota Samarinda	600,000,000	APBD Kota Samarinda	Dinas Kehutanan dan Perkebunan						
	Penataan Kawasan Cagar Budaya	Kec. Samarinda Seberang	850,000,000								
	1.3. Penanaman tanaman tahunan pada lahan kritis	Kota Samarinda	600,000,000	APBD Kota Samarinda	Dinas Kehutanan dan Perkebunan						



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN (Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
						2015	2016	2017	2018	2019	2020 - 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.4. Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kawasan lindung	Kota Samarinda	500,000,000	APBD Kota Samarinda	Bappeda, Distarkim, BKPRD						
	1.5. Pengembangan Pertanian lahan lahan kering	Kota Samarinda	750,000,000	APBD Kota Samarinda	Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian						
2	Perwujudan Kawasan Budidaya			APBD Kota Samarinda							
	2.1. Sosialisai RTRW di lingkungan Eksekutif, Legislatif, dan Masyarakat	Kota Samarinda	150,000,000	APBD Kota Samarinda	Bappeda, Distarkim						
	Pengembangan tanaman pangan dan palawija		2,200,000,000								
	Pengembangan tanaman hortikultur		2,650,000,000								
	Pengembangan peternakan	Kota Samarinda	1,550,000,000								
	Pengembangan perikanan		1,750,000,000								
	Pengembangan kawasan wisata alam		1,500,000,000								
	Pengembangan kawasan wisata tirta		1,250,000,000								
	Pengembangan kawasan wisata agro		1,650,000,000								
	Pengembangan kawasan wisata budaya,		850,000,000								
	Pengembangan kawasan Wisata Adventure Dan Arus Air		750,000,000								
	Pengembangan Kawasan agropolitan/agribisnis		2,500,000,000								



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN (Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
						2015	2016	2017	2018	2019	2020 - 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.2. Pengembangan pertanian lahan kering	Kota Samarinda	750,000,000	APBD Kota Samarinda	Bappeda, Distarkim						
	2.3. Pengembangan kawasan pertambangan berwawasan lingkungan pengembangan kawasan industry	Kota Samarinda	1,000,000,000	APBD Provinsi Kalimantan Timur, APBD Kota Samarinda	Dinas Pertambangan						
B	Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten										
	1.1. Penyusunan RDTR Kawasan Strategis	Kota Samarinda	2,000,000,000	APBD Kota Samarinda	Bappeda, Distarkim, Pariwisata						
	1.2. Penataan Kawasan Strategis Kota (KSK) dan Penyediaan Frasarana dan sarana pendukung	Kota Samarinda	5,000,000,000	APBD Kota Samarinda	Distarkim, Pariwisata, Koperindag						



Terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penataan ruang Kota Samarinda analisis mengenai daya dukung fisik dan lingkungan akan membantu menentukan arah kesesuaian peruntukan lahan sehingga tidak menimbulkan berbagai persoalan seperti :

- Kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan ketersediaan sumber daya terutama yang terkait dengan aspek geologi;
- Kegiatan pembangunan dengan skala prioritas yang tidak sesuai dengan daya dukung lingkungan sehingga sumber daya akan tereksplorasi secara berlebihan;
- Kegiatan pembangunan yang lokasinya rentan terhadap pencemaran dan degradasi lingkungan.

Secara khusus kebutuhan akan analisis daya dukung fisik kawasan Kota Samarinda dipengaruhi oleh beberapa persoalan yang sedang berkembang seperti :

- Alih fungsi lahan pertanian dan hutan menjadi kawasan pemukiman dan pertambangan;
- Ruang Terbuka Hijau (RTH) di beberapa kawasan sekitar Kota Samarinda sebagai daerah serapan dan penopang penanggulangan banjir.

Sebagian besar lahan di Kota Samarinda pada umumnya dimanfaatkan untuk penggunaan lahan kawasan terbangun seperti perumahan, pemukiman, perdagangan dan jasa, perkantoran serta fasilitas umum lainnya yang hampir tersebar di seluruh Kota Samarinda. Hal tersebut merupakan faktor penghambat dari pelayanan Bappeda terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis karena pemukiman yang ada meliputi pemukiman kumuh, perumahan kepadatan tinggi, sedang dan rendah merupakan salah satu sisi negatif dari pola penataan ruang.

KLHS dapat dimanfaatkan sebagai kerangka integratif bagi semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat. Secara umum, KLHS berfungsi untuk menelaah efek dan/atau dampak lingkungan yang akan ditimbulkan oleh Kebijakan, Rencana dan Program (KRP), sekaligus mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan SDGs memastikan pelestarian lingkungan.

Muatan KLHS yang relevan dengan isu-isu pembangunan berkelanjutan adalah:

- a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
- b. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup
- c. Kinerja layanan/ jasa ekosistem
- d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
- e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
- f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati



KLHS telah mengidentifikasi isu-isu strategis Kota Samarinda yaitu pengelolaan wilayah tepi sungai; kerusakan dan pencemaran lingkungan; sumber daya air; keanekaragaman hayati dan sosial ekonomi. Program tertuang dalam RTRW Kota Samarinda diprediksikan menimbulkan dampak terhadap isu-isu strategis termasuk berdampak terhadap kondisi lingkungan abiotik, biotik dan sosial ekonomi budaya.

Program-program yang tertuang dalam RTRW Kota Samarinda yang diprediksi menimbulkan dampak, yaitu pengembangan jalan tol Balikpapan–Samarinda; pembangunan jaringan jalur kereta api Balikpapan–Samarinda, pengembangan kawasan industri; pengembangan dermaga di Samarinda; pengelolaan kawasan pertambangan.

Mitigasi dampak dilakukan, diantaranya untuk: Mencegah kerusakan lingkungan yang dapat menghambat pembangunan Kota Samarinda di masa mendatang; mencegah marginalisasi kelompok tertentu; memastikan pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Monitoring dan evaluasi harus dilakukan untuk memantau implementasi rekomendasi KLHS secara regular.

Secara khusus kebutuhan akan analisis daya dukung fisik kawasan Kota Samarinda dipengaruhi oleh beberapa persoalan yang sedang berkembang seperti :

- Alih fungsi lahan pertanian dan hutan menjadi kawasan pemukiman dan pertambangan;
- Ruang Terbuka Hijau (RTH) di beberapa kawasan sekitar Kota Samarinda sebagai daerah serapan dan penopang penanggulangan banjir.

Sebagian besar lahan di Kota Samarinda pada umumnya dimanfaatkan untuk penggunaan lahan kawasan terbangun seperti perumahan, pemukiman, perdagangan dan jasa, perkantoran serta fasilitas umum lainnya yang hampir tersebar di seluruh Kota Samarinda. Hal tersebut merupakan faktor penghambat dari pelayanan Bappeda terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis karena pemukiman yang ada meliputi pemukiman kumuh, perumahan kepadatan tinggi, sedang dan rendah merupakan salah satu sisi negatif dari pola penataan ruang.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Memperhatikan kondisi dan sarana dan prasarana transportasi yang ada saat ini, isu strategis sektor Perhubungan Kota Samarinda yang menjadi prioritas pembangunan sarana dan prasarana transportasi untuk 5 (lima) tahun kedepan, yaitu :

1. Kurangnya kompetensi dan jumlah aparatur untuk mendukung kinerja pelayanan Dinas Perhubungan;



2. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana baik secara kuantitas dan kualitas untuk mendukung pelayanan Dinas Perhubungan;
3. Belum optimalnya penyelenggaraan administrasi untuk mendukung pelayanan Dinas Perhubungan;
4. Kurangnya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas;
5. Belum tersedianya kebijakan dan perencanaan pengelolaan transportasi kota;
6. Tingkat pelayanan transportasi darat yang belum sesuai harapan masyarakat pengguna jasa transportasi;
7. Belum optimalnya penyediaan fasilitas, perlengkapan dan keselamatan jalan sesuai dengan kebutuhan sehingga belum bisa memberikan kepastian dan keamanan serta informasi berlalu lintas secara baik dan optimal kepada masyarakat, baik secara kualitas dan kuantitas;
8. Belum optimalnya penegakan atas aturan atau regulasi terhadap pergerakan lalu lintas angkutan jalan pada ruas jalan pada wilayah kota;
9. Koneksitas terhadap jaringan pelayanan angkutan umum yang belum terintegrasi dengan moda transportasi lainnya dengan baik sehingga berdampak pada pemborosan waktu biaya dan kondisi lainnya;
10. Keselamatan transportasi dengan pengujian kelaikan pengoperasian kendaraan umum dan barang disertai penyediaan alat uji kendaraan bermotor yang memadai;
11. Belum optimalnya ketersediaan fasilitas dan sarana serta prasarana keselamatan pelayaran angkutan sungai;
12. Belum optimalnya kualitas pelayanan jasa angkutan sungai;
13. Keselamatan transportasi dengan pengujian kelaikan pengoperasian kapal angkutan sungai belum optimal;
14. Tingginya kasus pelanggaran terhadap peraturan lalulintas angkutan jalan dan sungai;
15. Belum optimalnya kualitas pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan lalulintas angkutan jalan dan sungai.



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Perhubungan

4.1.1 Visi Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kota Samarinda sebagai SKPD yang berada dalam jajaran Pemerintah Kota Samarinda perlu berupaya untuk ikut mendukung dan mensukseskan Visi Pemerintah Kota Samarinda. Sejalan dengan Visi Kota Samarinda yaitu : **“TERWUJUDNYA KOTA SAMARINDA SEBAGAI KOTA METROPOLITAN YANG BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN”**, Untuk mewujudkan Visi Kota Samarinda maka Dinas Perhubungan Kota Samarinda mempunyai Visi yaitu :

Terwujudnya Sistem Transportasi yang Semakin Tertib, Lancar, Aman, Nyaman, Terjangkau dan Ramah Lingkungan.

Visi tersebut di atas mengandung beberapa makna sebagai berikut :

1. Kondisi Transportasi yang semakin tertib artinya sebanding dan proporsional antara penyediaan sarana dan prasarana sehingga tertata dan terintegrasi (terpadu) dalam kondisi berfungsi baik dan layak dioperasikan;
2. Kondisi transportasi yang lancar artinya dapat mengalirkan atau memindahkan orang, barang dan jasa dari satu tempat ke tempat lainnya dengan lintasan serta kepastian waktu yang pasti dan meminimalisir hambatan atau tundaan;
3. Kondisi Transportasi yang aman artinya dapat menjamin perpindahan orang, barang dan jasa dari tempat asal ke tempat tujuan dengan tetap dalam keadaan baik dan utuh;
4. Kondisi Pelayanan Transportasi yang nyaman artinya dapat memenuhi harapan dan keinginan masyarakat secara proporsional dan layak, berdasarkan norma dan kebutuhan minimal masyarakat;
5. Kondisi Pelayanan Transportasi yang terjangkau artinya dapat dipergunakan oleh seluruh lapisan masyarakat dengan kemampuan daya beli yang layak;



6. Kondisi Pelayanan Transportasi yang ramah lingkungan artinya sangat mengutamakan kelangsungan kelestarian lingkungan hidup, sehingga segala dampak yang ditimbulkan oleh aktifitas transportasi terutama gas buang, baik langsung maupun tidak langsung harus memenuhi ambang batas minimal kelestarian lingkungan hidup.

4.1.2 Misi Dinas Perhubungan

Sedangkan dalam upaya untuk mewujudkan Visi Dinas Perhubungan sebagaimana telah digariskan diatas, maka dipandang perlu untuk menggariskan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kota Samarinda agar tujuan organisasi dapat tercapai.

Dengan pernyataan Misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dari pihak yang berkepentingan dapat mengenal Dinas Perhubungan Kota Samarinda serta mengetahui alasan keberadaan dan perannya. Misi juga menunjukan tujuan utama kearah mana perencanaan/program instansi ingin dicapai. Untuk itu dalam proses perumusannya, harus memperhatikan masukan-masukan dari *stakeholders*, dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian dengan tuntutan lingkungan.

Berdasarkan hal tersebut Dinas Perhubungan Kota Samarinda menetapkan Misi sebagai berikut :

1. **Meningkatkan profesionalisme dan kuantitas sumber daya manusia aparatur**
2. **Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi Dinas Perhubungan**
3. **Meningkatkan ketersediaan kualitas sarana dan prasarana perhubungan yang memadai.**
4. **Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas baik darat maupun sungai.**
5. **Meningkatkan ketertiban, kelancaran, keamanan dan kenyamanan berlalu lintas baik darat dan sungai.**
6. **Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum.**

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan

4.2.1 Tujuan Dinas Perhubungan

Tujuan ditetapkan guna menjabarkan atau mengimplementasikan dari pernyataan misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Maksud ditetapkannya tujuan dengan mengacu kepada



pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Untuk mewujudkan Misi Dinas Perhubungan Kota Samarinda ditetapkan tujuan yang ingin dicapai antara lain :

1. Meningkatkan profesionalisme dan kuantitas sumber daya manusia aparatur, dengan tujuan :
 - Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan jumlah aparatur sesuai dengan kebutuhan bidang.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi Dinas Perhubungan, dengan tujuan :
 - Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi Dinas Perhubungan
 - Meningkatkan disiplin aparatur Dinas Perhubungan
 - Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan.
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Sarana dan prasarana pendukung kinerja pelayanan Dinas Perhubungan yang memadai, dengan tujuan :
 - Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan Dinas Perhubungan
 - Meningkatkan keamanan dan kenyamanan jalan umum di Kota Samarinda.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas baik darat maupun sungai, dengan tujuan :
 - Meningkatkan kesadaran hukum dan perilaku masyarakat dalam tertib berlalu lintas di jalan maupun di sungai.
5. Meningkatkan ketertiban, kelancaran, keamanan dan kenyamanan berlalu lintas baik darat dan sungai, dengan tujuan :
 - Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan Dinas Perhubungan
 - Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana keselamatan berlalulintas baik lalu lintas jalan dan sungai.
6. Meningkatkan Pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum, dengan tujuan :
 - Meningkatkan pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan dan sungai serta meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan penegakan hukum berlalu lintas.



4.2.2 Sasaran Dinas Perhubungan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perhubungan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan, sasaran Dinas Perhubungan Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

1. Sasaran untuk mencapai tujuan pertama, yaitu:
Meningkatnya kapasitas dan ketrampilan sumber daya aparatur sesuai bidang tugasnya dan meningkatnya kualitas pelayanan baik eksternal maupun internal.
2. Sasaran untuk mencapai tujuan kedua, yaitu :
Meningkatnya kualitas pelayanan surat menyurat, kearsipan serta pelayanan Dinas Perhubungan berbasis Teknologi Informasi serta rapat-rapat koordinasi keluar daerah.
3. Sasaran untuk mencapai tujuan ketiga, yaitu :
Meningkatnya kesadaran disiplin aparatur Dinas Perhubungan.
4. Sasaran untuk mencapai tujuan keempat, yaitu :
Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran Dinas Perhubungan dan terselenggaranya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Dinas Perhubungan serta tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel.
5. Sasaran untuk mencapai tujuan kelima, yaitu :
Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Perhubungan baik eksternal maupun internal.
6. Sasaran untuk mencapai tujuan keenam, yaitu :
Meningkatnya kesadaran masyarakat dan perilaku masyarakat dalam berlalulintas baik di darat maupun di sungai.
7. Sasaran untuk mencapai tujuan ketujuh, yaitu :
Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Perhubungan Baik eksternal maupun internal.
8. Sasaran untuk mencapai tujuan kedelapan yaitu :
Menurunnya kasus kecelakaan lalu lintas baik di jalan maupun di sungai.
9. Sasaran untuk mencapai tujuan kesembilan, yaitu :
Meningkatnya ketertiban dan kelancaran serta keamanan lalu lintas jalan dan sungai serta menurunnya kasus pelanggaran lalu lintas jalan.
10. Sasaran untuk mencapai tujuan kesepuluh, yaitu:
Meningkatnya fasilitas penerangan jalan umum di Kota Samarinda.



Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun ke					
		Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan jumlah aparatur sesuai dengan kebutuhan bidang	Meningkatnya kapasitas dan ketrampilan suber daya aparatur sesuai bidang tugasnya dan meningkatnya kualitas pelayanan baik eksternal maupun internal	Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi Dinas Perhubungan	Meningkatnya kualitas pelayanan surat menyurat, kearsipan serta pelayanan Dinas Perhubungan berbasis Teknologi Informasi serta rapat-rapat koordinasi keluar daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
Meningkatkan disiplin aparatur Dinas Perhubungan	Meningkatnya kesadaran disiplin aparatur Dinas Perhubungan	Terlaksananya aparatur yang disiplin	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran Dinas Perhubungan dan terselenggaranya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Dinas Perhubungan serta tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel	Terselenggaranya penyusunan dokumen perencanaan dan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan keuangan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan Dinas Perhubungan	Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Perhubungan baik eksternal maupun internal	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
Meningkatkan kesadaran hukum dan perilaku masyarakat dalam tertib berlalulintas di jalan maupun di sungai	Meningkatnya kesadaran masyarakat dan perilaku masyarakat dalam berlalulintas baik di darat maupun di sungai	Terselenggaranya pelayanan angkutan	50.6%	51.2%	51.6%	52.2%	52.7%	53%



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun ke					
		Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan Dinas Perhubungan	Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Perhubungan Baik eksternal maupun internal	Tersedianya sarana dan prasarana Dinas Perhubungan	0%	80%	85%	90%	95%	100%
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana keselamatan berlalulintas baik lalulintas jalan dan sungai	Menurunnya kasus kecelakaan lalulintas baik di jalan maupun di sungai	Terpeliharanya prasarana fasilitas pendukung LLAJ	50%	55%	0	0	0	55%
Meningkatkan pengawasan dan pengendalian lalulintas jalan dan sungai serta meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan penegakan hukum berlalu lintas	Meningkatnya ketertiban dan kelancaran serta keamanan lalulintas jalan dan sungai serta menurunnya kasus pelanggaran lalu lintas jalan	Terselenggaranya tertib dan lancar serta aman berlalulintas di jalan dan sungai	55%	60%	65%	70%	75%	80%
		Terselenggaranya tertib dan aman berlalulintas di jalan	55%	60%	65%	70%	75%	80%
Meningkatkan keamanan dan kenyamanan jalan umum di Kota Samarinda	Meningkatnya fasilitas penerangan jalan umum di Kota Samarinda	Persentase meningkatnya jumlah titik penerangan jalan umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%

4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan

4.3.1 Strategi Dinas Perhubungan

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Proses perencanaan strategis merupakan rencana yang menyeluruh tentang segala upaya yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan dengan mempertahankan sumberdaya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi memberikan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program, antara lain :

1. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur sesuai dengan kebutuhan bidang melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, seminar, workshop, studi lanjut, dan studi komparatif;



2. Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi Dinas Perhubungan melalui studi komparatif, bimtek, optimalisasi website, peningkatan kapasitas jaringan internet, meningkatkan sistem informasi berbasis teknologi informasi, penyusunan pedoman tata naskah dinas dan penyediaan sarana dan prasarana;
3. Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan melalui bimbingan teknis penyusunan renstra, renja, RKA dan DPA, koordinasi seluruh bidang, konsultasi dengan Dinas Perhubungan terkait, pengumpulan data dan informasi, pengolahan data dan pembuatan laporan bulanan kegiatan tepat waktu dan pembuatan SPJ bulanan sesuai ketentuan;
4. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan Dinas Perhubungan melalui pembangunan gedung kantor yang representatif, pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala, pengadaan sarana dan prasarana pendukung secara bertahap;
5. Meningkatkan kesadaran hukum dan perilaku masyarakat dalam tertib berlalulintas di jalan maupun sungai melalui sosialisasi intensif baik pada siswa dan masyarakat umum, pembuatan selebaran, spanduk, poster dan iklan layanan masyarakat serta pembangunan taman lalu lintas;
6. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan Dinas Perhubungan melalui pembangunan gedung kantor yang representatif, pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala, pengadaan sarana dan prasarana pendukung secara bertahap;
7. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana keselamatan berlalulintas baik lalulintas jalan dan sungai melalui identifikasi kebutuhan dan pemantauan kondisi serta pemeliharaan sarana dan prasarana keselamatan jalan dan sungai secara berkala, pengadaan sarana dan prasarana keselamatan jalan dan sungai secara bertahap;
8. Meningkatkan titik penerangan jalan umum melalui pemasangan lampu penerangan jalan pada titik-titik rawan.

4.3.2 Analisis Strategi

Salah satu teori Pemilihan strategi yang paling tepat adalah dengan cara memahami/mencermati dan mencari kesesuaian antara kekuatan internal dan kekuatan eksternalnya yang disebut analisis SWOT.

Untuk mencapai tujuan Dinas Perhubungan Kota Samarinda juga telah melakukan analisa SWOT yaitu dengan mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis guna merumuskan strateginya yang didasarkan pada logika yang memaksimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threat*).



Tabel. 4.2 Analisis SWOT

SWOT ANALYSIS		Strategic Action / Theme / Policy	Program dan kegiatan
GOAL :			
Issue / Problem :			
Strength/Kekuatan	<p>Kuantitas serta komitmen pimpinan dan jajaran aparat dalam mewujudkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Sebagai bagian dari upaya penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih</p>	<p>Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan fokus pada pembuatan laporan bulanan tepat waktu</p>	<p>Program : Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja</p> <p>Kegiatan : Penyusunan rencana kerja, pelaporan, kebijakan perhubungan, monitoring dan evaluasi serta penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan Dinas Perhubungan</p>
Weakness/Kelemahan			
Weakness/Kelemahan	<p>Kurangnya kompetensi dan jumlah aparatur untuk mendukung kinerja pelayanan Dishub, kurangnya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalulintas dan belum optimalnya ketersediaan fasilitas dan sarana serta prasarana keselamatan pelayaran angkutan sungai</p>	<p>Meningkatkan kompetensi sumberdaya aparatur sesuai dengan kebutuhan bidang melalui Pengiriman dan penugasan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis, diklat, seminar, workshop, studi lanjut, studi komparatif sesuai dengan kebutuhan Dinas Perhubungan</p>	<p>Program : Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</p> <p>Kegiatan : Bimbingan teknis dan pelatihan</p>
Opportunitis/Peluang			
Opportunitis/Peluang	<p>Tersedianya ajang kompetisi tentang tertib berlalulintas dan dukungan kebijakan maupun pendanaan kegiatan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, sebagai faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Samarinda</p>	<p>Tersedianya ajang kompetisi tentang tertib berlalulintas</p>	<p>Program : Peningkatan pelayanan angkutan</p> <p>Kegiatan : Pemilihan awak kendaraan umum teladan dan pelajar pelopor</p>
Opportunitis/Peluang			



SWOT ANALYSIS		Strategic Action / Theme / Policy	Program dan kegiatan
GOAL :			
Issue / Problem :			
Threats/Ancaman		Meningkatkan kesadaran hukum dan perilaku masyarakat dalam tertib berlalulintas di jalan maupun sungai melalui Peningkatan dan optimalisasi sosialisasi kepada semua lapisan masyarakat dengan berbagai media dengan fokus pada siswa dan pengguna jalan yang lain.	Program : Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan : Sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalulintas dan angkutan
Disiplin pengguna jalan relatif masih rendah, sehingga mengakibatkan kemacetan dan kecelakaan darat dan belum optimalnya pelayanan angkutan umum sehingga memberi dampak tingginya pengguna angkutan pribadi	Block Threat (mengantisipasi ancaman)		

4.3.3 Kebijakan Dinas Perhubungan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan sebagai pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran sehingga memperjelas strategi menjadi lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan–ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Perhubungan Kota Samarinda memiliki kebijakan, yaitu :

1. Pengiriman dan penugasan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis, diklat, seminar, workshop, studi lanjut, studi komparatif sesuai dengan kebutuhan Dinas Perhubungan;
2. Peningkatan kapasitas jaringan internet sesuai kebutuhan terutama untuk mendukung Simda keuangan dan perencanaan, penyelenggaraan bimbingan teknis dengan fokus pada bidang surat menyurat dan kearsipan secara terprogram dan meningkatkan sistem informasi Dinas Perhubungan terutama pada optimalisasi website;
3. Penciptaan budaya kerja dan etos kerja aparatur di lingkungan Dinas Perhubungan;



4. Pelaksanaan Pendampingan intensif dalam penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan fokus pada pembuatan laporan bulanan tepat waktu, peningkatan kualitas pelaporan keuangan dengan fokus pada Pembuatan laporan keuangan bulanan tepat waktu;
5. Pembangunan dan pengadaan gedung kantor, sarana dan prasarana pendukung lainnya secara bertahap yang responsif gender dan ramah lingkungan;
6. Peningkatan dan optimalisasi sosialisasi kepada semua lapisan masyarakat dengan berbagai media dengan fokus pada siswa dan pengguna jalan yang lain;
7. Peningkatan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung kinerja Dinas Perhubungan secara berkala;
8. Peningkatan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung kinerja Dinas Perhubungan secara berkala dan pengadaan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas jalan dan sungai secara bertahap, responsif gender dan ramah lingkungan;
9. Melakukan perhitungan kebutuhan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum secara meyeluruh.

Adapun keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kota Samarinda, dapat dilihat dibawah ini :

Tabel. 4.3 Rencana Strategis dan Kebijakan

Prioritas RPJMD 2016 - 2021	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2016-2021 1	Strategi	Arah Kebijakan
			Indikator	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7
Agenda Prioritas. 4 Pengembangan dan peningkatan infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas penunjang sektor unggulan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan	Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan jumlah aparatur sesuai dengan kebutuhan bidang	Meningkatnya kapasitas dan ketrampilan sumber daya aparatur sesuai bidang tugasnya dan meningkatnya kualitas pelayanan baik eksternal maupun internal	Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Bulan	Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur sesuai dengan kebutuhan bidang melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, seminar, workshop, studi lanjut, dan studi komparatif	Pengiriman dan penugasan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis, diklat, seminar, workshop, studi lanjut, studi komparatif sesuai dengan kebutuhan Dinas Perhubungan
	Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi Dinas Perhubungan	Meningkatnya kualitas pelayanan surat menyurat, kearsipan serta pelayanan Dinas Perhubungan berbasis Teknologi Informasi serta rapat-rapat koordinasi keluar daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi Dinas Perhubungan melalui studi komparatif, bimtek, optimalisasi website, peningkatan kapasitas jaringan internet, meningkatkan sistem informasi berbasis	Peningkatan kapasitas jaringan internet sesuai kebutuhan terutama untuk mendukung Simda keuangan dan perencanaan, penyelenggaraan bimbingan



Prioritas RPJMD 2016 - 2021	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2016-2021 1	Strategi	Arah Kebijakan
			Indikator	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7
					teknologi informasi, penyusunan pedoman tata naskah dinas dan penyediaan sarana dan prasarana	teknis dengan fokus pada bidang surat menyurat dan kearsipan secara terprogram dan meningkatkan sistem informasi Dinas Perhubungan terutama pada optimalisasi website
	Meningkatkan disiplin aparatur Dinas Perhubungan	Meningkatnya kesadaran disiplin aparatur Dinas Perhubungan	Terlaksananya aparatur yang disiplin	Bulan	Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan melalui bimbingan teknis penyusunan renstra, renja, RKA dan DPA, koordinasi seluruh bidang, konsultasi dengan Dinas Perhubungan terkait, pengumpulan data dan informasi, pengolahan data dan pembuatan laporan bulanan kegiatan tepat waktu dan pembuatan SPJ bulanan sesuai ketentuan	Penciptaan budaya kerja dan etos kerja aparatur di lingkungan Dinas Perhubungan
	Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran Dinas Perhubungan dan terselenggaranya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Dinas Perhubungan serta tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel	Terselenggaranya penyusunan dokumen perencanaan dan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan keuangan	Bulan	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan Dinas Perhubungan melalui pembangunan gedung kantor yang representatif, pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala, pengadaan sarana dan prasarana pendukung secara bertahap	Pelaksanaan Pendampingan intensif dalam penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan fokus pada pembuatan laporan bulanan tepat waktu, peningkatan kualitas pelaporan keuangan dengan fokus pada Pembuatan laporan keuangan bulanan tepat waktu



Prioritas RPJMD 2016 - 2021	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2016-2021 1	Strategi	Arah Kebijakan	
			Indikator	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	
			Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur		Bulan	Meningkatkan kesadaran hukum dan perilaku masyarakat dalam tertib berlalulintas di jalan maupun sungai melalui sosialisasi intensif baik pada siswa dan masyarakat umum, pembuatan leaflet, spanduk, poster dan iklan layanan masyarakat serta pembangunan taman lalulintas	Pembangunan dan pengadaan gedung kantor, sarana dan prasarana pendukung lainnya secara bertahap yang responsif gender dan ramah lingkungan
	Meningkatkan kesadaran hukum dan perilaku masyarakat dalam tertib berlalulintas di jalan maupun di sungai	Meningkatnya kesadaran masyarakat dan perilaku masyarakat dalam berlalulintas baik di darat maupun di sungai	Terselenggaranya pelayanan angkutan		Persentase	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan Dinas Perhubungan melalui pembangunan gedung kantor yang representatif, pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala, pengadaan sarana dan prasarana pendukung secara bertahap	Peningkatan dan optimalisasi sosialisasi kepada semua lapisan masyarakat dengan berbagai media dengan fokus pada siswa dan pengguna jalan yang lain
	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan Dinas Perhubungan	Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Perhubungan Baik eksternal maupun internal	Tersedianya sarana dan prasarana Dinas Perhubungan		Persentase	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana keselamatan berlalulintas baik lalulintas jalan dan sungai melalui identifikasi kebutuhan dan pemantauan kondisi serta pemeliharaan sarana dan prasarana keselamatan jalan dan sungai secara berkala, pengadaan sarana dan prasarana keselamatan jalan dan sungai secara bertahap	Peningkatan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung kinerja Dinas Perhubungan secara berkala



Prioritas RPJMD 2016 - 2021	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2016-2021 1	Strategi	Arah Kebijakan	
			Indikator	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	
	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana keselamatan berlalulintas baik lalulintas jalan dan sungai	Menurunnya kasus kecelakaan lalulintas baik di jalan maupun di sungai	Terpeliharanya prasarana fasilitas pendukung LLAJ		Persentase	Meningkatkan keamanan dan kelancaran perhubungan laut dan udara melalui identifikasi kebutuhan dan pemenuhan data	Peningkatan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung kinerja Dinas Perhubungan secara berkala dan pengadaan sarana dan prasarana keselamatan lalulintas jalan dan sungai secara bertahap, responsif gender dan ramah lingkungan
	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian lalulintas jalan dan sungai serta meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan penegakan hukum berlalulintas	Meningkatnya ketertiban dan kelancaran serta keamanan lalulintas jalan dan sungai serta menurunnya kasus pelanggaran lalulintas jalan	Terselenggaranya tertib dan lancar serta aman berlalulintas di jalan dan sungai		Persentase		Penyelenggaraan identifikasi secara berkala dan Peningkatan pemenuhan dan ketersediaan data perhubungan laut dan udara
			Terselenggaranya tertib dan aman berlalulintas di jalan		Persentase		
	Meningkatkan keamanan dan kenyamanan jalan umum di Kota Samarinda	Meningkatnya fasilitas penerangan jalan umum di Kota Samarinda	Persentase meningkatnya jumlah titik penerangan jalan umum		Persentase	Meningkatkan titik penerangan jalan umum melalui pemasangan lampu penerangan jalan pada titik-titik rawan	Melakukan perhitungan kebutuhan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum secara menyeluruh



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN LOKASI SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Program pembangunan merupakan bentuk instrumen kebijakan yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat. Pelaksanaan program-program pembangunan daerah terwujud untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, sesuai dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Program prioritas merupakan bentuk instrumen kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan pembangunan daerah. Kegiatan ini mendapat prioritas dalam pendanaan untuk melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan masing-masing SKPD sehingga pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah dapat terwujud. Keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya diterjemahkan oleh tiap-tiap SKPD ke dalam dokumen Renstra SKPD.

Perencanaan program prioritas dalam dokumen Renstra harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya esensi program prioritas bagi rujukan utama pelaksanaan perencanaan kegiatan tiap tahun yang diluangkan kedalam rencana kerja Anggaran SKPD.

Sedangkan pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD. Pagu indikatif dialokasikan ke setiap program prioritas masing-masing urusan untuk mencapai target setiap indikator yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelompokan pagu pada program masing-masing SKPD dapat dilakukan dimana masing-masing pagu menjadi batas maksimal bagi SKPD dalam menyelenggarakan kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun ke depan.

Untuk tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2016-2021 Dinas Perhubungan Kota Samarinda membuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini:



Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kota Samarinda

Tujuan	Sasaran	IndikatorSasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) danKegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2016		2017		2018			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(20)	(21)
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	Bulan	12 Bulan	8.065.078.000	12 Bulan	29.871.963.400	12 Bln	34.693.864.000	Dinas Perhubungan	Smd
Memningkatkan kualitas pengelolaan administrasi Dinas Perhubungan	Meningkatnya kualitas surat menyurat, kearsipan serta pelayanan Dinas Perhubungan berbasis teknologi informasi serta rapat-rapat koordinasi keluar daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Tersedianya Fasilitas Telpon, Air Dan Listrik	12 Bln	12 Bln	717.344.000	12 Bln	21.319.700.000	12 Bln	23.451.670.000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd
				Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bln	12 Bln	30,000,000	12 Bln	33,660,000	12 Bln	40,600,000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	12 Bln	12 Bln	256.500.000	12 Bln	285.032.000	12 Bln	269.120.000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik dan elektronik (lampu pijar, baterai kering dll	12 Bln	12 Bln	4,524.000	12 Bln	4.976.400	12 Bln	6.524.000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Snd
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya penyediaan dan perlengkapan kantor	12 Bln	0	0	12 Bln	278,850,000	12 Bln	253,500,000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd
				Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	12 Bln	12 Bln	300,000,000	12 Bln	462,000,000	12 Bln	520,000,000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd
				Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Tersedianya honorarium bagi PNS, PTTB dan PTHH	12 Bln	12 Bln	6.756.710.000	12 Bln	7.477.745.000	12 Bln	10.142.450.000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuma	12 Bln	0	0	12 Bln	10.000.000	12 Bln	10.000.000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd
				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	Bulan	12 Bln	1.104.282.500	12 Bln	1.560.304.000	12 Bln	1.732.000.000	Dinas Perhubungan	Smd
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan Dinas Perhubungan	Meningkatkannya kualitas pelayanan Dinas Perhubungan baik eksternal maupun internal	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya rehab / perbaikan kecil gedung kantor	12 Bln	12 bln	67.500.000	12 Bln	50.000.000	12 Bln	100.000.000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasioanal yang terpelihara secara rutin / berkala	12 Bln	12 bln	936.782.500	12 Bln	1.365.104.000	12 Bln	1.450.000.000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd
				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor	12 Bln	12 bln	100.000.000	12 Bln	145.200.000	12 Bln	182.000.000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd



*Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021*

Tujuan	Sasaran	IndikatorSasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) danKegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2016		2017		2018			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(20)	(21)
				Program Peningkatan disiplin aparatur	Pelaksanaan disiplin aparatur	Orang	0	0	577 Orang	417.340.000	627 Orang	700.000,000	Dinas Perhubungan	Smd
Meningkatkan kompetensi sumberdaya aparatur sesuai dengan kebutuhan bidang	Meningkatnya kapasitas dan keterampilan sumber daya aparatur sesuai bidang tugasnya dan meningkatnya kualitas pelayanan baik eksternal maupun internal	Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	Orang	0	0	577 Orang	417.340.000	627 Orang	700.000,000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Orang	0	0	30 orang	300.000.000	30 Orang	300.000.000	Dinas Perhubungan	Smd
Meningkatkan Disiplin Aparatur Dinas Perhubungan	Meningkatnya Kesadaran Disiplin Aparatur Dinas Perhubungan	Telaksananya aparatur yang disiplin		Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Orang	0	0	30 orang	300.000.000	30 orang	300.000.000	Sekretariat (Sub Bag. Program)	Smd
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan	Ketersediaan laporan kinerja dan keuangan	Bulan	0	0	Dokumen	800.000.000	Dokumen	900.000.000	Dinas Perhubungan	Smd
Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran Dinas Perhubungan dan terselenggaranya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Dinas Perhubungan serta tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel	Terselenggaranya penyusunan dokumen perencanaan dan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan keuangan		Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan	Dokumen SAKIP (Renstra, RKT(RKA&DPA), Renja, LAKIP, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja,Evaluasi dan Pengendalian) dan laporan Keuangan	Bulan	0	0	8 Dokumen	800.000.000	8 Dokumen	900.000.000	Sekretariat (Sub Bag. Program)	Smd



*Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021*

Tujuan	Sasaran	IndikatorSasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) danKegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
							2016		2017		2018				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(20)	(21)	
				Program pembangunan prasana dan fasilitas perhubungan	Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Bidang Perhubungan Kota Samarinda	Persentase	-	100.000.000	40%	18.328.500.000	14,29%	30.948.054.135	Dinas Perhubungan	Smd	
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan fasilitas pendukung pelayanan Dinas Perhubungan	Meningkatkannya kualitas pelayanan Dinas Perhubungan baik eksternal maupun internal	Tersediaannya sarana dan fasilitas Dinas Perhubungan			Persentase sub terminal dalam kondisi baik	Persentase	75%		80%		80%		Dinas Perhubungan	Smd	
					Persentase Rekomendasi TUKS (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri) darat dan sungai	Persentase	90%		100%		100%		Dinas Perhubungan	Smd	
					Survey galangan kapal dan TUKS batu bara serta konsultasi kementerian perhubungan	Persentase data yang tersedia	%	0	0	100%	168,500,000	0	0	Seksi Prasarana Multimoda	Smd
					Penyusunan Rencana Kerja, Pelaporan, Kebijakan Perhubungan, Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Akuntabilitas Kinerja	6 Dokumen dalam 1 Tahun	6 Dokumen dan 1 Dokumen	50.000.000	0	0	0	0	Sekretariat (Sub Bag Program)	Smd
					Penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan Dinas Perhubungan	Waktu Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan Keuangan di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Samarinda	12 Bln	50.000.000	0	0	0	0	sekretariat (Sub Bag Keuangan)	Smd
							Pembuatan detail enggining design dermaga Mahakam ilir	Dokumen detail enggining design	0	0	0	1 Dokumen	710,000,000	0	0
				Pengadaan perangkat lunak sistem informasi	Tersedianya perangkat lunak (sistem informasi sarana dan prasarana dinas perhubungan)	0	0	0	0	0	1 perangkat	500.000.000	Sekretariat (Sub Bag Program)	Smd	
				Peningkatan sarana dan prasarana penunjang dermaga dan pelabuhan	Peningkatan sarana dan prasarana dermaga	0	0	0	3 Dermaga	750.000.000	3 Dermaga	400.000.000	Seksi Prasarana Sungai	Smd	
				Pengadaan perangkat lunak sistem informasi sarana prasarana galangan	Dokumen data informasi sarana dan prasarana fasilitas maritim	0	0	0	0	0	1 Dokumen	400.000.000	Seksi Prasarana Multimoda	Smd	



*Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021*

Tujuan	Sasaran	IndikatorSasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) danKegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2016		2017		2018			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(20)	(21)
				Pengadaan Kendaraan Operasional Pengawasan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Kendaraan Operasional (Mobil Derek dan Sepeda Motor)	Unit	0	0	2 Unit Mobil Derek dan 16 Unit Sepeda Motor	3.500.000.000	2 Unit Mobil derek dan 4 unit mobil patroli	4.800.000.000	Seksi Pengendalian & Ketertiban	Smd
				Pengadaan perangkat lunak sistem informasi Sarana Prasarana Fasilitas jalan	Tersedianya data informasi sarana dan prasarana fasilitas jalan	Data	0	0	1 set data fasilitas jalan	500,000,000	0	0	Seksi Prasarana Jalan	Smd
				Pembuatan Dokumen Lingkungan (Amdal / UKL - UPL) Gedung Kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda	Tersedianya Pembuatan Dokumen Lingkungan (Amdal / UKL - UPL) Gedung Kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda	Dokumen	0	0	1 dokumen	200,000,000	0	0	Sub Bag Umum	Smd
				Perencanaan Teknis DED Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda	Tersedianya Perencanaan Teknis DED Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda	Dokumen	0	0	1 dokumen DED	500,000,000	0	0	Sub Bag Umum	Smd
				Pembangunan Bandara Samarinda Baru	Presentase Terlaksananya kewajiban pembayaran pada pihak ketiga	%	0	0	28%	10.000.000.000	72%	25.448.054.135	Bidang Prasarana	Smd
				Pembuatan Master plan Pelabuhan & Dermaga	Tersedianya master plan pelabuhan & dermaga	Dokumen	0	0	0	0	1 Dokumen	1.000.000.000	Seksi Prasarana Sungai	Smd
				SID Kolam Dermaga Mahakam hilir	Tersedianya SID Kolam Dermaga Mahakam hilir	Dokumen	0	0	0	0	1 Dokumen	400.000.000	Seksi Prasarana Sungai	Smd
				SID Kolam Dermaga Harapan baru	Tersedianya SID Kolam Dermaga Harapan baru	Dokumen	0	0	0	0	1 dokumen	800.000.000	Seksi Prasarana Sungai	Smd
				DED Dermaga Loa janan ilir	Tersedianya DED Dermaga Loa janan ilir	Dokumen	0	0	0	0	1 dokumen	400.000.000	Seksi Prasarana Sungai	Smd
				DED Dermaga Harapan Baru	Tersedianya DED Dermaga Harapan baru	Dokumen	0	0	0	0	1 Dokumen	400.000.000	Seksi Prasarana Sungai	Smd
				Kajian Kinerja Jalan	Tersedianya Dokumen Kajian kinerja jalan	Dokumen	0	0	0	0	5 Dokumen	500.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd



*Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021*

Tujuan	Sasaran	IndikatorSasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) danKegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2016		2017		2018			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(20)	(21)
				Penyusunan Masterplan Transportasi Kota Samarinda	Jumlah dokumen masterplan transportasi	Dokumen	0	0	1 Dokumen	2.000.000.000	0	0	Seksi Lalu Lintas	Smd
				Penyusunan Rencana Penyediaan Prasarana dan Sarana Jaringan Jalan Pejalan Kaki	Jumlah dokumen rencana penyediaan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki	Dokumen	0	0	0	0	1 Dokumen	2.000.000.000	Seksi Lalu Lintas	Smd
				Penyusunan Masterplan Aerocity BSB/Sungai Siring	Jumlah Dokumen Masterplan Aerocity BSB/Sungai Siring	Dokumen	0	0	0	0	1 Dokumen	2.000.000.000	Seksi Lalu Lintas	Smd
				Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Persentase Peningkatan Prasarana Fasilitas LLAJ yang telah mencapai Standar Pelayanan Minimal	Persentase	65%	600.000.000	70%	14.442.050.000	75%	7.600.000.000	Dinas Perhubungan	Smd
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana keselamatan berlalulintas baik berlalulintas jalan dan sungai	Menurunnya kasus kecelakaan lalulintas baik di jalan maupun di sungai	Terpeliharanya prasarana Fasilitas pendukung LLAJ Dinas Perhubungan		Peningkatan pelayanan publik pada pelayanan parkir	Terlaksananya Penertiban Parkir Kota Samarinda	Jumlah titik luas jalan 148 kantong parkir	12 Bln	100.000.000	0	0	0	0	Seksi Perparkiran	Smd
				Pemeliharaan Traffic Light dan Jaringan Area Traffic Control System (ATCS)	Terpeliharanya Prasarana Fasilitas LLAJ kota samarinda	Traffic light dan jaringan ATCS	34 simpang Traffic light dan jaringan ATCS	500.000.000	34 simpang Traffic light dan jaringan ATCS	3.839.550,000	34 simpang Traffic light dan jaringan ATCS	5.000.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd
				Rehabilitasi Pemeliharaan terminal dalam kota	Terpeliharanya terminal dalam kota	Terminal	0	0	1 Terminal	302.500.000	1 Terminal	1.000.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd
				Rehabilitasi Halte dan Gapura Penyebrangan	Terpeliharanya Prasarana Fasilitas LLAJ kota samarinda	Unit	0	0	4 Unit	800.000.000	6 Unit	200.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd
				Pemeliharaan dermaga loa janan dan harapan baru	Terpeliharanya fasilitas dermaga	2 dermaga	0	0	2 unit	500,000,000	0	0	Seksi Prasarana Sungai	Smd
				Marka Jalan	Tersedianya marka jalan di kota samarinda	Meter	0	0	16667 M	5.000.000.000	0	0	APBD Provinsi	Smd
				Pengadaan papan nama jalan	Tersedianya papan nama jalan	Buah	0	0	2.000 Buah	2.000.000.000	0	0	APBD Provinsi	Smd



*Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021*

Tujuan	Sasaran	IndikatorSasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) danKegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2016		2017		2018			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(20)	(21)
				Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Berfungsinya Fasilitas Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Bulan	0	0	12 Bulan	2.000.000.000	12 Bulan	2.200.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd
				Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten / Kota	Persentase	50,69%	861.663.000	51,18%	12.734.128.000	51,68%	7.695.300.000	Dinas Perhubungan	Smd
Meningkatkan kesadaran hukum dan perilaku masyarakat dalam tertib berlalulintas di jalan maupun di sungai	Meningkatnya kesadaran masyarakat dan perilaku masyarakat dalam berlalulintas baik di darat maupun di sungai	Terselenggaranya pelayanan angkutan			Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/ Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji Perhubungan Bermotor minimal 4.000 (empat ribu)	Unit	1 unit	0	1 unit	0	1 unit	0	Dinas Perhubungan	Smd
					Persentase ketersediaan angkutan kota	Persentase	48,76%	0	50,72%	0	52,63%	0	Dinas Perhubungan	Smd
					Jumlah orang melalui terminal per tahun	Orang	197.156	0	593.776	0	564.088	0	Dinas Perhubungan	Smd
					Rasio ijin Perpanjangan trayek (kartu pengawasan per 6 bulan)	Rasio	63,86	0	70,24	0	76,63	0	Dinas Perhubungan	Smd
					Jumlah Uji Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Unit	63.636	0	70.000	0	77.000	0	Dinas Perhubungan	Smd
					Persentase kendaraan yang telah melakukan uji	Persentase	90%	0	90%	0	90%	0	Dinas Perhubungan	Smd
					Persentase Kendaraan umum yang memenuhi ambang batas emisi gas buang (Lulus uji emisi)	Persentase	5,22%	0	5,22%	0	5,22%	0	Dinas Perhubungan	Smd
					Persentase kapal yang bersertifikasi	Persentase	81%	0	82%	0	83%	0	Dinas Perhubungan	Smd



Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021

Tujuan	Sasaran	IndikatorSasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) danKegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2016		2017		2018			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(20)	(21)
					Persentase Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	Persentase	100%	0	100%	0	100%	0	Dinas Perhubungan	Smd
					Persentase Kapal angkutan Sungai yang memiliki ijin usaha angkutan sungai	Persentase	100%	0	100%	0	100%	0	Dinas Perhubungan	Smd
					Persentase pendaratan dan lepas landas helicopter (Helipad) berijin	Persentase	100%	0	100%	0	100%	0	Dinas Perhubungan	Smd
				UPT Terminal	Terciptanya peningkatan pelayanan angkutan pada masyarakat samarinda	Terminal	8 Terminal	150,000,000	0	0	0	0	Seksi Prasarana Jalan	Smd
				Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di lingkungan Terminal	Terciptanya peningkatan pelayanan angkutan pada masyarakat samarinda	Terminal	0	0	5 Terminal	704.000.000	5 Terminal	700.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd
				UPT pengelolaan Dermaga dan Pelabuhan	Peningkatan pelayanan angkutan di Dermaga dan Pelabuhan	Dermaga	5 Dermaga	84,143,000	0	0	0	0	Seksi Angkutan & Dermaga Sungai	Smd
				Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai	Peningkatan pelayanan angkutan di Dermaga dan Pelabuhan	Dermaga	0	0	5 Dermaga	952.809.000	5 Dermaga	450.000.000	Seksi Angkutan & Dermaga Sungai	Smd
				Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	Proses pelayanan operasional dan administrasi yang maksimal serta tercapainya target PAD	12 bulan	0	0	12 bln	1.800.000.000	12 bln	1.800.000.000	Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Smd
				Peningkatan pengawasan dan pendataan fasilitas LLAJ dan LLAS Perhubungan	Pengawasan dan Pendataan Fasilitas Perhubungan (Survey)	40 kali	0	0	40 kali	247.500.000	40 kali	300.000.000	Seksi Keselamatan Jalan	Smd
				Wahana Tata Nugraha	Terlaksananya lomba wahana tata nugraha	penghargaan WTN	Penghargaan WTN	150.000.000	Penghargaan WTN	379.500.000	Penghargaan WTN	400.000.000	Seksi Lalu lintas	Smd



*Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021*

Tujuan	Sasaran	IndikatorSasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) danKegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2016		2017		2018			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(20)	(21)
				Pengendalian dan Operasional Lalulintas angkutan sungai	Terlaksananya pengendalian dan operasional lalulintas angkutan sungai	Kali	0	0	30 kali	358.380,000	30 kali	375.300.000	Seksi Keselamatan Pelayaran	Smd
				Peningkatan pelayanan publik pada pelayanan proses perijinan angkutan	Terselenggaranya pelayanan ijin trayek	Armada dan Taxi argo	0	0	1524 Armada dan 36 Taxi argo	330,000,000	1524 Armada dan 36 Taxi argo	350,000,000	Seksi Angkutan Jalan	Smd
				Pembentukan dewan maritime samarinda dan konsolidasi ke kementerian	Terbentuknya dewan maritim kota samarinda	Dewan Maritim	0	0	1 dewan maritim	301,705,000	-	-	Seksi Keselamatan Pelayaran	Smd
				Kampanye dan SAR keselamatan pelayaran sungai	Jumlah peserta sosialisasi kampanye SAR	Nahkoda	30 Nahkoda	100,000,000	40 Nahkoda	596.255.000	50 Nahkoda	700.000.000	Seksi Keselamatan Pelayaran	smd
				Survei investigasi alur pelayaran sungai dan dermaga	Tersedianya data alur pelayaran sungai dan dermaga serta sarana dan prasarana lalulintas sungai	Dokumen	0	0	1 Dokumen	263.479.000	0	0	Seksi Prasarana Sungai	smd
				Studi penataan rute dan pengembangan trayek angkutan umum	Terlaksananya penataan rute dan pengembangan trayek angkutan umum	Dokumen	0	0	1 Dokumen	412.500.000	0	0	Seksi Angkutan Jalan	Smd
				Pemilihan awak kendaran umum teladan dan pelajar pelopor	Jumlah peserta pemilihan awak kendaran umum teladan dan pelajar pelopor	awak kendraan dan pelajar pelopor	0	0	5 awak kendaraan dan 5 pelajar	198.000.000	5 awak kendaraan dan 5 pelajar	350.000.000	Seksi Keselamatan Jalan	smd
				Pengadaan ponton apung dermaga batang aji samarinda seberang	Tersedianya pengadaan ponton apung	Unit	0	0	1 unit	1.320.000.000	0	0	Seksi Prasarana Sungai	Smd
				Lanjutan penataan kantong parkir tepian Mahakam tahap I (segmen masjid raya – kantor pos)	Tersedianya kantung parkir dari mesjid raya - kantor pos	M ²	0	0	1200M ² dan Bangunan	4.000.000.000	0	0	Bidang dalops	Smd
				Peningkatan pelayanan publik pada pelayanan proses perijinan galangan kapal dan TUKS Batu Bara	Tersediannya data base galangan kapal dan TIKS Batu Bara	Dokumen	0	0	1 dokumen	250.000.000	0	0	Seksi Prasarana Multimoda	smd
				Pendataan kolam pelabuhan galangan kapal dan TUKS	Tersedianya data kolam pelabuhan galangan kapal dan TUKS batu bara (daerah hulu)	Dokumen	0	0	0	0	1 Dokumen	200.000.000	Seksi Prasarana Multimoda	smd
				Pengawasan kolam pelabuhan galangan kapal dan TUKS	Jumlah Galangan kapal dan TUKS yang diawasi	Unit	0	0	0	0	0	0	Seksi Prasarana Multimoda	Smd



*Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021*

Tujuan	Sasaran	IndikatorSasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) danKegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2016		2017		2018			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(20)	(21)
				Penunjang operasional dewan maritim kota	Operasionalisasi Dewan Maritim	Bulan	0	0	0	0	12 bln	320.000.000	Seksi Prasarana Multimoda	Smd
				SID alur pelayaran DLKP DLKR pelabuhan samarinda	Jumlah Segmen yang disurvey	Segmen	0	0	Segmen 1	400.000.000	Segmen 2	400.000.000	Seksi Prasarana Multimoda	Smd
				Studi penataan rute dan pengembangan transportasi sungai dalam kota	Tersedianya dokumen study penataan rute	Dokumen	0	0	0	0	1 dokumen	300.000.000	Seksi Angkutan & Dermaga Sungai	Smd
				Bus Rapid Transit (BRT) Angkutan pelajar	Terlaksananya BRT Angkutan pelajar	Bus	0	0	0	0	0	0	Seksi Angkutan Jalan	Smd
				Penertiban Angkutan barang di samarinda	Jumlah perusahaan Angkutan Barang yang ditertibkan	Perusahaan Angkutan Barang	0	0	0	0	0	0	Seksi Pengendalian & Ketertiban	Smd
				Sosialisasi/Penyuluhan ketertiban lalulintas dan Angkutan	Sosialisasi Tertib Lalulintas terhadap siswa tingkat SMA/Sederajat	Sekolah	0	0	4 sekolah	220.000.000	4 sekolah	300.000.000	Seksi Keselamatan Jalan	Smd
				Sosialisasi keselamatan lalulintas angkutan sungai dan pemilihan juragan kapal terbaik	Jumlah peserta Sosialisasi	0	0	0	0	0	100 Orang	250.000.000	Seksi Keselamatan Pelayaran	Smd
				Monitoring dan evaluasi terhadap perusahaan dan armada angkutan	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi serta pembinaan terhadap perusahaan dan armada angkutan khusus	Bulan	0	0	0	0	12 Bulan	500.000.000	Seksi Angkutan Khusus	Smd
				Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	Persentase	0	0	70%	1.000.000.000	75%	1.000.000.000	Dinas Perhubungan	Smd
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan Prasarana pendukung pelayanan Dinas Perhubungan	Meningkatkannya kualitas pelayanan Dinas Perhubungan baik eksternal maupun internal	Tersediaannya sarana dan prasarana Dinas Perhubungan			Persentase tersedianya halte pada setiap Kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	Persentase	85%	0	87%	0	92%	0	Dinas Perhubungan	Smd
				Pembangunan halte angkutan kota	Tersedianya Halte angkutan kota	0	0	0	4 halte	1.000.000.000	4 halte	1.000.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd



*Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021*

Tujuan	Sasaran	IndikatorSasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) danKegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2016		2017		2018			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(20)	(21)
				Peningkatan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda	Tersedianya Gedung Dinas Perhubungan	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DISHUB	Smd
				Program Peningkatan dan Pengamanan lalulintas	Persentase Pelaksanaan Pembinaan, Penataan, dan Penertiban Parkir Tepi Jalan di Kota Samarinda	Persentase	56%	867.500.000	60%	39.723.670.000	62%	43.075.000.000	Dinas Perhubungan	Smd
Meningkatkan pengawasan dan pengendalian lalulintas jalan dan sungai serta meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan penegakan hukum berlalulintas	Meningkatnya ketertiban dan kelancaran serta keamanan lalulintas jalan dan sungai serta Menurunnya kasus pelanggaran lalulintas jalan dan sungai	Terselenggaranya tertib dan lancar serta aman berlalulintas di jalan dan sungai			Berkurangnya titik kemacetan	Persentase	48,57%	0	50%	0	51,43%	0	Dinas Perhubungan	Smd
					Presentase fasilitas perlengkapan jalan (Rambu) pada jalan Kabupaten/Kota	Persentase	45%	0	55%	0	65%	0	Dinas Perhubungan	Smd
					Presentase fasilitas perlengkapan jalan (Marka) pada jalan Kabupaten/Kota	Persentase	16%	0	17%	0	18%	0	Dinas Perhubungan	Smd
					Presentase fasilitas perlengkapan jalan (ZOSS) pada jalan Kabupaten/Kota	Persentase	40%	0	50%	0	60%	0	Dinas Perhubungan	Smd
					Presentase fasilitas perlengkapan jalan (Guardrail) pada jalan Kabupaten/Kota	Persentase	44%	0	56%	0	67%	0	Dinas Perhubungan	Smd
				Penunjang Kegiatan Forum Lalu Lintas & Angkutan Jalan Kota Samarinda	Terwujudnya koordinasi yang baik antar elemen dibidang lalulintas dan angkutan jalan	Bulan	0	0	10 bln	377.300.000	10 bln	335.000.000	Seksi lalu lintas	Smd
				Pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan lalulintas jalan dalam wilayah hukum kota samarinda	Melakukan Penertiban Kendaraan Bersama Pihak Terkait	Bulan	12 Bulan	717.500.000	30 kali	2.040.032.500	40 kali	3.500.000.000	Seksi Pengendalian & Ketertiban	Smd
				Pengadaan marka jalan	Tersedianya marka jalan di kota samarinda sebagai fasilitas pengendalian dan keselamatan lalulintas	m ²	0	0	7.500m ²	2.200.000.000	7.900m ²	2.195.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd



*Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021*

Tujuan	Sasaran	IndikatorSasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) danKegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2016		2017		2018			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(20)	(21)
				Pengadaan rambu – rambu lalulintas	Tersedianya rambu-rambu lalu lintas	Jumlah rambu lalu lintas	0	0	240 rambu lalu lintas	1.001.137.500	500 rambu lalu lintas	2.100.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd
				Pembuatan Zona selamat sekolah (ZOSS)	Jumlah titik Zona Selamat Sekolah sebagai fasilitas keselamatan lalulintas	Titik	0	0	10 titik	1.045.500.000	12 titik	1.295.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd
				Penunjang operasional ruang kendali Area Traffic Control System (ATCS)	Terwujudnya Pengendalian Lalulintas Persimpangan yang optimal	Bulan	12 bln	150.000.000	12 bln	909.700.000	12 bln	500.000.000	Seksi lalu lintas	Smd
				Pengadaan rambu-rambu lalulintas sungai	Jumlah rambu-rambu angkutan sungai yang tersedia	Unit	0	0	0	0	70 unit	400.000.000	Seksi Prasarana Sungai	Smd
				Pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan lalulintas sungai mahakam dalam wilayah hukum samarinda	Terlaksananya penertiban kapal bersama pihak terkait	Kali	0	0	0	0	12 kali	300.000.000	Seksi Angkutan & Dermaga Sungai	Smd
				Peningkatan pelayanan publik pada pelayanan parkir	Terlaksananya Kawasan tertib parkir	Titik	0	0	100 titik	3.500.000.000	100 titik	1.200.000.000	Seksi Perparkiran	Smd
				Peningkatan Penataan Parkir Kota Samarinda	Lancarnya arus lalu lintas	Titik	0	0	0	0	270 titik	500.000.000	Seksi Perparkiran	Smd
				Rambu Jalan	Tersedianya rambu lalu lintas jalan sebagai fasilitas keselamatan lalu lintas jalan	Buah	0	0	2500 Buah	3.500.000.000	0	0	APBD Provinsi	Smd
				Pembangunan Zona Selamat Lintas Sekolah (ZOSS)	Tersedianya Zona Selamat Lintas Sekolah	Titik	0	0	15 titik	4.000.000.000	0	0	APBD Provinsi	Smd
				Pengadaan Kapal Speed Patroli & Rescue	Tersedianya Pengadaan Kapal Speed patrol & Rescue	Unit	0	0	0	0	2 unit	2.000.000.000	Seksi Keselamatan Pelayaran	Smd
				Iventarisasi Perusahaan dan Armada Angkutan khusus	Tersedianya data perusahaan & armada angkutan khusus	Dokumen	0	0	1 dokumen	150.000.000	0	0	Seksi lalu lintas	Smd
				Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Lampu PJU LED Smart System	Tersedianya Jaringan smart system LPJU	Lokasi Jaringan	0	0	2 Lokasi Jaringan	10.000.000.000	3 Lokasi Jaringan	13.000.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd
				Pengadaan dan Pemasangan PJU LED di Jembatan-jembatan Kota Samarinda	Tersedianya lampu PJU LED di jembatan	Lokasi Jaringan	0	0	2 Lokasi Jaringan	4.000.000.000	2 Lokasi Jaringan	5.000.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd



*Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021*

Tujuan	Sasaran	IndikatorSasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) danKegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2016		2017		2018			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(20)	(21)
				Pengadaan dan pemasangan jaringan dan lampu LED jalan protokol Kota Samarinda	Terpasangnya lampu LED di jalan Protokol	Lokasi Jaringan	0	0	2 Lokasi Jaringan	7.000.000.000	2 Lokasi Jaringan	10.000.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd
				Revitalisasi Jaringan dan KWh meter untuk efisiensi tagihan pajak PJU	Efisiensi jaringan dan KWh meterPJU	Lokasi Jaringan	0	0	0	0	20 Lokasi Jaringan	750.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd
				Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Jumlah pelaksanaan uji petik kendaraan operasional kendaraan bermotor	Kali	-	750.000.000	22	2.900.000.000	30	2.900.000.000	Dinas Perhubungan	Smd
Meningkatkan pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan dan sungai serta meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan penegakan hukum berlalu lintas	Meningkatnya ketertiban dan kelancaran serta keamanan lalu lintas jalan dan sungai serta Menurunya kasus pelanggaran lalu lintas jalan	Terselenggaranya tertib dan aman berlalu lintas di jalan		Peningkatan fasilitas penunjang Pengujian Kendaraan Bermotor Jalan HM. Ardans	Terciptanya gedung pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang representatif	Bulan	12 bln	-	12 bln	2.500.000.000	12 bln	2.500.000.000	Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Smd
				UPT. PKB	Proses pelayanan operasional dan administrasi	Bulan	12 bln	750.000.000	0	0	0	0	Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Smd
				Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan kendaraan yang laik jalan	Bulan	0	0	10 bln	400.000.000	10 bln	400.000.000	Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Smd
				Program peningkatan daya saing investasi sector transportasi darat, laut, udara dan ASDP	Kuantitas, Komoditas dan Penumpang	Ton dan Orang	0	0	48.702.277 ton dan 1.652.483 orang	105.710.000.000	0	0	APBD Provinsi	Smd
				Pengembangan terminal penumpang laut pelabuhan Samarinda	Akses jalan menuju terminal penumpang pelabuhan palaran	Hektar	0	0	4,5 Hektar	5,000,000,000	0	0	APBD Provinsi	Smd
				Pembebasan Lahan Menuju Terminal Penumpang Pelabuhan Palaran	Tesedianya Pembebasan Lahan Menuju Terminal Penumpang Pelabuhan Palaran	Hektar	0	0	4,5 Hektar	10,000,000,000	0	0	APBD Provinsi	Smd
				Zona Selamat Lintas Sekolah (ZOSS)	Tersedianya Zona Selamat Lintas Sekolah (ZOSS) 20 lokasi	Titik	0	0	20 Titik	2,500,000,000	0	0	APBD Provinsi	Smd



*Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021*

Tujuan	Sasaran	IndikatorSasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) danKegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2016		2017		2018			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(20)	(21)
				Pengadaan Papan Nama jalan	Tersedianya Pengadaan Papan Nama jalan	Buah	0	0	2000 buah	2,000,000,000	0	0	APBD Provinsi	Smd
				Perencanaan Peningkatan Dermaga Mahakam Ilir	Tersedianya perencanaan Peningkatan Dermaga Mahakam Hilir	Dokumen	0	0	1 Dokumen	1,210,000,000	0	0	APBD Provinsi	Smd
				Pengadaan Kapal Speed Patroli	Pengadaan Kapal Speed Patroli	Unit	0	0	1 Unit	1,000,000,000	0	0	APBD Provinsi	Smd
				Pengadaan Kapal Speed Pemadam dan Rescue	Tersedianya Pengadaan Kapal Speed Pemadam dan Rescue	Unit	0	0	1 Unit	15,000,000,000	0	0	APBD Provinsi	Smd
				Pengembangan terminal penumpang laut pelabuhan samarinda	Terbangunnya Sisi Darat Terminal Penumpang Pelabuhan Palaran	Gedung	0	0	1 Gedung	15,000,000,000	0	0	APBD Provinsi	Smd
				Pembangunan sisi darat terminal penumpang pelabuhan palaran	Tercapainya Pembangunan	Gedung	0	0	1 Gedung	50,000,000,000	0	0	APBD Provinsi	Smd
				Pemeliharaan dan Pengadaan Suku Cadang APILL	30 Lokasi	Lokasi	0	0	30 Lokasi	3,000,000,000	0	0	APBD Provinsi	Smd
				Pengadaan dan Pemasangan Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ)	75 Buah	Buah	0	0	75 Buah	1,000,000,000	0	0	APBD Provinsi	Smd



Lanjutan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019, 2020 & 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2019		2020		2021			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	Bulan	12 Bln	38.772.281.000	12 Bln	43.085.214.700	12 Bln	47.656.116.770	Dinas Perhubungan	Smd
Memingkatkan kualitas pengelolaan administrasi Dinas Perhubungan	Meningkatnya kualitas surat menyurat, kearsipan serta pelayanan Dinas Perhubungan berbasis teknologi informasi serta rapat-rapat koordinasi keluar daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Tersedianya Fasilitas Telpon, Air Dan Listrik	Bulan	12 Bln	25.796.837.000	12 Bln	28.376.520.700	12 Bln	31.214.172.770	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd
				Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Bulan	12 Bln	45.600.000	12 Bln	50.600.000	12 Bln	55.600.000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	Bulan	12 Bln	274.120.000	12 Bln	279.120.000	12 Bln	284.120.000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd
				Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan	Tersedianya alat listrik dan elektronik (lampu pijar, baterai kering)	Bulan	12 Bln	7.524.000	12 Bln	8.524.000	12 Bln	9.524.000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya penyediaan dan perlengkapan kantor	Bulan	12 Bln	253.500.000	12 Bln	253.500.000	12 Bln	253.500.000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd
				Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Bulan	12 Bln	570.000.000	12 Bln	620.000.000	12 Bln	670.000.000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd
				Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Tersedianya honorarium bagi PNS, PTTB dan PTHH	Bulan	12 Bln	11.814.700.000	12 Bln	13.486.950.000	12 Bln	15.159.200.000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	Bulan	12 Bln	10.000.000	12 Bln	10.000.000	12 Bln	10.000.000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd



*Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021*

Tujuan	Sasaran	IndikatorSasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) danKegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2019		2020		2021			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	Bulan	12 Bln	1.932.000.000	12 Bln	2.082.000.000	12 Bln	2.182.000.000	Dinas Perhubungan	Smd
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan Dinas Perhubungan	Meningkatkannya kualitas pelayanan Dinas Perhubungan baik eksternal maupun internal	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya rehab / perbaikan kecil gedung kantor	Bulan	12 bln	100.000.000	12 Bln	100.000.000	12 Bln	100.000.000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, oli serta suku cadang	Bulan	12 bln	1.600.000.000	12 Bln	1.700.000.000	12 Bln	1.750.000.000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd
				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor	Bulan	12 bln	232.000.000	12 Bln	282.000.000	12 Bln	332.000.000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd
				Program Peningkatan disiplin aparatur	Pelaksanaan disiplin aparatur	Orang	627 Orang	750.000.000	627 Orang	800.000.000	627 Orang	850.000.000	Dinas Perhubungan	Smd
Meningkatkan kompetensi sumberdaya aparatur sesuai dengan kebutuhan bidang	Meningkatnya kapasitas dan keterampilan sumber daya aparatur sesuai bidang tugasnya dan meningkatnya kualitas pelayanan baik eksternal maupun internal	Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Orang	627 Orang	750.000.000	627 Orang	800.000.000	627 Orang	850.000.000	Sekretariat (Sub Bag. Umum)	Smd
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Orang	30 Orang	300.000.000	30 orang	300.000.000	30 Orang	300.000.000	Dinas Perhubungan	Smd
Meningkatkan Disiplin Aparatur Dinas Perhubungan	Meningkatnya Kesadaran Disiplin Aparatur Dinas Perhubungan	Telaksananya aparatur yang disiplin		Bimbingan teknis dan pelatihan	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek dan Diklat	Orang	30 Orang	300.000.000	30 Orang	300.000.000	30 Orang	300.000.000	Sekretariat (Sub Bag. Program)	Smd



*Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021*

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2019		2020		2021			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan	Ketersediaan laporan kinerja dan keuangan	Dokumen	8 Dokumen	1.000.000.000	8 Dokumen	1.100.000.000	8 Dokumen	1.200.000.000	Dinas Perhubungan	Smd
Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran Dinas Perhubungan dan terselenggaranya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Dinas Perhubungan serta tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel	Terselenggaranya penyusunan dokumen perencanaan dan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan keuangan		Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan	Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT, LAKIP, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian) dan laporan keuangan	Dokumen	8 Dokumen	1.000.000.000	8 Dokumen	1.100.000.000	8 Dokumen	1.200.000.000	Sekretariat (Sub Bag. Program)	Smd
				Program pembangunan prasana dan fasilitas perhubungan	Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Bidang Perhubungan Kota Samarinda	Persentase	42,86%	5.300.000.000	71,43%	4.800.000.000	100%	4.800.000.000	Dinas Perhubungan	Smd
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan fasilitas pendukung pelayanan Dinas Perhubungan	Meningkatkannya kualitas pelayanan Dinas Perhubungan baik eksternal maupun internal	Tersediaannya sarana dan fasilitas Dinas Perhubungan			Persentase sub terminal dalam kondisi baik	Persentase	83%	0	83%	0	100%	0	Dinas Perhubungan	Smd
					Persentase Rekomendasi TUKS (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri) darat dan sungai	Persentase	100%	0	100%	0	100%	0	Dinas Perhubungan	Smd
				Peningkatan sarana dan prasarana penunjang dermaga dan pelabuhan	Peningkatan sarana dan prasarana dermaga	Dermaga	3 Dermaga	500.000.000	0	0	0	0	Seksi Prasarana Sungai	Smd
				Pengadaan Kendaraan Operasional Pengawasan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Kendaraan Operasional (Mobil Derek dan Sepeda Motor)	Mobil	2 Unit Mobil Derek dan 4 Unit Patroli	4.800.000.000	2 Unit Mobil Derek dan 4 Unit Patroli	4.800.000.000	2 Unit Mobil Derek dan 4 Unit Patroli	4.800.000.000	Seksi Pengendalian & Kertertiban	Smd



*Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021*

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2019		2020		2021			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Persentase Peningkatan Prasarana Fasilitas LLAJ yang telah mencapai Standar Pelayanan Minimal	Persentase	80%	7.600.000.000	90%	8.600.000.000	100%	9.000.000.000	Dinas Perhubungan	Smd
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana keselamatan berlalulintas baik di jalan dan sungai	Menurunnya kasus kecelakaan lalulintas baik di jalan maupun di sungai	Terpeliharanya prasarana Fasilitas pendukung LLAJ Dinas Perhubungan		Pemeliharaan Traffic Light dan Jaringan Area Traffic Control System (ATCS)	Terpeliharanya Prasarana Fasilitas LLAJ kota samarinda	Simpang Traffic light dan jaringan ATCS	34 simpang Traffic light dan jaringan ATCS	4.000.000.000	34 simpang Traffic light dan jaringan ATCS	3.500.000.000	34 simpang Traffic light dan jaringan ATCS	4.000.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd
				Rehabilitasi Pemeliharaan terminal dalam kota	Terpeliharanya terminal dalam kota	Terminal	1 Terminal	1.000.000.000	1 Terminal	1.000.000.000	1 Terminal	1.000.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd
				Rehabilitasi Halte dan Gapura Penyebrangan	Terpeliharanya Prasarana Fasilitas LLAJ kota samarinda	Unit	6 unit	200.000.000	14 unit	500.000.000	5 unit	200.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd
				Pemeliharaan dermaga loa janan dan harapan baru	Terpeliharanya fasilitas dermaga	Dermaga	0	0	4 unit	1.000.000.000	4 unit	1.000.000.000	Seksi Prasarana Sungai	Smd
				Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Berfungsinya Fasilitas Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Bulan	12 Bulan	2.400.000.000	12 Bulan	2.600.000.000	12 Bulan	2.800.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd
				Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten / Kota	Persentase	52,19%	7.725.000.000	52,70%	7.938.800.000	53,22%	8.200.800.000	Dinas Perhubungan	Smd
Meningkatkan kesadaran hukum dan perilaku masyarakat dalam tertib berlalulintas di jalan maupun di sungai	Meningkatnya kesadaran masyarakat dan perilaku masyarakat dalam berlalulintas baik di darat maupaun di sungai	Terselenggaranya pelayanan angkutan		Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/ Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji Perhubungan Bermotor minimal 4.000 (empat ribu)		Unit	1 unit	0	1 unit	0	1 unit	0	Dinas Perhubungan	Smd



*Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021*

Tujuan	Sasaran	IndikatorSasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) danKegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2019		2020		2021			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Persentase ketersediaan angkutan kota	Persentase	54,76%	0	58,70%	0	66,67%	0	Dinas Perhubungan	Smd
					Jumlah orang melalui terminal per tahun	Orang	846.132	0	1.269.198	0	1.903.797	0	Dinas Perhubungan	Smd
					Rasio ijin Perpanjangan trayek (kartu pengawasan per 6 bulan)	Rasio	81,45	0	84,59	0	86,15	0	Dinas Perhubungan	Smd
					Jumlah Uji Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Unit	84.700	0	93.170	0	102.487	0	Dinas Perhubungan	Smd
					Persentase kendaraan yang telah melakukan uji	Persentase	90%	0	90%	0	90%	0	Dinas Perhubungan	Smd
					Persentase Kendaraan umum yang memenuhi ambang batas emisi gas buang (Lulus uji emisi)	Persentase	5,22%	0	5,22%	0	5,16%	0	Dinas Perhubungan	Smd
					Persentase kapal yang bersertifikasi	Persentase	84%	0	85%	0	86%	0	Dinas Perhubungan	Smd
					Persentase Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	Persentase	100%	0	100%	0	100%	0	Dinas Perhubungan	Smd
					Persentase Kapal angkutan Sungai yang memiliki ijin usaha angkutan sungai	Persentase	100%	0	100%	0	100%	0	Dinas Perhubungan	Smd
					Persentase pendaratan dan lepas landas helicopter (Helipad) berijin	Persentase	100%	0	100%	0	100%	0	Dinas Perhubungan	Smd



*Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021*

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2019		2020		2021			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di lingkungan Terminal	Terciptanya peningkatan pelayanan angkutan pada masyarakat samarinda	Terminal	5 Terminal	700.000.000	5 Terminal	700.000.000	5 Terminal	700.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd
				Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai	Peningkatan pelayanan angkutan di Dermaga dan Pelabuhan	Dermaga	5 Dermaga	450.000.000	5 Dermaga	500.000.000	5 Dermaga	600.000.000	Seksi Angkutan & Dermaga Sungai	Smd
				Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	Proses pelayanan operasional dan administrasi yang maksimal serta tercapainya target PAD	Bulan	12 bln	1.800.000.000	12 bln	1.800.000.000	12 bln	1.800.000.000	Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Smd
				Peningkatan pengawasan dan pendataan fasilitas LLAJ dan LLAS Perhubungan	Pengawasan dan Pendataan Fasilitas Perhubungan (Survey)	40 kali	40 kali	350.000.000	40 kali	400.000.000	40 kali	500.000.000	Seksi Keselamatan Jalan	Smd
				Wahana Tata Nugraha	Terlaksananya kegiatan lomba wahana tata nugraha	penghargaan WTN	Penghargaan WTN	400.000.000	Penghargaan WTN	400.000.000	Penghargaan WTN	500.000.000	Seksi Lalu lintas	Smd
				Pengendalian dan Operasional Lalulintas angkutan sungai	Terlaksananya pengendalian dan operasional lalulintas angkutan sungai	Jumlah pengendalian dan operasional	30 kali	405.000.000	30 kali	468.800.000	30 kali	480.800.000	Seksi Angkutan & Dermaga Sungai	Smd
				Peningkatan pelayanan publik pada pelayanan proses perijinan angkutan	Terselenggaranya pelayanan ijin trayek	Armada dan Taxi argo	1524 Armada dan 36 Taxi argo	350.000.000	1524 Armada dan 36 Taxi argo	350.000.000	1524 Armada dan 36 Taxi argo	350.000.000	Seksi Angkutan Jalan	Smd
				Kampanye dan SAR keselamatan pelayaran sungai	Jumlah peserta sosialisasi kampanye SAR	Nahkoda	60 Nahkoda	800.000.000	70 Nahkoda	900.000.000	80 Nahkoda	1.000.000.000	Seksi Keselamatan Pelayaran	Smd
				Pemilihan awak kendaran umum teladan dan pelajar pelopor	Jumlah peserta pemilihan awak kendaran umum teladan dan pelajar pelopor	awak kendaraan dan pelajar pelopor	5 awak kendaraan dan 5 pelajar pelopor	400.000.000	5 awak kendaraan dan 5 pelajar pelopor	400.000.000	5 awak kendaraan dan 5 pelajar pelopor	400.000.000	Seksi Keselamatan Jalan	Smd



*Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021*

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2019		2020		2021			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Pengawasan kolam pelabuhan galangan kapal dan TUKS	Jumlah Galangan kapal dan TUKS yang diawasi	Unit	20 unit	200.000.000	20 unit	200.000.000	20 unit	200.000.000	Seksi Prasarana Multimoda	Smd
				Penunjang operasional dewan maritim kota	Operasionalisasi Dewan Maritim	Bulan	12 bln	320.000.000	12 bln	320.000.000	12 bln	320.000.000	Seksi Prasarana Multimoda	Smd
				SID alur pelayaran DLKP DLKR pelabuhan samarinda	Jumlah Segmen yang disurvey	Segmen	Segmen 3	400.000.000	Segmen 4	400.000.000	Segmen 5	400.000.000	Seksi Prasarana Multimoda	Smd
				Bus Rapid Transit (BRT) Angkutan pelajar	Terlaksananya BRT Angkutan pelajar	Bus	12 Bus	100.000.000	12 Bus	200.000.000	0	0	Seksi Angkutan Jalan	Smd
				Penertiban angkutan barang di samarinda	Jumlah perusahaan Angkutan Barang yang ditertibkan	Perusahaan Angkutan Barang	115 perusahaan angkutan barang	200.000.000	0	0	0	0	Seksi Pengendalian & Ketertiban	Smd
				Sosialisasi/Penyuluhan ketertiban lalulintas dan Angkutan	Sosialisasi Tertib Lalulintas terhadap siswa tingkat SMA/Sederajat	Sekolah	4 Sekolah	350.000.000	4 Sekolah	400.000.000	4 Sekolah	450.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd
				Monitoring dan Evaluasi terhadap perusahaan dan armada angkutan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi serta pembinaan terhadap perusahaan dan armada angkutan khusus	Bulan	12 Bulan	500.000.000	12 Bulan	500.000.000	12 Bulan	500.000.000	Seksi Angkutan Khusus	Smd
				Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	Persentase	80%	1.000.000.000	90%	6.000.000.000	90%	1.000.000.000	Dinas Perhubungan	Smd
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan Prasarana pendukung	Meningkatkannya kualitas pelayanan Dinas Perhubungan baik eksternal maupun internal	Tersediaannya sarana dan prasarana Dinas Perhubungan			Persentase tersedianya halte pada setiap Kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	Persentase	95%	0	97%	0	100%	0	Dinas Perhubungan	Smd



*Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021*

Tujuan	Sasaran	IndikatorSasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) danKegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2019		2020		2021			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
pelayanan Dinas Perhubungan				Pembangunan halte angkutan kota	Tersedianya Halte angkutan kota	Halte	4 halte	1.000.000.000	4 halte	1.000.000.000	4 halte	1.000.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd
				Peningkatan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda	Tersedianya Gedung Dinas Perhubungan	0	0	0	1 Gedung	5.000.000.000	0	0	Sekretariat DISHUB	Smd
				Program Peningkatan dan Pengamanan lalulintas	Persentase Pelaksanaan Pembinaan, Penataan, dan Penertiban Parkir Tepi Jalan di Kota Samarinda	Persentase	68%	42.200.000.000	76%	48.885.000.000	86%	49.910.000.000	Dinas Perhubungan	Smd
Meningkatkan pengawasan dan pengendalian lalulintas jalan dan sungai serta meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan penegakan hukum berlalulintas	Meningkatnya ketertiban dan kelancaran serta keamanan lalulintas jalan dan sungai serta Menurunkan kasus pelanggaran lalulintas jalan dan sungai	Terselenggaranya tertib dan lancar serta aman berlalulintas di jalan dan sungai			Berkurangnya titik kemacetan	Persentase	52,86%	0	55,71%	0	60%	0	Dinas Perhubungan	Smd
					Presentase fasilitas perlengkapan jalan (Rambu) pada jalan Kabupaten/Kota	Persentase	75%	0	90%	0	100%	0	Dinas Perhubungan	Smd
					Presentase fasilitas perlengkapan jalan (Marka) pada jalan Kabupaten/Kota	Persentase	19%	0	21%	0	22%	0	Dinas Perhubungan	Smd
					Presentase fasilitas perlengkapan jalan (ZOSS) pada jalan Kabupaten/Kota	Persentase	70%	0	80%	0	80%	0	Dinas Perhubungan	Smd
					Presentase fasilitas perlengkapan jalan (Guardrill) pada jalan Kabupaten/Kota	Persentase	78%	0	89%	0	100%	0	Dinas Perhubungan	Smd
				Penunjang Kegiatan Forum Lalu Lintas & Angkutan Jalan Kota Samarinda	Terwujudnya koordinasi yang baik antar elemen dibidang lalulintas dan angkutan jalan	Bulan	10 bln	355.000.000	10 bln	380.000.000	10 bln	400.000.000	Seksi Lalu lintas	Smd



*Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021*

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2019		2020		2021			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan lalu lintas jalan dalam wilayah hukum kota samarinda	Melakukan Penertiban Kendaraan Bersama Pihak Terkait	0	45 Kali	4.500.000.000	50 kali	5.500.000.000	55 kali	5.500.000.000	Seksi Pengendalian & Ketertiban	Smd
				Pengadaan marka jalan	Tersedianya marka jalan di kota samarinda sebagai fasilitas pengendalian dan keselamatan lalu lintas	m ²	8.500m ²	2.200.000.000	9.300m ²	2.430.000.000	10.000m ²	2.740.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd
				Pengadaan rambu – rambu lalu lintas	Tercapainya rambu-rambu lalu lintas	Rambu lalu lintas	300 rambu lalu lintas	1.265.00.000.000	300 rambu lalu lintas	1.265.00.000.000	300 rambu lalu lintas	1.265.00.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd
				Pembuatan Zona selamat sekolah (ZOSS)	Jumlah titik Zona Selamat Sekolah sebagai fasilitas keselamatan lalu lintas	Titik	14 titik	1.500.000.000	16 titik	1.710.000.000	18 titik	1.920.000.000	Seksi Prasarana Jalan	smd
				Penunjang operasional ruang kendali Area Traffic Control System (ATCS)	Terwujudnya Pengendalian Lalu lintas Persimpangan yang optimal	Bulan	12 bln	530.000.000	12 bln	550.000.000	12 bln	585.000.000	Seksi Lalu lintas	smd
				Pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan lalu lintas sungai mahakam dalam wilayah hukum samarinda	Terlaksananya penertiban kapal bersama pihak terkait	0	12 kali	300.000.000	12 kali	300.000.000	12 kali	300.000.000	Seksi Angkutan & Dermaga Sungai	Smd
				Peningkatan pelayanan publik pada pelayanan parkir	Terlaksananya Penertiban Parkir Kota Samarinda	Titik	100 titik	1.300.000.000	100 titik	1.500.000.000	100 titik	1.700.000.000	Seksi Perparkiran	Smd
				Peningkatan Penataan Parkir Kota Samarinda	Lancarnya arus lalu lintas	Titik	270 titik	500.000.000	270 titik	250.000.000	270 titik	250.000.000	Seksi Perparkiran	Smd
				Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Lampu PJU LED Smart System	Tersedianya Jaringan smart system LPJU	Lokasi Jaringan	3 Lokasi Jaringan	13.000.000.000	4 Lokasi Jaringan	16.000.000.000	3 Lokasi Jaringan	14.000.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd
				Pengadaan dan Pemasangan PJU LED di Jembatan-jembatan Kota Samarinda	Tersedianya lampu PJU LED di jembatan	Lokasi Jaringan	2 Lokasi Jaringan	6.000.000.000	2 Lokasi Jaringan	7.000.000.000	2 Lokasi Jaringan	8.000.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd



*Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021*

Tujuan	Sasaran	IndikatorSasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) danKegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2019		2020		2021			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Pengadaan dan pemasangan jaringan dan lampu LED jalan protokol Kota Samarinda	Terpasangnya lampu LED di jalan Protokol	Lokasi Jaringan	2 Lokasi Jaringan	10.000.000.000	2 Lokasi Jaringan	11.000.000.000	2 Lokasi Jaringan	12.000.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd
				Revitalisasi Jaringan dan KWh meter untuk efisiensi tagihan pajak PJU	Efisiensi jaringan dan KWh meterPJU	Lokasi Jaringan	20 Lokasi Jaringan	750.000.000	20 Lokasi Jaringan	1.000.000.000	20 Lokasi Jaringan	1.250.000.000	Seksi Prasarana Jalan	Smd
				Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Jumlah pelaksanaan uji petik kendaraan operasional kendaraan bermotor	Kali	40	2.900.000.000	50	2.900.000.000	60	2.900.000.000	Dinas Perhubungan	Smd
Meningkatkan pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan dan sungai serta meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan penegakan hukum berlalu lintas	Meningkatnya ketertiban dan kelancaran serta keamanan lalu lintas jalan dan sungai serta Menurunnya kasus pelanggaran lalu lintas jalan	Terselenggaranya tertib dan aman berlalu lintas di jalan		Peningkatan fasilitas penunjang UPT PKB Jln HM. Ardans	Terciptanya gedung pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang representatif	Bulan	12 bln	2.500.000.000	12 bln	2.500.000.000	12 bln	2.500.000.000	Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Smd
				Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan kendaraan yang laik jalan	Bulan	10 bln	400.000.000	10 bln	400.000.000	10 bln	400.000.000	Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Smd



BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan suatu organisasi terlebih lagi pemerintahan yang merupakan organisasi kompleks. Pengukuran kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama namun tetap berlandaskan dengan tinjauan Visi dan Misi Kepala Dinas beserta turunannya. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret organisasi di masa kini maupun yang akan datang.

Indikator kinerja Dinas Perhubungan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan Dinas Perhubungan secara kuantitatif maupun kualitatif yang merupakan gambaran dan mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*/hasil) dari kegiatan (*output*/keluaran). Selain itu, indikator kinerja SKPD merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) dimana pengukuran indikator “hasil” lebih utama dari pada sekedar “keluaran” karena “hasil” (*outcome*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang pencapaian dari perencanaan suatu organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Dalam melihat kinerja pembangunan suatu Dinas Perhubungan, yang digambarkan melalui tingkat capaian sasaran dan tingkat efisiensi serta efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan RENSTRA. Dengan demikian, penetapan indikator kinerja diharapkan dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara nyata.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan Dinas Perhubungan diperlukan penetapan indikator kinerja program pembangunan Dinas Perhubungan sebagai indikator kinerja utama. Sebagai lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai pada tabel 6.1 berikut :



Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Kondisi Pada Akhir RPJMD

NO	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/ Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji Perhubungan Bermotor minimal 4.000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
2	Persentase ketersediaan angkutan kota	Persentase	48,76%	50,72%	52,63%	54,76%	58,70%	66,67%	66,67%
3	Persentase tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten / Kota	Persentase	50,69%	51,18%	51,68%	52,19%	52,70%	53,22%	53,22%
4	Jumlah orang melalui terminal per tahun	Orang	197.156	593.776	564.088	846.132	1.269.198	1.903.797	1.903.797
5	Rasio ijin Perpanjangan trayek (kartu pengawasan per 6 bulan)	Rasio	63,86	70,24	76,63	81,45	84,59	86,15	86,15
6	Jumlah Uji Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Unit	63,636	70,000	77,000	84,700	93,170	102,487	102,487
7	Persentase kendaraan yang telah melakukan uji	Persentase	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
8	Persentase Kendaraan umum yang memenuhi ambang batas emisi gas buang (Lulus uji emisi)	Persentase	5,22%	5,22%	5,22%	5,22%	5,22%	5,16%	5,16%



NO	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Persentase kapal yang bersertifikasi	Persentase	81%	82%	83%	84%	85%	86%	86%
10	Persentase Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Persentase Kapal angkutan Sungai yang memiliki ijin usaha angkutan sungai	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Persentase pendaratan dan lepas landas helicopter (Helipad) berijin	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Persentase sub terminal dalam Kondisi baik	Persentase	75%	80%	80%	83%	83%	100%	100%
14	Persentase Rekomendasi TUKS (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri) darat dan sungai	Persentase	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Bidang Perhubungan Kota Samarinda	Persentase	-	40%	60%	100%	100%	100%	100%
16	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	Persentase	65%	70%	75%	80%	90%	90%	90%
17	Persentase tersedianya halte pada setiap Kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	Persentase	85%	87%	92%	95%	97%	100%	100%



NO	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Persentase peningkatan Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang telah mencapai Standar Pelayanan Minimal	Persentase	65%	70%	75%	80%	90%	100%	100%
19	Persentase Pelaksanaan Pembinaan, Penataan, dan Penertiban Parkir Tepi Jalan di Kota Samarinda	Persentase	56%	60%	62%	68%	76%	86%	86%
20	Berkurangnya titik kemacetan	Persentase	48,57%	50%	51,43%	52,86%	55,71%	60%	60%
21	Presentase fasilitas perlengkapan jalan (Rambu) pada jalan Kabupaten/Kota	Persentase	45%	55%	65%	75%	90%	100%	100%
22	Presentase fasilitas perlengkapan jalan (Marka) pada jalan Kabupaten/Kota	Persentase	16%	17%	18%	19%	21%	22%	22%
23	Presentase fasilitas perlengkapan jalan (ZOSS) pada jalan Kabupaten/Kota	Persentase	40%	50%	60%	70%	80%	80%	80%
24	Presentase fasilitas perlengkapan jalan (Guardrill) pada jalan Kabupaten/Kota	Persentase	44%	56%	67%	78%	89%	100%	100%
25	Jumlah Pelaksanaan Uji Petik Kelaikan Operasional Kendaraan Bermotor	Kali	-	22	30	40	50	60	60



BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2016-2021 yang berisi permasalahan, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan merupakan pedoman Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam menyusun Rencana Kerja guna penyelenggaraan kegiatan pengawasan di lingkup Kota Samarinda selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Bila nantinya diperlukan perubahan atau penyesuaian, dapat dilakukan *review* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Guna penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2016-2021, selama masa transisi saat Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Samarinda sedang dalam penyusunan, maka Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Samarinda ini dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan perlu didukung oleh seluruh *stakeholder* terkait, baik pimpinan dan staf, serta seluruh karyawan/karyawati Dinas Perhubungan Kota Samarinda, dan seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, Renstra ini juga menjadi acuan dalam upaya pengawasan yang pada akhirnya dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik lagi di wilayah Kota Samarinda khususnya bidang Perhubungan.

Pada akhirnya, keberhasilan kegiatan pengawasan secara terpadu diharapkan dapat mendukung tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah Kota Samarinda.